

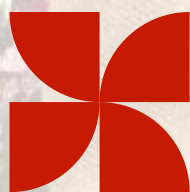


GES

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS



**Tahun 2023
Audited**





DISUSUN OLEH

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS



Supendi

Syamsul Bahri

Eko P

Mega

Tomi

Efdiono

Saidah

A. Putra

Achmad S

Idham

Wisnu



Supendi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKP-TW) periode Tahun 2023 Audited.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) merupakan laporan yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. LKPK disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. LKPK menjadi suatu upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan pemerintah, yang tidak hanya mencerminkan pencapaian dan kondisi keuangan pemerintah tetapi juga merupakan komitmen untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

LSKP-TW yang disusun berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan anggaran yang aktual dan efektif serta analisis perbandingan kondisi fiskal antar negara, dan diharapkan dapat menyediakan informasi fiskal yang andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai aktivitas pemerintahan serta berguna untuk menilai kinerja fiskal Pemerintah. LSKP-TW merupakan penghubung yang menerjemahkan informasi akuntansi menjadi lebih dapat dimengerti secara luas dan selaras dengan konsep makro ekonomi dan kaidah statistik.

LKPK-TW dan LSKP-TW periode Tahun 2023 Audited terdiri LRA Konsolidasian dan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. LKPK-TW dan LSKP-TW secara umum telah menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta posisi keuangan pemerintah pada tingkat wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini dan berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui penerapan Statistik Keuangan Pemerintah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 30 Agustus 2024
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Selatan



Ditandatangani secara elektronik
SUPENDI



HAL 03
KATA PENGANTAR

HAL 06
RINGKASAN EKSEKUTIF

HAL 11
FACE GFS
TA 2023 AUDITED

HAL 30
METADATA GFS
TA 2023 AUDITED

HAL 33
CALK LKPK-TW

HAL 68
CALK LSKP-TW

DAFTAR ISI

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS



RINGKASAN EKSEKUTIF

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsolidasi LKPP dan LKPD dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

Sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka mewujudkan konsolidasi laporan, perlu adanya Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kanwil DJPb sebagai institusi kantor vertikal Kementerian Keuangan yang diberi mandat menyusun laporan statistik keuangan tingkat regional, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).

Sumber data dalam penyusunan LKPK-TW dan LSKP TW adalah data/informasi keuangan pemerintah yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Kenaikan nilai Aset Non Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 tersebut berkontribusi secara positif dalam menaikkan nilai Kekayaan Bersih Pemerintah Umum per 31 Desember 2023. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan komposisi kepemilikan, porsi Aset Non Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian yang disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran LKPK-TW

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian tahun 2023 mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, Pendapatan Konsolidasian mencapai **Rp30,42 triliun**.

Pendapatan Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar **Rp20,73 triliun** atau **68,14%**, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Konsolidasian sebesar **Rp9,52 triliun** atau **31,29%**, dan Pendapatan hibah sebesar **Rp158 miliar** atau **0,57%**. Dengan

demikian, Pendapatan Pemerintah untuk mendanai kegiatan operasional masih mengandalkan pendapatan dari sektor perpajakan.

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar sebesar **Rp20,49 triliun** dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar **Rp250,3 miliar**. Untuk pendapatan pajak dalam negeri, sebagian besar diperoleh dari Pendapatan Pajak Penghasilan dan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai.

Sementara itu, PNBK Konsolidasian yang menjadi pendukung sumber pendanaan pemerintah terdiri dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar sebesar sebesar **Rp383,3 miliar**, PNBK Lainnya sebesar **Rp2,24 triliun**, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp2,32 triliun** dan Pendapatan BLU sebesar **Rp4,12 triliun**.



Belanja Konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp72,59 triliun** terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar **Rp25,20 triliun**, Belanja Barang Konsolidasian **Rp25,17 triliun**, Belanja Modal Konsolidasian sebesar **Rp13,74 triliun**, Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian sebesar **Rp402,8 miliar**, Belanja Subsidi Konsolidasian sebesar **Rp26,3 miliar**, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar **Rp1,62 triliun**, Bantuan Sosial Konsolidasian **Rp123,2 miliar**, dan Belanja lain-lain sebesar **Rp48,8 miliar**.

Kecenderungan porsi belanja pegawai di Pempus, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot mengalami kenaikan dan belanja barang mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan fiskal melindungi daya beli masyarakat akibat inflasi, dampak domino akibat El Nino yang berkepanjangan dan sebagai stimulus ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 terdapat Defisit Konsolidasian sebesar **-Rp42,17 triliun**, yang terjadi karena realisasi pendapatan sebesar **Rp30,42 triliun** sedangkan belanja mencapai **Rp72,59 triliun**.

Sumber pembiayaan untuk menutup Defisit berasal dari Pembiayaan Konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp2,35 triliun** yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp2,77 triliun** dikurangi

pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp422,7 miliar**. Penerimaan Pembiayaan terbesar diperoleh dari Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar **Rp2,77 triliun**.

Laporan Neraca LKPK-TW

Total Aset Konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp361,79 triliun** terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian sebesar **Rp17,58 triliun**, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar **Rp4,59 triliun**, Aset Tetap Konsolidasian sebesar **Rp334,26 triliun**, Properti Investasi sebesar **Rp305,7 miliar**, dana cadangan sebesar **Rp0,86 miliar**, Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp50,4 miliar**, dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar **Rp4,99 triliun**. Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset tetap, yaitu sebesar **92,39%** dari Total Aset Konsolidasian. Aset Konsolidasian terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar **Rp236,12 triliun** dan total Aset Konsolidasian Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp125,667 triliun** setelah eliminasi akun resiprokal.

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar **Rp9,77 triliun** yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar **Rp4,69 triliun** dan kewajiban jangka Panjang sebesar **Rp5,0 triliun**. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp361,79 triliun** yang terdiri dari Kewajiban sebesar **Rp9,77 triliun** dan Ekuitas sebesar **Rp352,02 triliun**

Laporan Operasional LKPK-TW

Pada periode laporan tahun 2023, Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar **Rp63,93 triliun** merupakan konsolidasi Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat dan Pendapatan Operasional Pemerintah Daerah.

Pendapatan Operasional Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar **Rp21,43 triliun** atau **33,52%**, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Konsolidasian sebesar **Rp2,47 triliun** atau **3,87%**, Pendapatan Transfer **Rp3,15 triliun** atau **4,93%**, Pendapatan BLU sebesar **Rp4,18 triliun** atau **6,54%**, Pendapatan hibah sebesar **Rp2,66 triliun** atau **4,16%**, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Konsolidasian sebesar **Rp30,03 triliun** atau **46,98%** dari Pendapatan Operasional Konsolidasian.

Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp70,27 triliun**. Beban Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar **Rp56,25 triliun** dan Beban Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar **Rp41,99 triliun** dikurangi eliminasi sebesar **Rp27,97 triliun**.

Kondisi keuangan pada LO Konsolidasian yang menunjukkan dengan beban yang harus ditanggung sebesar **Rp70,27 triliun**, menimbulkan kondisi defisit operasional yaitu **-Rp6,34 triliun**, karena di sisi pendapatan yang mampu dikumpulkan sebesar **Rp63,93 triliun**.

Hal ini menandakan bahwa biaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat tercukupi dengan pendapatan yang dikumpulkan sehingga sebagian mengandalkan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan ke Sulawesi Selatan melalui mekanisme transfer dana perimbangan dan pencairan dana satker APBN dengan beban dari BUN.



Ekuitas Awal konsolidasian periode laporan tahun 2023 sebesar **Rp226,46 triliun**. Hal ini memberikan gambaran adanya pertumbuhan ekuitas sebesar **Rp7,96 triliun** atau sebesar **3,52%**, dimana Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar **Rp234,42 triliun** terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp231,82 triliun** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp2,6 triliun**.

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun dengan mengonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK- TW).

Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah

Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 menunjukkan bahwa **Revenue** mencapai sebesar **Rp85,79 triliun**, yang terdiri dari **Taxes** sebesar **Rp20,69 triliun**, **Grants** sebesar **Rp2,81 triliun**, dan **Other revenue** sebesar **Rp62,29 triliun**. Sedangkan **EXPENSE** mencapai **Rp58,85 triliun** yang terdiri dari **Compensation of employees** sebesar **Rp25,90 triliun**, **Use of goods and services** sebesar **Rp18,59 triliun**, **Consumption of fixed capital** sebesar **Rp3,87 triliun**, **Interests** sebesar **Rp69,88 miliar**, **Subsidies** sebesar **Rp26,36 miliar**, **Grants** sebesar **Rp7,33 triliun**, **Social benefits** sebesar **Rp123,2 miliar** dan **Other expense** sebesar **Rp2,93 triliun**.

Saldo Operasi Bruto/Neto (Gross/Net Operating Balance) sebesar **Rp30,82 triliun**, setelah dikurangi dengan Akuisisi Aset Non Keuangan Neto sebesar **Rp13,72 triliun** menghasilkan angka Pinjaman neto (net lending/borrowing) sebesar **Rp15,97 triliun**.

Laporan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat, **NET WORTH** per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp353,94 triliun**, yang terdiri atas **Nonfinancial assets** sebesar **Rp348,73 triliun**, **Financial assets** sebesar **Rp14,98 triliun** dan **Liabilities** sebesar **Rp9,77 triliun**. Seluruh aset keuangan dan kewajiban merupakan aset keuangan dan kewajiban domestic.



LAPORAN FACE

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS





REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

dan

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited)

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

FACE

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian		(Dalam Rupiah)
		31 DESEMBER 2023
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI		30.421.971.628.640
Pendapatan Perpajakan konsolidasi		20.737.924.501.124
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		20.487.607.806.124
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		250.316.695.000
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		9.525.148.917.579
Pendapatan Sumber Daya Alam		
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan		383.352.273.796
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		2.239.056.322.669
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA		1.139.351.912
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		146.484.216.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		2.321.681.393.214
Bantuan Keuangan - LRA		310.541.636.300
Pendapatan Badan Layanan Umum		4.122.893.723.688
Pendapatan hibah		158.898.209.937
Pendapatan hibah dalam negeri		158.898.209.937
Pendapatan hibah luar negeri		
B. Belanja		72.594.531.556.185
Belanja pegawai		25.201.332.890.703
Belanja gaji dan tunjangan		23.217.274.756.926
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito		1.678.149.439.629
Belanja kontribusi sosial		305.908.694.148
Belanja barang dan jasa		25.127.059.796.335
Belanja barang		9.494.086.545.177
Belanja Jasa		4.375.020.871.108
Belanja Pemeliharaan		1.644.799.875.503
Belanja Perjalanan Dinas		2.544.762.029.392
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)		1.967.754.547.189
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda		3.874.866.649.824
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS		1.225.769.278.142
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden		
Belanja Modal		13.744.856.660.987
Belanja Modal Tanah		314.833.110.979
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.271.856.869.996
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		3.135.716.422.731
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		7.439.093.915.442
Belanja Modal Lainnya		180.485.018.408
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)		402.871.323.431
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		69.882.906.168
Belanja Pembayaran Bunga Utang		69.882.906.168
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara		
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption		
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara		
Belanja Denda		
Belanja Subsidi		26.364.911.140
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		26.364.911.140
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Hibah		1.616.754.514.076
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri		
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional		
Belanja Hibah Kepada Pemerintah		388.990.184.735
Belanja Hibah Lainnya		1.227.764.329.341
Belanja Bantuan Sosial		123.164.159.679
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		10.226.264.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial		70.067.100.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana		42.870.795.679
Belanja Lain-lain		48.839.435.652

Belanja Lain-lain	48.839.435.652
C. BELANJA TRANSFER	6.636.276.281.445
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	6.304.125.261.154
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.388.950.617.342
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.388.850.731.275
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.099.886.067
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.915.174.643.812
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	335.767.611.022
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	3.579.407.032.790
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	332.151.020.291
Dana Bagi Hasil	(3.817.059.760)
Dana Bagi Hasil Pajak	(161.470.379.080)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	162.412.981.900
Dana Bagi Hasil Cukai	(4.759.662.580)
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	54.646.119.582
Dana Alokasi Khusus Fisik	54.646.119.582
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	134.837.744.469
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	134.837.744.469
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	146.484.216.000
Dana Desa	146.484.216.000
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	(42.172.559.927.545)
E. Pembiayaan	2.346.069.110.510
Penerimaan Pembiayaan	2.768.809.942.090
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	2.768.809.942.090
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan	422.740.831.580
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	395.164.831.580
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
Penyertaan Modal Negara	27.576.000.000
RDI/RPD	
Dukungan Infrastruktur	
Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Suspense Pembiayaan	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	(39.826.490.817.035)

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)
Uraian		31 DESEMBER 2023
Aset		361.790.593.818.708
Aset lancar		17.588.547.493.359
Kas dan setara kas		4.071.142.325.694
Uang muka rekening BUN-khusus pusat		
Investasi jangka pendek		70.000.000.000
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja		105.733.310.646
Piutang		3.001.298.292.760
Piutang Perpajakan		1.531.751.012.652
Piutang Bukan Pajak		3.203.693.833.107
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		61.698.066.976
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		35.680.412
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman		
Piutang lain-lain		188.180.601.995
Penyisihan piutang tak tertagih		(1.984.060.902.382)
Persediaan		10.340.373.564.259
Piutang PFK		
Investasi jangka panjang		4.595.779.005.744
Investasi jangka panjang non permanen		8.647.300.021
Investasi jangka panjang permanen		4.587.131.705.723
Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
Aset tetap		334.259.655.227.934
Tanah		209.915.051.888.123
Peralatan dan mesin		57.718.836.357.385
Gedung dan bangunan		52.432.117.206.782
Jalan, irigasi, dan jaringan		115.909.147.656.521
Aset tetap lainnya		3.569.090.647.887
Konstruksi dalam pengerjaan		11.079.268.975.142
Konsesi Jasa		4.045.648.366.822
Akumulasi penyusutan		(120.409.505.870.728)
Aset Tetap Yang Belum Diregister		
Properti Investasi		305.780.813.247
Dana cadangan		855.483.846
Dana cadangan		855.483.846
Piutang jangka panjang		50.496.994.149
Tagihan piutang penjualan angsuran		1.609.350.400
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi		50.512.420.059
Piutang jangka panjang kredit pemerintah		
Piutang jangka panjang lainnya		
Penyisihan piutang jangka panjang		(1.624.776.310)
Aset lainnya		4.989.478.800.429
Kemitraan dengan pihak ketiga		367.273.106.818
Aset tidak berwujud		1.232.356.360.612
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		727.262.336.871
Dana Penjaminan		
Dana Kelolaan BLU		
Aset lain-lain		4.449.648.831.481
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya		
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1.787.061.835.353)
Kewajiban / Utang		9.766.862.906.784
Kewajiban jangka pendek		4.694.270.906.764
Utang perhitungan pihak ketiga		1.821.811.920
Utang kepada pihak ketiga		3.796.395.641.918
Utang bunga		12.269.580.127
Utang subsidi		
Utang Transfer		3.780.573.093
Bagian lancar utang jangka panjang		449.694.617.941
Utang surat perbendaharaan negara		
Utang Yang Belum Ditagihkan		
Utang jangka pendek lainnya		119.439.487.279
Uang Muka		102.762.470
Utang Jangka Pendek Lainnya		310.766.432.016
Kewajiban jangka panjang		5.072.592.000.020
Utang jangka panjang dalam negeri		1.699.312.353.384

Utang jangka panjang luar negeri	3.373.279.646.636
Kewajiban Konsesi Jasa	352.023.730.911.924
Ekuitas	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022

		(Dalam Rupiah)
Uraian		2023
EKUITAS AWAL		226.456.546.279.417
Ekuitas Awal pemerintah Pusat		226.456.546.279.417
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah		
Penyesuaian Ekuitas Awal		
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN		226.456.546.279.417
SURPLUS / (DEFISIT) LO		(6.244.082.231.288)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
Penyesuaian Nilai Aset		
Koreksi SILPA		
Koreksi Nilai Persediaan		292.314.569.262
Selisih Revaluasi Aset		
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		1.231.241.230.710
Koreksi atas Reklasifikasi Aset		22.231.116.421
Koreksi Lain-lain		183.473.161.231
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		1.729.260.077.624
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		12.479.176.513.037
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI		
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS		
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		7.964.354.359.373
EKUITAS AKHIR		234.420.900.638.790

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
KEGIATAN OPERASIONAL	(12.814.512.044.077)
Pendapatan Operasional-LO	63.929.113.660.472
Pendapatan perpajakan-LO	21.427.527.582.262
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	21.175.619.187.262
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	251.908.395.000
Pendapatan bukan pajak-LO	2.474.212.001.319
Pendapatan sumber daya alam-LO	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	571.050.434.702
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	1.903.161.566.617
Pendapatan Transfer - LO	3.148.674.480.150
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	372.600.104.361
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	216.508.443.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.190.481.238.123
Bantuan Keuangan - LO	369.084.694.666
Pendapatan BLU-LO	4.184.085.577.716
Pendapatan Jasa BLU - LO	4.042.811.050.453
Pendapatan Hibah BLU - LO	4.120.831.817
Pendapatan Lainnya BLU - LO	137.153.695.446
Pendapatan hibah-LO	2.662.138.601.179
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	2.662.138.601.179
Pendapatan lainnya-LO	30.032.475.417.845
Pendapatan lainnya Pemda	
Pendapatan Penyesuaian Akrua	2.399.218.209
Sub Total Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	30.030.076.199.636
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	30.030.076.199.636
Beban Operasional	70.265.324.006.577
Beban pegawai	26.065.511.854.080
Beban gaji dan tunjangan	24.333.929.747.316
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transito	1.731.582.106.764
Beban kontribusi sosial	
Beban persediaan	1.680.745.341.120
Beban barang dan jasa	21.394.655.387.224
Beban barang	8.777.957.637.228
Beban jasa	5.744.966.888.368
Beban pemeliharaan	1.842.712.545.622
Beban perjalanan dinas	2.864.580.985.550
Beban BLU/BLUD	650.103.152.295
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	1.514.334.178.161
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil	
Presiden	
Beban bunga	57.076.560.226
Beban Pembayaran Bunga Utang	57.076.560.226
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Beban Denda	
Beban subsidi	22.410.349.680
Beban subsidi kepada perusahaan publik	22.410.349.680
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	
Beban Subsidi - Estimasi	
Beban hibah	2.065.960.136.099
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	
Beban hibah kepada organisasi internasional	
Beban hibah kepada pemerintah daerah	829.236.775.942
Beban Hibah Lainnya	1.236.723.360.157
Beban bantuan sosial	115.591.870.464
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	10.403.883.785
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	70.067.100.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	35.120.886.679
Beban lain-lain/beban tidak terduga	77.429.505.291
Beban Lain-lain	77.429.505.291
Beban akrual lainnya	12.307.641.304.421

Beban Penyusutan Aset Tetap	11.825.209.296.446
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	142.457.544.248
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	339.974.463.727
BEBAN TRANSFER	6.478.301.697.972
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	2.051.988.955.347
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	2.051.988.955.347
Dana Desa	2.051.988.955.347
Beban Transfer Lain-lain	
Beban Suspense Transfer	
BEBAN TRANSFER PEMDA	4.426.312.742.625
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.213.682.524.646
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.004.669.115
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	456.018.458.211
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.751.607.090.653
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6.336.210.346.105)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	1.042.388.912
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	(28.566.682.060)
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	153.000.353.401
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	(19.345.906.351)
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	(1.198.250.002)
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	(72.416.778.655)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	32.515.125.245
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.303.695.220.860)
SURPLUS (DEFISIT) LO	(6.308.525.148.061)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

		(Dalam Rupiah)
Uraian		2023
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL		
A. Saldo Anggaran Lebih Awal		1.023.869.516.122
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih		
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian		1.023.869.516.122
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL		1.023.869.516.122
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		(18.803.945.907.868)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)		(17.780.076.391.746)
D. Penyesuaian SAL		
1. Penyesuaian Pembukuan		
2. Penyesuaian Lain-lain		17.780.076.391.746
Total Penyesuaian SAL (A.II)		17.780.076.391.746
Rincian Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SILPA		
Selisih Kurs (Unrealized)		
Koreksi Kas BUN		
Koreksi Kas KPPN		
Koreksi Kas BLU		
Koreksi Kas Hibah		707.300.000
Koreksi Utang PFK		
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)		
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)		
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:		
Penyesuaian Transaksi RPL		
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris		
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Pembulatan		17.780.076.391.746
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)		
2. PERHITUNGAN FISIK SAL		
SALDO AKHIR KAS BUN		
SALDO AKHIR KAS KPPN		
SALDO AKHIR KAS BLU		783.319.299.576
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH		477.530.366.671
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		7.519.054
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice		
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL		
Selisih Kiriman Uang		
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan		
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan		
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)		
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan		
Pengembalian Escrow PNPB		
Transito BLU		
Dana Optimalisasi Kas		
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

FACE

**LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT
WILAYAH**

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
REVENUE	85.793.689.985.285
Taxes	20.688.344.853.593
Social contributions	
Grants	2.807.445.440.227
Other revenue	62.297.899.691.465
EXPENSE	58.849.674.895.198
Compensation of employees	25.904.365.130.869
Use of goods and services	18.592.632.139.206
Consumption of fixed capital	3.872.596.002.375
Interests	69.882.906.168
Subsidies	26.364.911.140
Grants	7.330.400.754.264
Social benefits	123.164.159.679
Other expense	2.930.268.891.497
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	30.816.611.092.462
Net operating balance (1-2+NOBz)	26.944.015.090.087
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	29.686.598.673.953
Net/gross investment in nonfinancial assets	13.721.159.421.965
Fixed Assets	13.399.120.972.083
Weapon systems	909.547.365
Inventories	
Nonproduced assets	322.038.449.882
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	15.965.439.251.988
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	15.593.274.420.408
Domestic debtors	15.593.274.420.408
External debtors	
Net incurrence of liabilities [331+332]	(372.164.831.580)
Domestic creditors	(372.164.831.580)
External creditors	
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)	(2.742.583.583.866)

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023
NET WORTH	353.942.088.131.616
Nonfinancial assets	348.733.424.503.180
Fixed assets	128.445.486.838.024
Buildings and structures	107.166.308.918.055
Dwellings	15.142.067.753.590
Buildings other than dwellings	39.201.563.792.002
Other structures	52.822.677.372.463
Land improvements	
Machinery and equipment	14.422.430.061.002
Transport equipment	5.243.851.917.004
Machinery and equipment other than transport equipment	9.178.578.143.998
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	3.645.317.472.584
Machinery and equipment not elsewhere classified	5.533.260.671.414
Other fixed assets	6.802.471.819.976
Cultivated biological resources	29.250.293.270
Animal resources yielding repeat products	7.286.714.807
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	21.963.578.463
Intellectual property products	6.773.221.526.706
Research and development	147.595.768.060
Mineral exploration and evaluation	
Computer software and databases	1.203.420.906.711
Entertainment, literary, and artistic originals	216.385.046.500
Other intellectual property products	5.205.819.805.435
Weapon systems	54.276.038.991
Inventories	10.340.373.564.259
Strategic stocks	12.057.831.210
Other inventories	10.328.315.733.049
Materials and supplies	6.101.169.238.329
Work in progress	
Finished goods	
Goods for resale	4.227.146.494.720
Military inventories	
Valuables	
Nonproduced assets	209.947.564.100.897
Land	209.915.051.888.123
Mineral and energy resources	
Other naturally occurring assets	
Noncultivated biological resources	
Water resources	
Other natural resources	
Radio spectrum	
Natural resources not elsewhere classified	
Intangible nonproduced assets	32.512.212.774
Contracts, leases, and licenses	32.512.212.774
Marketable operating leases	
Permits to use natural resources	
Permits to undertake specific activities	
Entitlement to future goods and services on an exclusive basis	32.512.212.774
Goodwill and marketing assets	
Financial assets [621+622]	14.975.526.535.220
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits [6212+6222]	4.809.260.146.411
Debt securities [6213+6223]	68.647.300.021
Loans [6216+6226]	
Equity and investment fund shares [6215+6225]	4.587.131.705.723
Equity [62151+62251]	4.587.131.705.723
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	

Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts receivable [6218+6228]	5.510.487.383.065
Trade credit and advances [62181 + 62281]	120.117.810.138
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	5.390.369.572.927
Domestic debtors	14.975.526.535.220
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	4.809.260.146.411
Debt securities	68.647.300.021
Loans	
Equity and investment fund shares	4.587.131.705.723
Equity	4.587.131.705.723
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	5.510.487.383.065
Trade credit and advances	120.117.810.138
Miscellaneous other accounts receivable	5.390.369.572.927
External creditors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	
Liabilities [631+632]	9.766.862.906.784
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]	
Currency and deposits [6212+6222]	
Debt securities [6213+6223]	
Loans [6216+6226]	2.149.006.971.325
Equity and investment fund shares [6215+6225]	
Equity [62151+62251]	
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts payable [6218+6228]	7.617.855.935.459
Trade credit and advances [62181 + 62281]	229.638.857.528
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	7.388.217.077.931
Domestic creditors	9.766.862.906.784
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	2.149.006.971.325
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	

Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	7.617.855.935.459
Trade credit and advances	229.638.857.528
Miscellaneous other accounts payable	7.388.217.077.931
External creditors	
Special Drawing Rights (SDRs)	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Cash receipts from operating activities	79.166.061.666.141
Taxes	39.362.911.170.011
Social Contribution	
Grants	2.807.445.440.227
Other Receipts	36.995.705.055.903
Cash payments for operating activities	26.500.914.459.673
Compensation of Employees	25.904.365.130.869
Purchase of Goods and Service	
Interest	69.882.906.168
Subsidies	26.364.911.140
Grants	(2.553.131.539.680)
Social Benefits	123.164.159.679
Other Payments	2.930.268.891.497
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	52.665.147.206.468
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS	
Purchases of nonfinancial assets	16.807.710.587.922
Fixed Assets	16.485.672.138.040
Strategic Stocks	
Valuables	
Nonproduced Assets	322.038.449.882
Sales of nonfinancial assets	23.697.239.022
Fixed Assets	23.697.239.022
Strategic Stocks	
Valuables	
Nonproduced Assets	
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	16.784.013.348.900
CASH SURPLUS/DEFISIT	69.449.160.555.368
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	27.474.611.997
Domestic debtors	27.474.611.997
External creditors	
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	(372.164.831.580)
Domestic creditors	(372.164.831.580)
External creditors	
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	(399.639.443.577)
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	(344.690.219.583)
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities	69.793.850.774.951
.....Central government	
.....Budgetary central government	

LEMBAR PEMERIKSAAN DAN REVIU BERJENJANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tanggal Cetak :
 Tanggal LKPP :
 Tanggal LKPD :

LAPORAN REALISASI

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... 	 NIP..... 	 NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... 	 NIP..... 	 NIP.....

NERACA

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... 	 NIP..... 	 NIP.....

LAPORAN ARUS KAS

Penyusun Laporan	Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Arus Kas dan SAL	Kepala Subdirektorat PLKPP
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN OPERASIONAL

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....



META DATA

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

META DATA

INFORMASI DASAR	
1. Nama Data	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (<i>Audited</i>)
2. Penyelenggara Statistik	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat	: Gedung Keuangan Negara II Lantai 2&3 Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar
4. Nomor Telepon	: 0411-456955, 456133
5. Nomor Faksimili	: 0411-456134
6. Email	: papk.sulsel@gmail.com
DEFINISI DATA	
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (<i>System of National Accounts – SNA</i>), Manual Neraca Pembayaran (<i>The Balance of Payments Manual</i>), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (<i>The Monetary and Financial Statistics Manual</i>). LSKP-TW merupakan konsolidasi dari Kertas Kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah. LSKP-TW Tahun 2023 (<i>Audited</i>) disusun terdiri dari: 1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah; 2. Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah; 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah; 4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah; dan 5. Metadata.	
CAKUPAN DATA	
Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Wilayah meliputi: Lembar muka Laporan Operasional Statistik, Neraca Statistik, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah dan Metadata Tahun 2023 (<i>Audited</i>). Data dinyatakan dalam rupiah.	
PERIODE PUBLIKASI	
Tahunan	
KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI	
Data Triwulan dan Semester diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data. <i>Preliminary</i> tahunan diterbitkan 2 (dua) bulan setelah berakhirnya periode data. Data tahunan (<i>Unaudited</i>) diterbitkan 4 (empat) bulan setelah berakhirnya periode data sedangkan data tahunan final (<i>Audited</i>) diterbitkan 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya periode data.	

WAKTU PUBLIKASI
Satu bulan sebelum publikasi berikutnya diterbitkan.
STATUS DATA
LKPK-TW dan LSKP-TW Tahun 2023 <i>Audited</i> berstatus angka final karena seluruhnya disusun menggunakan data laporan keuangan <i>Audited</i>.
SUMBER DATA
1. Sumber data laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah (LKPP-TW) berasal dari Konsolidasian data SiAP yang telah direkonsiliasi dengan data SAI. 2. Sumber data laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK-TW) berasal dari Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Laporan Keuangan UAKKBUN Kanwil Sulawesi Selatan <i>Audited</i> 2023. 4. Sumber data LRA, Neraca, LO Pemerintah Pusat diambil dari aplikasi SIKRI MP, pada hari Jumat, 30 Agustus 2024. 5. Sumber data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari LKPD <i>Audited</i> yang disampaikan oleh masing-masing Pemda.
METODOLOGI
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). LSKPP-TW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan <i>mapping</i> BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam GFS <i>classification assistant</i> yang berupa kertas kerja <i>MS Excel</i> yang menyediakan kerangka <i>mapping</i> masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. LSKPU-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui <i>mapping</i> BAS <i>detail</i> data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW), (2) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), melalui <i>mapping</i> BAS <i>detail</i> data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW); dan (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW).
INTEGRITAS DATA
1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data tahun 2023 <i>Audited</i> terdiri dari 804 UAKPA dari 47 Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 <i>Audited</i>, proses konsolidasi dilakukan terhadap 25 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota (1 Pemerintah Provinsi, 2 Pemerintah Kota, dan 22 Pemerintah Kabupaten) dengan rincian sebagai berikut : a. 25 Laporan Realisasi Anggaran Pemda Tahun 2023 (<i>Audited</i>); b. 25 Neraca Pemda Tahun 2023 (<i>Audited</i>); c. 25 Laporan Operasional Pemda Tahun 2023 (<i>Audited</i>); d. 25 Laporan Perubahan Ekuitas Pemda Tahun 2023 (<i>Audited</i>); dan e. 25 Laporan Arus Kas Pemda Tahun 2023 (<i>Audited</i>). Adapun laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan tersebut secara lengkap disajikan dalam lampiran.

3. Sumber data berasal dari 25 LKPD Pemda periode 2023 Unaudited yang terkumpul secara lengkap yang selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data pada publikasi berikutnya apabila kekeliruan data ditemukan

AKSES DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung Keuangan Negara II Lantai 2&3 Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.



CALK LKPK-TW

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

A. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN LKPK-TW

A.1. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN LKPK-TW

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan gabungan atau konsolidasi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyajikan ikhtisar sumber dan alokasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur yaitu Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran.

LRA Konsolidasian menggambarkan bahwa penerimaan di wilayah Sulawesi Selatan dari sektor pajak mengalami kenaikan dan PNBPN mengalami kenaikan dimana penerimaan didominasi oleh sektor perpajakan. Pendapatan dari sektor perpajakan masih didominasi oleh pajak dalam negeri. Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor perpajakan tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dimana pajak dalam negeri mengalami kenaikan dan pajak perdagangan internasional mengalami penurunan. Penurunan dari pajak perdagangan internasional menggambarkan arus keluar masuk barang (ekspor-impor) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kondisi yang menurun dibanding tahun 2022.

Sementara itu, pada sisi belanja pemerintah juga mengalami kondisi yang sama dengan pendapatan. Secara berurutan yang mengalami kenaikan terbesar adalah belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, belanja hibah, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi. Sedangkan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 adalah belanja bantuan sosial, belanja lain-lain. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan serta reformasi struktural pada tahun 2023.

Transfer kepada daerah menunjukkan kenaikan sebesar **59,92%** di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, menggambarkan tingginya kebutuhan fiskal dari pemerintah daerah dalam upaya pemerataan pembangunan, pemulihan ekonomi, desentralisasi fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik dan respon terhadap perubahan iklim.

A.2. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN LKPK-TW

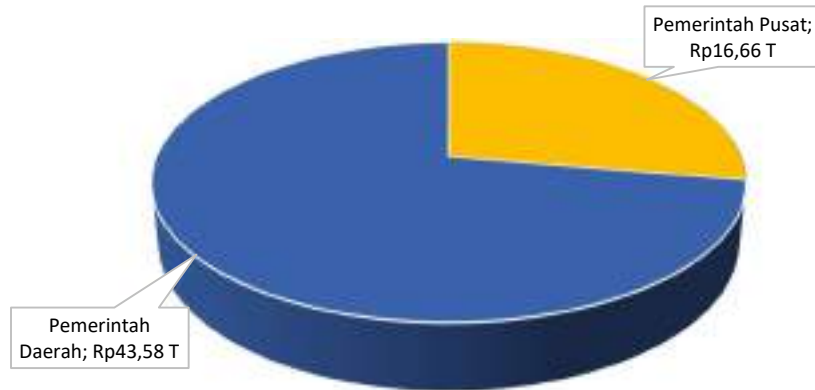
A.2.1. PENDAPATAN

Jumlah pendapatan pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp30.421.971.628.640,00** dan **Rp25.613.030.043.030,00**, jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah pendapatan pemerintah konsolidasian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp4.808.941.585.610,00** atau sebesar **18,78%**.

Jumlah tersebut terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp16.656.343.872.129,00** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp43.576.277.343.856,00** dikurangi eliminasi **Rp29.810.649.587.345,00**

Eliminasi dilakukan terhadap akun respirokak pada kertas kerja LKPP-TW dengan kertas kerja LKPDK-TW, yaitu akun yang terjadi akibat transaksi timbal balik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Transaksi respirokak pada pendapatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan transaksi transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Komposisi Pendapatan Konsolidasian berdasarkan kepemilikan



Grafik 4: Komposisi Pendapatan konsolidasian berdasarkan kepemilikan Tahun 2023

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp30.421.971.628.640,00** berasal dari Pendapatan Perpajakan sebesar **Rp20.737.924.501.124,00** atau sebesar **68,16%** dan pendapatan negara bukan pajak sebesar **Rp9.525.148.917.579,00** atau sebesar **31,31%** dari total pendapatan konsolidasian tahun 2023. Komposisi Pendapatan Konsolidasian tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Penerimaan Perpajakan	20.737.924.501.124	19.412.671.276.341
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.525.148.917.579	6.200.358.766.689
Jumlah Pendapatan	30.421.971.628.640	25.613.030.043.030

Tabel 3: Pendapatan Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan negara tahun 2023 menunjukkan kenaikan sebesar **18,78%**. Kenaikan terjadi pada sektor Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp4.808.941.585.610,00**. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan mulai bangkit, pemerintah mampu menaikkan penerimaan lain yang berasal dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

A.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Pajak merupakan pendapatan yang dominan dalam struktur Pendapatan Konsolidasian. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan dan langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan terkait dengan perubahan paket perundang-undangan dan tata kelola institusi perpajakan. Walaupun pemerintah juga mengupayakan peningkatan Pendapatan Bukan Pajak, pemerintah juga terus menjaga kesinambungan Pendapatan Perpajakan dalam struktur pendapatan negara.

Jumlah Penerimaan Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp20.737.924.501.124,00** dan **Rp19.412.671.276.341,00**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penerimaan perpajakan pemerintah konsolidasian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **6,83%**. Jumlah tersebut terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp13.351.270.838.901,00** atau sebesar **64,40%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp7.386.653.662.223,00** atau sebesar **35,60%**.

Penerimaan perpajakan pada tahun 2023 sebesar **Rp 20.737.924.501.124,00** merupakan realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar **Rp20.487.607.806.124,00** atau sebesar **98,79%** dan perpajakan perdagangan internasional sebesar **Rp250.316.695.000,00** atau sebesar **1,21%**. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2023 secara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Pajak Dalam Negeri	↑ 20.487.607.806.124	↓ 19.138.547.033.341
II. Pajak Perdagangan Internasional	↓ 250.316.695.000	↑ 274.124.243.000
Jumlah Pendapatan	↑ 20.737.924.501.124	↓ 19.412.671.276.341

Tabel 4: Perbandingan Penerimaan Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Realisasi penerimaan pajak baik pajak dalam negeri maupun perdagangan internasional mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pajak dalam negeri kenaikan sebesar **7,05%** dan pajak perdagangan internasional penurunan sebesar **-8,68%**. Kondisi penurunan pajak perdagangan internasional disebabkan pada kurun semester I 2023 terjadi penurunan harga minyak bumi yang mempengaruhi kinerja PPh migas yang mengalami kontraksi, sehingga berimplikasi pada penurunan.

A.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP dan Pendapatan Hibah) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp9.525.148.917.579,00** dan **Rp6.200.358.766.689,00**. Jikadibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penerimaan negara bukan pajak pemerintah konsolidasian mengalami peningkatan sebesar **53,63%**. Jumlah tersebut terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp3.305.073.033.228,00** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp36.030.725.471.696,00** dikurangi eliminasi sebesar **Rp29.810.649.587.345,00**. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan tahun 2023 sebesar **Rp9.525.148.917.579,00** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	↑ 383.352.273.796	↓ 372.901.991.208
II. Pendapatan PNBP Lainnya	↑ 2.239.056.322.669	↓ 1.896.104.094.552
III. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-
IV. Pendapatan Transfer	↑ 2.469.304.961.126	↓ 323.955.220.325
V. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	↑ 310.541.636.300	↓ (296.317.466.612)
VI. Pendapatan Hibah	↓ 158.898.209.937	↑ 349.406.541.700
VII. Pendapatan BLU	↑ 4.122.893.723.688	↓ 3.554.308.385.516
Jumlah Penerimaan Negara Bukan pajak	↑ 9.525.148.917.579	↓ 6.200.358.766.689

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **Rp383.352.273.796,00** merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah. Peningkatan ini disebabkan karena deviden perusahaan milik daerah (BUMD) yang dibagi menunjukkan kenaikan, yang menggambarkan bahwa

perusahaan milik daerah (BUMD) mampu menghasilkan laba yang lebih dibanding tahun 2022 dalam menjalankan usahanya.

- b. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada tahun 2023 sebesar **Rp2.239.056.322.669,00** yang dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp 1.174.894.616.684,00** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp1.266.036.136.942,00**. PNPB lainnya ini merupakan PNPB yang sebagian besar berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan, Pendapatan Jasa, Pendapatan Pendidikan.
- c. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 sebesar **Rp2.469.304.961.126,00** yang keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2023 sebesar **Rp310.541.636.300,00** yang keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah.
- e. Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 sebesar **Rp158.898.209.937,00** yang keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai **-Rp190.508.331.763,00** atau sebesar **-54,52%**. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 berkurangnya penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri (pemerintah pusat) terhadap 14 pemda menunjukkan dukungan penuh dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.
- f. Pendapatan BLU Konsolidasian Tahun 2023 sebesar **Rp4.122.893.723.688,00** mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai **Rp568.585.338.172,00** atau sebesar **15,99%**. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan pendapatan BLU yang berada di Pemda Kab Jeneponto dan Pemda Kab Enrekang.

Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar transfer menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat peningkatan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2023 yang mayoritas berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Melihat kondisi saat ini, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilakukan melalui upaya peningkatan Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pendapatan PNPB Lainnya, Pendapatan Transfer, Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah, Pendapatan BLU yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 secara berturut-turut sebesar **2,80%** (Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan), **53,6%** (Pendapatan PNPB Lainnya), **662,24%** (Pendapatan Transfer), **204,8%** (Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah), **15,99%** (Pendapatan BLU).

A.2.2. BELANJA PEMERINTAH

A.2.2.1. BELANJA

Realisasi Belanja Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- masing sebesar **Rp62.966.189.198.809,00** dan **Rp57.351.424.874.591,00** Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Pemerintah konsolidasian Tahun 2023 sebesar **Rp62.966.189.198.809,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp5.614.764.324.218,00** atau sebesar **9,80%**. Realisasi Belanja pemerintah konsolidasian tahun 2023 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp25.252.367.902.799,00** atau sebesar **37,70%** dan Belanja Pemerintah Daerah sebesar **Rp41.658.167.820.327,00** atau sebesar **62,30%**. Realisasi belanja pemerintah konsolidasian tahun 2023 berdasarkan jenis belanja secara dirinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
I.	Belanja Pegawai	↑ 25.201.332.890.703	↓ 24.569.046.001.148
II.	Belanja Barang	↑ 25.127.059.796.335	↓ 19.388.253.831.153
III.	Belanja Modal	↑ 13.744.856.660.987	↓ 11.825.365.251.603
IV.	Pembayaran Bunga Utang	↑ 69.882.906.168	↓ 33.881.515.394
V.	Subsidi	↑ 26.364.911.140	↓ 5.644.057.611
VI.	Hibah	↑ 1.616.754.514.076	↓ 1.260.692.295.098
VII.	Belanja Bantuan Sosial	↓ 123.164.159.679	↑ 149.117.313.682
VIII.	Belanja Tak Terduga	↓ 48.839.435.652	↑ 119.424.608.902
Jumlah Belanja Pemerintah Konsolidasian		↑ 72.594.531.556.185	↓ 57.351.424.874.591

Tabel 6: Belanja Pemerintah Konsolidasian 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

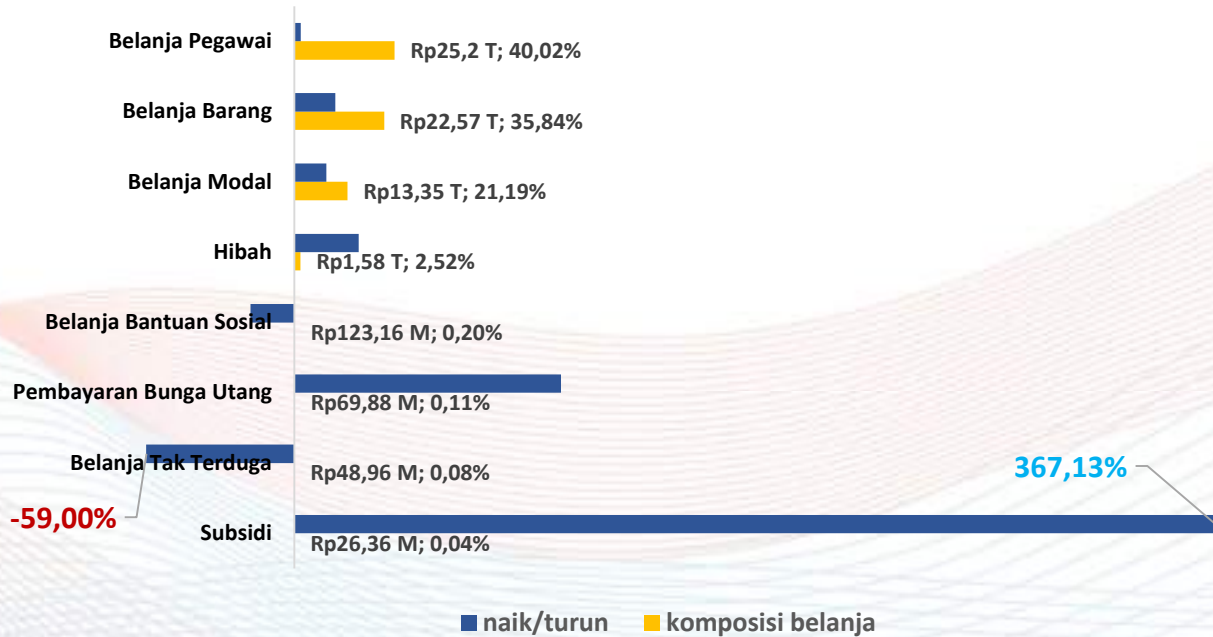
Peningkatan belanja pemerintah konsolidasian Tahun 2023 didominasi pada Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal.

Komposisi belanja pemerintah konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp72.594.531.556.185,00** secara rinci terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar **Rp25.201.332.890.703,00** berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp8.808.890.450.913,00** atau sebesar **34,9%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp 16.392.442.439.790,00** atau sebesar **65,1%**.
- Belanja Barang sebesar **Rp25.127.059.796.335,00** berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp10.150.834.657.414,00** atau sebesar **40,4%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp14.976.225.138.921,00** atau sebesar **59,4%**.
- Belanja Modal sebesar **Rp13.744.856.660.987,00** berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp6.212.596.515.704,00** atau sebesar **45,2%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp7.532.260.145.283,00** atau sebesar **54,8%**.
- Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar **Rp69.882.906.168,00** keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah.
- Belanja Subsidi sebesar **Rp26.364.911.140,00** keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah.
- Belanja Hibah sebesar **Rp1.616.754.514.076,00** keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah.
- Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp123.164.159.679,00** berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp80.293.364.000,00** atau sebesar **65,20%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp42.870.795.679,00** atau sebesar **34,80%**.
- Belanja Tak Terduga sebesar **Rp48.839.435.652,00** keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan komposisi Belanja, secara berurut belanja terbesar didominasi oleh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal. Berikut dapat dilihat secara jelas perbandingan atau komposisi jenis belanja dimaksud sebagaimana dituangkan dalam gambar di bawah ini :

Secara komposisi Belanja pegawai paling mendominasi dan terendah pada Belanja subsidi namun, secara yoy **kenaikan 3,5X lipat 367%** pada subsidi dan **penurunan separuh 59%** pada belanja tak terduga menunjukkan respon kebijakan fiskal terhadap kenaikan harga ko



Grafik 4: Komposisi Belanja pemerintah konsolidasian

A.2.2.2. BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer Antar Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp6.636.276.281.445,00** dan **Rp3.976.147.027.297,00**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi transfer tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **66,9%**. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp30.142.800.607.636,00** yang dieliminasi sebesar **Rp29.810.649.587.345,00** dan transfer Pemerintah Daerah sebesar **Rp6.304.125.261.154,00**.

A.2.3. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN

Nilai Surplus/Defisit anggaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **-Rp42.172.559.927.545,00** dan **-Rp35.714.541.858.858,00**. Surplus/Defisit anggaran tersebut merupakan selisih antara Realisasi Pendapatan pemerintah konsolidasian dengan Realisasi Belanja dan transfer pemerintah konsolidasian selama tahun 2023, Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai surplus/defisit tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **18,08%**. Surplus/defisit anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Jumlah Pendapatan konsolidasian	28.461.172.604.105	25.613.030.043.030
II. Jumlah Belanja dan Transfer konsolidasian	67.649.887.473.999	61.327.571.901.888
Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional	(42.172.559.927.545)	(35.714.541.858.858)

Tabel 8: Surplus/Defisit Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah Surplus/Defisit pemerintah konsolidasian berasal dari defisit Pemerintah Pusat sebesar **-Rp38.739.071.723.538,00** dan defisit Pemerintah Daerah sebesar **-Rp3.433.488.204.007,00** setelah dilakukan eliminasi sebesar **Rp29.810.649.587.345,00**.

Kenaikan defisit yang terjadi karena kenaikan belanja yang lebih besar dibanding dengan kenaikan pendapatan. Kondisi ini perlu tetap menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitasnya sehingga terwujud kemandirian dalam operasional Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan melalui efisiensi belanja operasional dan pengendalian belanja maupun penghematan.

A.2.4. PEMBIAYAAN

Nilai pembiayaan pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- masing sebesar **Rp2.346.069.110.510,00** dan **Rp3.717.205.003.064,00**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai pembiayaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **-36,88%**. Nilai pembiayaan tahun 2023 keseluruhan berasal dari pembiayaan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penerimaan Pembiayaan Daerah	 2.768.723.125.958	 3.948.871.573.095
Penggunaan SILPA	 2.768.809.942.090	 2.531.152.818.796
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	 8.000.000.000	 1.417.450.670.822
Penerimaan Kembali Piutang	 80.304.671	 268.083.477
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	4.641.000	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	 422.740.831.580	 231.666.570.031
Pembentukan Dana Cadangan	 15.000.000.000	 5.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	 27.576.000.000	 52.372.575.088
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	 90.215.923.460	 173.293.994.943
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	 -	 1.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian	 2.346.069.110.510	 3.717.205.003.064

Tabel 9: Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Adapun rincian pembiayaan pemerintah konsolidasian tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

- Penggunaan SILPA sebesar **Rp2.768.809.942.090,00** keseluruhan hanya berasal dari penggunaan SILPA Pemerintah Daerah.
- Pencairan Dana Cadangan sebesar **Rp15.000.000.000,00** keseluruhan hanya berasal dari penggunaan SILPA Pemerintah Daerah.
- Pinjaman dalam negeri sebesar **Rp8.000.000.000,00** keseluruhan hanya berasal dari pinjaman dalam negeri Pemerintah Daerah.
- Penerimaan kembali piutang sebesar **Rp80.304.671,00** keseluruhan hanya berasal dari penerimaan kembali piutang Pemerintah Daerah.
- Pembentukan dana cadangan sebesar **Rp15.000.000.000,00** keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah. Dana cadangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bertujuan

untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko atau kondisi tak terduga yang dapat mempengaruhi keuangan daerah.

- f. Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebesar **Rp27.576.000.000,00** keseluruhan hanya berasal dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah.
- g. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar **Rp90.215.923.460,00** keseluruhan hanya berasal dari pembayaran pokok pinjaman dalam negeri Pemerintah Daerah.
- h. Pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar Rp0,00 keseluruhan hanya berasal dari pemberian pinjaman Pemerintah Daerah.

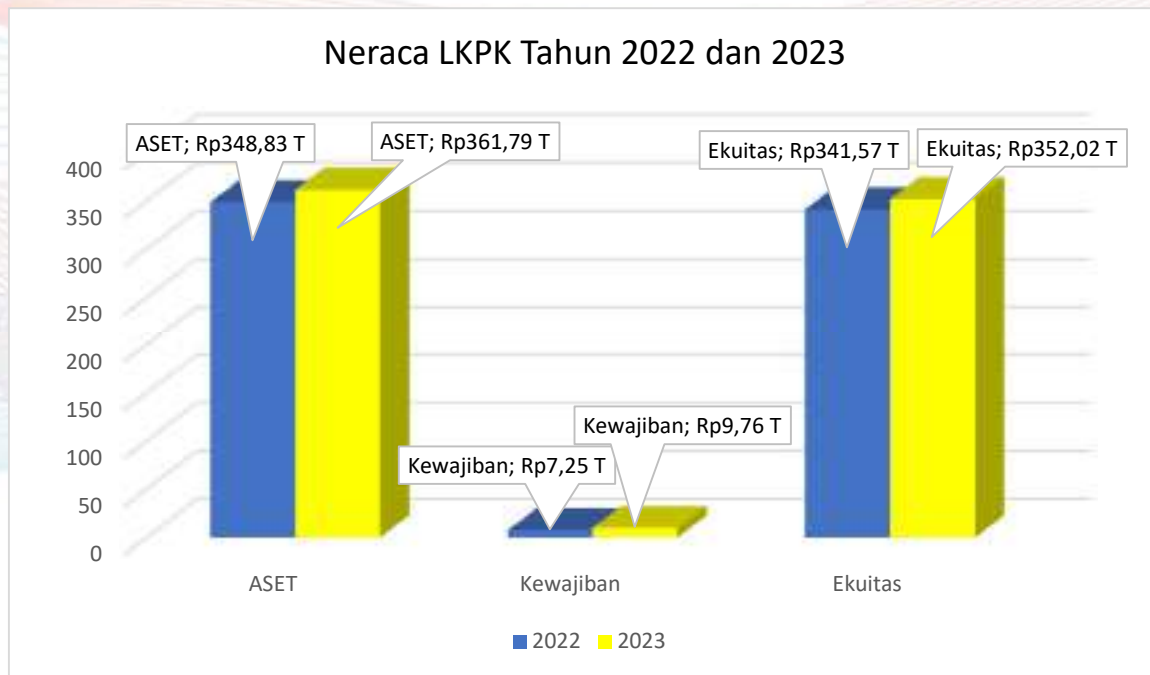
Nilai pembiayaan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 sudah tidak terdapat penerimaan kembali piutang dan adanya penurunan pada penerimaan pinjaman dalam negeri. Sementara sisi pengeluaran pembiayaan daerah pada pembentukan dana cadangan mengalami peningkatan, penyertaan modal/investasi pemda mengalami penurunan dan pembayaran pokok pinjaman pada pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan. Pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk keperluan pembentukan dana cadangan dan meningkatkan pada sektor penyertaan modal/investasi pemerintah daerah serta pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

B. CATATAN ATAS NERACA LKPK-TW

B.1. RINGKASAN LAPORAN NERACA LKPK-TW

Neraca keuangan pemerintah konsolidasian menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dari hasil konsolidasian neraca Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam neraca pemerintah konsolidasian memuat informasi aset atau barang yang akan dipergunakan dalam satu periode berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset tetap).

Posisi keuangan Pemerintah Wilayah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari masing-masing Aset **Rp361.790.593.818.708,00** dan **Rp348.834.128.089.239,00**, Kewajiban sebesar **Rp9.766.862.906.784,00** dan **Rp7.254.696.935.912,00** serta Ekuitas sebesar **Rp352.023.730.911.924,00** dan **Rp341.579.431.153.327,00** dengan ilustrasi grafik seperti berikut:



Grafik 6 : Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah Aset pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp12.956.465.729.469,00** atau **3,71%**, kewajiban mengalami kenaikan sebesar **Rp2.512.165.970.872,00** atau **34,63%** dan Ekuitas meningkat sebesar **Rp10.444.299.758.597,00** atau **3,06%** dibandingkan dengan tahun 2022.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tahun 2023 Pemerintah berhasil mengarahkan sumber dana pada peningkatan aset sebesar **3,71%**, dan peningkatan kewajiban yang cukup besar sebesar **34,63%** dibandingkan tahun 2022. Peningkatan aset tersebut mampu memberikan dorongan pada pertumbuhan ekuitas sebesar **Rp10.444.299.758.597,00** atau meningkat **3,06%** dibandingkan dengan tahun 2022 walaupun pada sisi kewajiban juga menunjukkan peningkatan. Dalam rangkameningkatkan aset, Pemerintah diharapkan mampu mendorong belanja pada sektor infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

B.2. PENJELASAN ATAS NERACA LKPK-TW

Neraca Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi baik untuk Neraca Pemerintah Pusat maupun untuk Neraca Pemerintah Daerah. Neraca Pemerintah Pusat meliputi Neraca UAKPA Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan satuan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Neraca Pemerintah Daerah meliputi Neraca Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

B.2.1. ASET

Jumlah Aset pada Neraca Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp361.790.593.818.708,00** dan **Rp348.834.128.089.239,00**. Jumlah Aset pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **3,71%** dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah Aset tersebut terdiri dari aset Pemerintah Pusat sebesar **Rp236.123.528.422.979,00** atau **65,26%** dan aset Pemerintah daerah sebesar **Rp125.667.065.395.729,00** atau **34,73%** dengan rincian tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	↑ 17.588.547.493.359	↓ 15.909.149.186.749
Investasi Jangka Panjang	↑ 4.595.779.005.744	↓ 4.169.106.779.668
Aset Tetap	↑ 334.259.655.227.934	↓ 324.998.553.367.077
Piutang Jangka Panjang	↓ 50.496.994.149	↑ 44.832.780.570
Properti Investasi	↑ 305.780.813.247	↑ 678.835.213
Dana Cadangan	↓ 855.483.846	↑ 5.855.242.681
Aset Lainnya	↑ 4.989.478.800.429	↓ 3.705.951.897.281
Jumlah Aset Konsolidasian	↑ 361.790.593.818.708	↓ 348.834.128.089.239

Tabel 11: Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Pertumbuhan aset konsolidasian sebesar 3,71% didominasi oleh Aset tetap sebesar 92,39% dengan nominal penambahan sebesar Rp9.261.101.860.857,00. Selanjutnya terdapat penambahan aset lancar dengan penambahan nilai sebesar Rp1.679.398.306.610,00 atau meningkat 4,86% dari periode sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemerintah dalam rangka peningkatan aset lebih diarahkan pada penambahan aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang dapat dipergunakan dalam operasional pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu senantiasa ditingkatkan melalui efisiensi belanja operasional dan mendorong belanja dalam rangka pembentukan aset/modal terutama untuk infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jumlah properti investasi Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp305.780.813.247,00 dan Rp678.835.213,00. Jumlah properti investasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang **sangat signifikan** sebesar 44,945% dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah Aset tersebut terdiri dari properti investasi Pemerintah Pusat sebesar Rp305.780.813.247,00 atau 100,00%, dengan kata lain Pemerintah Daerah belum melakukan pencatatan terkait properti investasi.

Seharusnya dengan berlakunya PSAP Nomor 17 dan UU HKPD dapat memacu penguatan local taxing power atau PAD dari Pemerintah Daerah salah satunya melalui pendapatan sewa yang dapat diperoleh dari properti investasi.

B.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Neraca Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp17.588.547.493.359,00** dan **Rp15.909.149.186.749,00** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp1.679.398.306.610,00** atau **10,5%** dibandingkan dengan Aset Lancar yang terjadi di tahun 2022. Jumlah Aset Lancar Neraca Pemerintah Konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp17.588.547.493.359,00** tercatat milik Pemerintah Pusat sebesar **Rp236.123.528.422.979,00** atau **65,26%** dan aset Pemerintah daerah sebesar **Rp125.667.065.395.729,00** atau **34,73%**.

Persentase peningkatan tertinggi yang mencapai **17,66%** terjadi pada pos Persediaan atau dengannominal sebesar **Rp1.551.662.847.645,00** yang merupakan mayoritas tercatat dari Persediaan dari

Pemerintah Pusat. Aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
kas dan setara kas	↓ 4.071.142.325.694	↑ 4.746.569.101.781
Investasi Jangka Pendek	↓ 70.000.000.000	↑ 164.000.000.000
Investasi Jangka Pendek Lainnya	0	0
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	↓ 105.733.310.646	↑ 45.931.869.004
Uang Muka Belanja (prepayment)	↓ 0	↓ 102.597.158.076
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	↓ 0	↑ 15.881.617.019
Piutang	↑ 3.001.298.292.760	↓ 2.045.458.724.255
Persediaan	↑ 10.340.373.564.259	↓ 8.788.710.716.614
Jumlah Aset Lancar	↑ 17.588.547.493.359	↓ 15.909.149.186.749

Tabel 12: Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

B.2.1.1.1. Kas dan Bank

Jumlah Kas dan Bank pada Neraca Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tercatat sebesar **Rp4.071.142.325.694,00** dan **Rp4.746.569.101.781,00** atau mengalami penurunan sebesar **-15,99%** dibandingkan dengan Kas dan Bank yang terjadi di tahun 2022. Jumlah Kas dan Bank per 31 Desember 2023 tercatat pada Pemerintah Pusat sebesar **Rp2.320.780.809.559,00** atau **58,20%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp1.750.361.516.135,00** atau **41,80%**.

Penurunan jumlah kas dan bank yang terjadi pada tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan pada pos Rekening Kas Negara dan Kas Daerah dengan porsi terbesar yaitu mencapai -42,6%. Secara keseluruhan posisi kas dan bank yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

Kas dan Bank	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rekening Kas Negara dan Kas Daerah	↓ 1.385.340.413.216	↑ 2.414.717.513.147
Kas di Bendahara Pengeluaran	↑ 8.277.784.270	↓ 2.986.785.280
Kas di Bendahara Penerimaan	↓ 3.150.859.761	↑ 5.233.101.546

Kas Lainnya dan Setara Kas	↑ 639.359.251.374	↓ 143.687.765.353
Kas pada Badan Layanan Umum	↓ 2.035.014.017.073	↑ 2.181.943.936.455
Jumlah Kas dan Bank	↓ 4.071.142.325.694	↑ 4.748.569.101.781

Tabel 13: Kas dan Bank per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Berdasarkan tabel di atas, seluruh rekening kas menunjukkan jumlah yang semakin menurun.

- Rekening kas negara dan kas daerah sebesar **Rp1.385.340.413.216,00** tercatat seluruhnya pada rekening kas daerah. Saldo tertinggi tercatat pada Pemda Kota Makassar sebesar **Rp271.337.279.649,00**. Hal ini menunjukkan Pemda Kota Makassar mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam membiayai kegiatan pemerintah dimasa yang akan datang.
- Kas di Bendahara Pengeluaran mayoritas tercatat pada Pemerintah Daerah dan didominasi oleh Pemda Kab Tanatoraja sebesar **Rp4.258.054.962,00**. Hal ini menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran tidak melaksanakan kewajiban secara maksimal karena tidak segera menyetorkan dana kas di bendahara pengeluaran yang tidak digunakan ke rekening kas daerah secara tepat waktu.
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar **Rp 3.150.859.761,00** berada pada porsi terbesar pada Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar **Rp3.072.115.533,00**.

Hal ini menggambarkan bahwa bendahara penerimaan belum melaksanakan kewajiban secara maksimal karena tidak segera menyetorkan penerimaan negara yang terjadi pada tahun 2023 secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kas Lainnya dan setara kas sebesar **Rp639.359.251.374,00** berasal dari pemerintah pusat sebesar **Rp573.582.574.807,00** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp65.776.676.567,00**. Kas tersebut didominasi oleh transaksi Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dan transaksi Kas Lainnya di BLU.
- Kas pada BLU pada Pemerintah Pusat sebesar **Rp 2.035.014.017.073,00** seluruhnya berasal dari Satker K/L yang berlokasi di Kota Makassar dan Kota Palopo, sementara pada Pemerintah Daerah sebesar **Rp287.927.963.845,00** didominasi oleh BLUD Pemda Kab Sidenreng Rappang sebesar **Rp27.135.336.220,00**.

B.2.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp60.000.000.000,00** dan **Rp164.000.000.000,00** atau mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar **Rp104.000.000.000,00** atau **-63,41%** dibandingkan dengan Investasi Jangka Pendek yang terjadi di tahun 2022. Investasi Jangka Pendek terdapat pada Pemerintah Pusat yaitu investasi yang dilakukan oleh Satker BLU Kementerian/Lembaga yang berada di Kota Makassar dalam bentuk deposito jangka pendek.

B.2.1.1.3. Investasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau mengalami nihil.

B.2.1.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-

masing sebesar **Rp26.556.566.067,00** dan **Rp45.931.869.004,00** atau mengalami penurunan sebesar **-Rp19.375.302.937,00** atau **-42,18%** dibandingkan dengan Belanja di Bayar di Muka yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp11.740.609.466,00** atau **44,2%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp14.815.956.601,00** atau **55,8%**.



Grafik 7: Komposisi Belanja dibayar dimuka berdasarkan Kepemilikan Tahun 2023

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang dibayarkan pada tahun berkenaan yang manfaatnya diterima melampaui tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi antara lain adanya transaksi sewa menyewa, beban asuransi dan pembayaran atas kelebihan belanja. Dengan adanya penurunan nilai belanja dibayar dimuka pada tahun 2023 menggambarkan bahwa nilai belanja dibayar dimuka semakin kecil dibandingkan dengan tahun 2022.

B.2.1.1.5. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang merupakan pembayaran di muka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan/pihak ketiga menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp66.661.368.814,00** dan **Rp164.410.644.099,00** atau mengalami penurunan sebesar **-59,45%** dibandingkan dengan Uang Muka Belanja yang terjadi di tahun 2023.

B.2.1.1.6. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp12.515.375.765,00** dan **Rp15.881.617.019,00** atau mengalami penurunan sebesar **-Rp5.694.116.243,00** atau **-35,85%** dibandingkan dengan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang terjadi di tahun 2022. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat yang merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum dapat ditagih.

B.2.1.1.7. Piutang

Jumlah Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp3.001.298.292.760,00** dan **Rp2.045.458.724.255,00** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp955.839.568.505,00** atau **46,7%** dibandingkan dengan Piutang yang terjadi di tahun 2022.

Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.313.152.260.923,00** atau **43,75%** dengan rincian sebagai berikut:

Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Pajak	↑ 1.531.751.012.652	↓ 1.381.359.003.671
Piutang Bukan Pajak	↑ 3.203.693.833.107	↓ 1.569.752.658.159
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	↓ (1.984.060.902.382)	↑ (1.314.236.792.160)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	↑ 61.698.066.976	↓ 47.300.414.755
Bagian Lancar Tagihan TGR dan TP	↑ 35.680.412	↓ 29.934.828
Piutang dari Kegiatan BLU	↑ 171.712.306.614	↓ 104.743.597.349
Piutang Lain-lain	↓ 188.180.601.995	↑ 256.509.907.653
Jumlah Piutang	↑ 3.001.298.292.760	↓ 2.045.458.724.255

Tabel 14: Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang menurun dengan adanya kenaikan pada beberapa pos Piutang. Sementara untuk piutang bukan pajak yang menunjukkan nilai semakin naik dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan perlambatan penyelesaian kewajiban pembayaran bukan pajak mengalami penurunan kinerja atau penurunan sehingga penerimaan tersebut mengalami perlambatan untuk dipergunakan untuk pendanaan kegiatan pemerintah.

B.2.1.1.8. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp10.340.373.564.259,00** dan **Rp8.788.710.716.614,00** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp1.551.662.847.645,00** atau **17,66%** dibandingkan dengan Persediaan yang terjadi di tahun 2022.

Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp9.596.765.261.658,00** atau **92,81%** yang merupakan Belanja Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp743.608.302.601,00** atau **7,19%** yang merupakan Bahan Habis Pakai.



Grafik 8: Komposisi Persediaan berdasarkan Kepemilikan Tahun 2023

Jumlah persediaan pada Pemerintah Daerah hanya mencatat sebesar **7,19%** dibandingkan

dengan Pemerintah Pusat sebesar **92,81%**. Salah satu penyebab rendahnya jumlah persediaan pada Pemerintah Daerah karena barang persediaan masih dilakukan pencatatan secara manual dan sebagian besar dinyatakan habis pakai pada akhir tahun sehingga catatan jumlah persediaan menjadi kecil pada akhir tahun.

Sementara jumlah persediaan pada Pemerintah Pusat menunjukkan kondisi meningkat yang menggambarkan bahwa telah terjadi pengadaan barang persediaan yang tidak dibutuhkan untuk operasional satker-satker Pemerintah Pusat pada tahun 2023. Hal ini perlu diupayakan agar pengadaan barang persediaan direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

B.2.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.595.779.005.744,00 dan Rp4.169.106.779.668,00 atau mengalami kenaikan sebesar 10,23% dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang yang terjadi di tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada Investasi Permanen yang berasal dari Investasi oleh Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Non Permanen	↑ 8.647.300.021	↓ 8.676.857.021
Investasi Permanen	↑ 4.587.131.705.723	↓ 4.160.429.922.647
Jumlah Investasi Jangka Panjang	↑ 4.595.779.005.744	↓ 4.169.106.779.668

Tabel 15: Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

B.2.2.1. INVESTASI NON PERMANEN

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp8.647.300.021,00** dan **Rp8.676.857.021,00** atau mengalami penurunan sebesar **-0,34%** dibandingkan dengan Investasi Non Permanen yang terjadi di tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada pos Dana Bergulir. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari Investasi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Investasi Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	↓ 0	↑ 5.003.645.000
Dana Bergulir	↑ 23.069.547.654	↓ 2.169.411.249
Investasi Non Permanen Lainnya	↓ (14.422.247.633)	↑ 503.800.772
Jumlah Investasi Non Permanen	↑ 8.647.300.021	↓ 7.676.857.021

Tabel 16: Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Terjadinya kenaikan dana bergulir dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang efektif mengelola dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat. Hal ini tetap perlu upaya berkelanjutan dari Pemda untuk

dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana bergulir sehingga tujuan dapat tercapai.

Pada investasi non permanen lainnya merupakan investasi berupa pemberian pinjaman sarana produksi bagi beberapa sektor yang dilakukan secara bergulir. Penurunan yang terjadi karena adanya kebijakan pemerintah daerah melakukan pengurangan atas investasi non permanen lainnya.

B.2.2.2. INVESTASI PERMANEN

Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.587.131.705.723,00** dan **Rp4.160.429.922.647,00** atau mengalami peningkatan sebesar **10,26%** dibandingkan dengan Investasi Permanen yang terjadi di tahun 2022. Peningkatan didominasi oleh peningkatan pada pos Investasi Permanen PMN/D. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari Investasi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Permanen PMN/D	↑ 4.567.958.319.180	↓ 4.119.988.112.450
Investasi Permanen Lainnya	↓ 19.173.386.543	↑ 40.441.810.197
Jumlah Investasi Permanen	↑ 4.587.131.705.723	↓ 4.160.429.922.647

Tabel 17: Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Peningkatan Investasi Permanen disebabkan pada seluruh Pemda memperluas investasi permanen berupa penyertaan modal selain pada Bank Sulselbar, Perusda dan PDAM. Hal ini dilakukan dalam upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan perusahaan atau badan usaha (Bank Sulselbar, Perusda dan PDAM) selain bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya serta mendorong peningkatan tujuan ekonomi melalui badan usaha yang ada di Daerah.

B.2.3. ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp334.259.655.227.934,00** dan **Rp324.998.553.367.077,00** atau mengalami peningkatan sebesar **2,85%** dibandingkan dengan Aset Tetap yang terjadi di tahun 2022. Hal ini didorong oleh adanya penambahan aset pada pos Konsesi Jasa yang signifikan atau mencapai **57,94%**. Sementara penambahan nilai tertinggi terjadi pada pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang mencapai **Rp5.099.572.229.246,00** atau **4,69%**.

Jumlah aset tetap berada pada Pemerintah Pusat sebesar **Rp219.895.076.714.119,00** atau **66,20%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp112.259.720.591.602,00** atau **33,80%** dengan rincian sebagai berikut:

ASET TETAP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	↑ 209.915.051.888.123	↓ 206.746.721.493.961
Peralatan dan Mesin	↑ 57.718.836.357.385	↓ 53.700.617.374.392
Gedung dan Bangunan	↑ 52.432.117.206.782	↓ 48.798.877.521.797
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	↑ 115.909.147.656.521	↓ 108.661.578.508.979
Aset Tetap Lainnya	↑ 3.569.090.647.887	↓ 3.038.996.512.848

Konstruksi dalam pengerjaan	↑ 11.079.268.975.142	↓ 8.896.746.486.463
Konsesi Jasa	↑ 4.045.648.366.822	↓ 2.560.771.881.005
Aset Tetap Yang Belum Diregister	↑ -	↑ -
Akumulasi Penyusutan	↓ (120.409.505.870.728)	↑ (107.405.756.412.368)
Jumlah Aset Tetap	↑ 334.259.655.227.934	↓ 324.998.553.367.077

Tabel 18: Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

- Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp209,915,051,888,123,00** dan **Rp206.746.721.493.961,00** atau mengalami peningkatan sebesar **1,53%** dibandingkan dengan jumlah Tanah yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp 154.575.263.567.781,00** atau **73,63%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp 55.339.788.320.342,00** atau **26,37%**.
- Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp57,718,836,357,385,00** dan **Rp53.700.617.374.392,00** atau mengalami peningkatan sebesar **7,48%** dibandingkan dengan jumlah Peralatan dan Mesin yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp36.973.598.331.798,00 atau 65,09% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp19.833.432.295.966,00 atau 34,91%.
- Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp52.432.117.206.782,00 dan Rp48.798.877.521.797,00 atau mengalami peningkatan sebesar 7,45% dibandingkan dengan jumlah Gedung dan Bangunan yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp18.544.889.835.297,00 atau 35,89% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp33.127.016.806.661,00 atau 64,11%.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp115.909.147.656.521,00 dan Rp108.661.578.508.979,00 atau mengalami peningkatan sebesar 6,67% dibandingkan dengan jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp48.975.318.183.876,00 atau 43,05% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp64.785.832.554.349,00 atau 56,95%.
- Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.569.090.647.887,00 dan Rp3.038.996.512.848,00 atau mengalami peningkatan sebesar 17,44% dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap Lainnya yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.505.227.160.033,00 atau 42,17% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.063.863.487.854,00 atau 57,83%.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.079.268.975.142,00 dan Rp8.896.746.486.463,00 atau mengalami peningkatan sebesar 24,53% dibandingkan dengan jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8.853.166.673.354,00 atau 80,29% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.226.102.301.788,00 atau 19,71%.
- Konsesi jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.045.648.366.822,00** dan **Rp2.560.771.881.005,00** atau mengalami peningkatan sebesar **57,99%** dibandingkan dengan jumlah konsesi jasa yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut sepenuhnya berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp4.045.648.366.822,00** atau **100,00%**. Hal ini menandakan terjadi peningkatan kerjasama konsesi pemerintah-swasta terutama konsesi pertambangan dan pengelolaan hutan.

- h. Tidak terdapat nilai Aset Tetap belum diregister per 31 Desember 2023 menandakan bahwa aset tetap telah sepenuhnya disusutkan sehingga pengungkapan posisi keuangan dapat dianggap akurat dan wajar.
- i. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar -Rp120.409.505.870.728,00 dan -Rp107.405.756.412.368,00 atau mengalami penurunan sebesar 12,11% dibandingkan dengan jumlah Akumulasi Penyusutan yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **-Rp53.692.335.560.840,00** atau **45,33%** dan Pemerintah Daerah sebesar **-Rp66.717.170.309.888,00** atau **54,67%**.

Secara umum penambahan nilai aset tetap terjadi pada seluruh pos aset tetap. Pertumbuhan aset tetap tahun 2023 terbesar disumbangkan pos Konsesi Jasa yaitu dengan tingkat yang signifikan atau mencapai **57,99%**.

B.2.4. PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp50.496.994.149,00 dan Rp44.832.780.570,00 atau mengalami kenaikan sebesar **12,63%** dibandingkan dengan Piutang Jangka Panjang yang terjadi di tahun 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada pos Tagihan TP/TGR. Tagihan TP/TGR tersebut didominasi seluruhnya dari Pemerintah Daerah kepada Pemda Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut:

ASET TETAP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tagihan TP/TGR	↓ 50.512.420.059	↑ 46.459.758.359
Tagihan piutang penjualan angsuran	↑ 1.609.350.400	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR	↑ (1.624.776.310)	↓ (1.626.977.789)
Jumlah Aset Tetap	↓ 50.496.994.149	↑ 44.832.780.570

Tabel 19: Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah nilai tagihan TP/TGR pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja terdapat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dibutuhkan konsistensi peningkatan kapasitas sumber daya dan peningkatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan APBD.

B.2.5. DANA CADANGAN

Dana cadangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp855.483.846,00** dan **Rp5.855.242.681,00** atau mengalami penurunan sebesar **-85,39%** dibandingkan dengan jumlah Dana cadangan yang terjadi di tahun 2022 yang terjadi hanya pada Pemerintah daerah.

B.2.6. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.989.478.800.429,00** dan **Rp3.705.951.897.281,00** atau mengalami peningkatan sebesar **34,63%** dibandingkan dengan jumlah Aset Lainnya yang terjadi di tahun 2022. Secara umum, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada pos Aset Lain-lain yang mencapai **34,63%**.

Jumlah aset lainnya berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.326.513.684.609,00 atau

45,83% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.662.965.115.820,00 atau 54,17% dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kemitraan Pihak Ketiga	↓ 367.273.106.818	↑ 668.026.845.911
Aset Tak Berwujud	↑ 1.232.356.360.612	↓ 841.452.061.800
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	↑ 727.262.336.871	↓ 1.473.046.935
Aset Lain-lain	↑ 4.449.648.831.481	↓ 3.517.584.799.100
Akumulasi Amortisasi - Aset Lainnya (TAB)	↓ (1.787.061.835.353)	↑ (1.322.584.856.465)
Jumlah Aset Lainnya	↑ 4.989.478.800.429	↓ 3.705.951.897.281

Tabel 20: Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

- Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp367.273.106.818,00** dan **Rp668.026.845.911,00** atau mengalami penurunan sebesar - **45,02%** dibandingkan dengan jumlah Kemitraan Pihak Ketiga yang terjadi di tahun 2022. Dana kemitraan pihak ketiga ini seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah.
- Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp367.273.106.818,00** dan **Rp841.452.061.800,00** atau mengalami peningkatan sebesar **44,57%** dibandingkan dengan jumlah Aset Tak Berwujud yang terjadi di tahun 2022. Aset tak berwujud ini merupakan aset dalam bentuk software atau aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Peningkatan nilai aset tak berwujud terjadi karena adanya kebutuhan software atau aplikasi dengan yang lebih modern. Adapun Jumlah aset tak berwujud tercatat pada Pemerintah Pusat sebesar **Rp915.896.294.022,00** dan Pemerintah Daerah sebesar **-Rp459.586.939.628,00**.
- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp727.262.336.871,00** dan **Rp1.473.046.935,00** atau mengalami peningkatan sebesar **49,271%** dibandingkan dengan jumlah Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang terjadi di tahun 2022. Yang termasuk dalam dana yang dibatasi penggunaannya adalah dana yang tercatat sebagai return atas SP2D. Peningkatan jumlah ini menggambarkan bahwa telah terjadi penurunankinerja penyelesaian retur atas SP2D dan juga adanya peningkatan jumlah retur. Jumlah Dana Yang Dibatasi Penggunaannya hanya terjadi pada Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.449.648.831.481,00** dan **Rp3.517.584.799.100,00** atau mengalami peningkatan sebesar **26,50%** dibandingkan dengan jumlah Aset Lain-lain yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.870.487.121.754,00** atau **39,95%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp2.579.161.709.727,00** atau **60,05%**. Peningkatan Aset Lain-lain menunjukkan bertambahnya jumlah aset tetap yang dalam kondisi rusak berat.
- Akumulasi Amortisasi-Aset Lainnya (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **-Rp1.787.061.835.353,00** dan **-Rp1.322.584.856.465,00** atau mengalami penurunan sebesar **-35,12%** dibandingkan dengan jumlah Akumulasi Amortisasi-Aset Lainnya (ATB) yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **-Rp1.189.837.057.798,00** dan Pemerintah Daerah sebesar **-Rp597.224.777.555,00**.

B.2.7. KEWAJIBAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.766.862.906.784,00 dan Rp7.254.696.935.912,00 atau mengalami peningkatan sebesar 34,63% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.303.578.579.711,00 atau 44,06% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp5.463.284.327.073,00 atau 55,94%. Kewajiban dimaksud meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang mengalami peningkatan. Berikut perkembangan kewajiban tahun 2023 dan 2022 sebagaimana tabel berikut:

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	↑ 4.694.270.906.764	↓ 2.639.287.959.955
Kewajiban Jangka Panjang	↑ 5.072.592.000.020	↓ 4.615.408.975.957
Jumlah Kewajiban	↑ 9.766.862.906.784	↓ 7.254.696.935.912

Tabel 21: Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

B.2.7.1. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.694.270.906.764,00** dan **Rp2.639.287.959.955,00** atau mengalami peningkatan sebesar **77,86%** dibandingkan dengan jumlah Kewajiban yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp930.298.933.075,00** atau **19,8%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp3.763.971.973.689,00** atau **80, %**. Adapun kewajiban jangka pendek secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	↓ 1,821,811,920	↑ 1.773.192.993
Utang Kepada Pihak Ketiga	↑ 3,796,395,641,918	↓ 1.880.204.789.854
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	↑ 87,785,219,590	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	↑ 449,694,617,941	↓ 379.372.011.357
Utang Biaya Pinjaman/Bunga	↑ 12,269,580,127	↓ 5.919.399.042
Hibah yang belum disahkan	↑ 3.780.573.093	↓ -
Uang Muka dari KPPN	↑ 102.762.470	↓ 15.487.500
Pendapatan Diterima Dimuka	↑ 31,654,267,689	-
Utang Belanja	↓ -	↑ 2.000.000.000
Utang Transfer	↑ 3.780.573.093	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	↑ 449.799.863.442	↓ 370.003.079.209

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	 4.694.270.906.764	 2.639.287.959.955
---------------------------------------	--	--

Tabel 22: Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Peningkatan jumlah kewajiban jangka pendek terjadi karena adanya kenaikan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Jangka Pendek Lainnya, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya, Utang Biaya Pinjaman/Bunga, Hibah yang belum disahkan.

Sementara pos yang mengalami kenaikan jumlah kewajiban jangka pendek didominasi oleh Uang Muka dari KPPN. Kondisi ini terjadi karena adanya penyetoran sisa kas Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran yang belum dapat dipenuhi secara tepat waktu.

B.2.7.2. Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp5.072.592.000.020,00** dan **Rp4.615.408.975.957,00** atau mengalami peningkatan sebesar **9,91%** dibandingkan dengan jumlah Kewajiban yang terjadi di tahun 2022. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang terdapat pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp3.373.279.646.636,00** atau **66,51%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp1.699.312.353.384,00** atau **33,49%**. Adapun Kewajiban Jangka Panjang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	 1.699.312.353.384	 2.153.058.721.300
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	 3.373.279.646.636	 2.462.350.254.657
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	 5.072.592.000.020	 4.615.408.975.957

Tabel 23: Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **9,91%**. Hal ini menggambarkan bahwa selama tahun 2023 Pemerintah Daerah mempunyai mempunyai sumber daya yang cukup untuk membayar kewajiban jangka panjang dalam negeri sebagai upaya untuk mengurangi utang jangka Panjang.

Kewajiban konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi (entitas pemerintah) dan mitra (pihak swasta) untuk menyediakan layanan publik. Dalam perjanjian tersebut, mitra membangun infrastruktur publik, mengoperasikan dan memeliharanya untuk jangka waktu tertentu serta menyerahkan kembali infrastruktur tersebut kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Beberapa contoh konsesi jasa di Sulawesi Selatan antara lain yaitu proyek jalan tol Makassar- Parepare, proyek bendungan Karama di Kabupaten Jeneponto, proyek pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum di Makassar.

Dari tabel di atas diketahui bahwa Konsesi Jasa Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 36,99%. Hal ini menggambarkan bahwa selama tahun 2023 Pemerintah Pusat mempunyai mempunyai sumber daya yang cukup untuk membayar konsesi jasa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui proyek-proyek yang memiliki multiplier effect (efek berkelanjutan).

B.2.8. EKUITAS

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp352.023.730.911.9245,00** dan **Rp341.579.431.153.327,00** atau mengalami peningkatan sebesar **3,06%** dibandingkan dengan jumlah Ekuitas yang terjadi di tahun 2022. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp231.819.949.843.268,00 atau 65,9% dan Pemerintah Daerah sebesar Rp120.203.781.068.656,00 atau 34,1%.

Ekuitas yang tumbuh tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berhasil mengarahkan sumber dana pada pembentukan atau penambahan aset. Untuk menambah pertumbuhan ekuitas maka Pemerintah harus dapat mengarahkan belanja pemerintah pada sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

C. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL LKPK-TW

C.1. RINGKASAN LAPORAN OPERASIONAL LKPK-TW

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen pada Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional digunakan untuk mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan seluruh entitas pemerintahan. Informasi yang tersedia dalam LO adalah:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan layanan.
2. Mengenai operasional keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
3. Untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima guna mendanai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara penyajian laporan secara komparatif.
4. Konsep dasar LO adalah penurunan ekuitas (jika defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (jika surplus operasional) namun demikian defisit atau surplus tidak akan selalu mempengaruhi ekuitas di neraca karena belanja dan pendapatan akan langsung dibayar dan disetor ke KUN, karena di LPE terdapat pos Transaksi Antar Entitas (DDEL/DKEL) sebagai penyeimbang Surplus/Defisit LO.

Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami defisit sebesar **Rp6.308.525.148.061,00** dan **Rp8.690.035.418.574,00**. Pada tahun 2023, terjadi penurunan defisit sebesar **Rp2.381.510.270.513,00** atau **27,41%** dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 membaik jika dibandingkan tahun 2022, walaupun pendapatan operasional belum mampu menutup beban operasional karena menghasilkan defisit. Untuk lebih mengurangi terjadinya defisit maka pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan pada satu sisi serta mengurangi belanja operasional pada sisi yang lain.

Sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi pendapatan baik pajak maupun non pajak. Salah satu intensifikasi perpajakan yang dapat dilakukan oleh daerah adalah pembangunan sistem pungutan pajak daerah yang terintegrasi sehingga dapat dilakukan monitoring secara realtime oleh Pemda atas pungutan pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pungut, antara lain pajak hiburan/restoran. Untuk intensifikasi non pajak dapat dilakukan upaya peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pada sisi beban operasional dapat dilakukan pengurangan melalui upaya efisiensi terhadap belanja barang dalam rangka operasional.

Komponen Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Operasional		
Pendapatan Perpajakan	↑ 21,427,527,582,262	↓ 20.126.395.999.928
Pendapatan Negara Bukan Pajak	↑ 2,474,212,001,319	↓ 4.250.172.122.759

Pendapatan Transfer	↓	3,148,674,480,150	↑	3.863.995.866.922
Lain Lain Pendapatan yang sah	↑	30,032,475,417,845	↓	32.873.164.173.316
Jumlah Pendapatan Operasional	↑	63,929,113,660,472	↓	61.113.728.162.925
Beban Operasional	↑	70,265,324,006,577	↓	69.708.049.222.719
Surplus/(Defisit)dari Keg. Operasional	↑	(6.308.525.148.061)	↓	(8.594.321.059.794)
Kegiatan Non Operasional				
Pendapatan Pelepasan aset non Lancar	↑	9,577,212,370	↓	14.848.580.165
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	↓	38,143,894,430	↑	173.655.926.326
Jml Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	↑	(28,566,682,060)	↓	(158.807.346.161)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang	↑	-	↑	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban JK Panjang	↑	(1,198,250,002)	↓	(34.574.835.929)
Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	↑	167,723,482,902	↓	273.053.299.486
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	↑	14,723,129,501	↓	142.391.491.989
Jml Surplus/(Defisit) Keg Non Operasional Lainnya	↓	182,446,612,403	↑	130.661.807.497
Surplus/(Defisit)dari Keg. Non Operasional	↓	(32,515,125,245)	↑	(62.720.374.593)
Pos Luar Biasa				
Pendapatan Luar biasa		18,142,344,284		7.885.280.041
Beban Luar Biasa	↓	-22,972,271,485	↑	40.879.264.228
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	↑	16.319.617.234	↓	(32.993.984.187)
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	↑	(6,308,525,148,061)	↓	(8.690.035.418.574)

Tabel 24. Komponen Laporan Operasional Konsolidasian Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

C.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL LKPK-TW

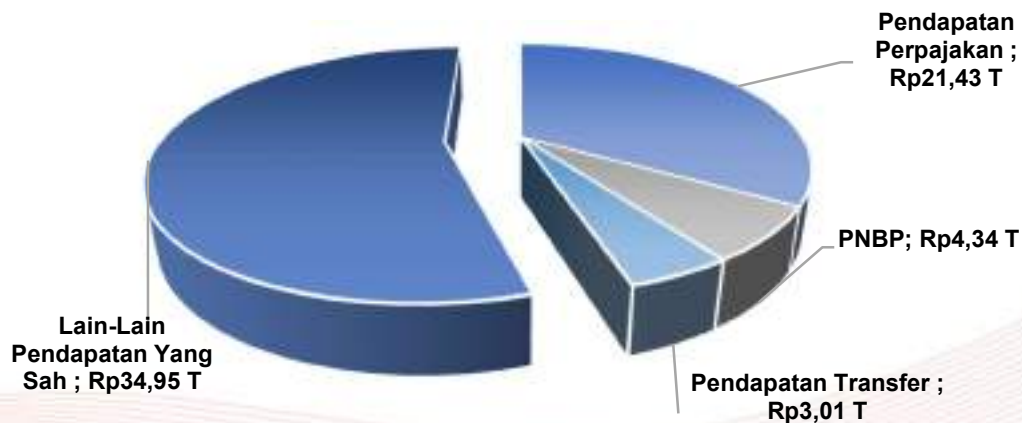
C.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp63,929,113,660,472,00** dan **Rp61.113.728.162.925,00**. Jumlah Pendapatan Operasional pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **Rp2.815.385.497.547,00** atau sebesar **4,61%** dibandingkan dengan tahun 2022.

Jumlah tersebut terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp47.278.254.630.277,00** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp44.628.946.274.484,00** dikurangi eliminasi sebesar **-Rp27.978.087.244.289,00** menjadi sebesar **Rp63,929,113,660,472,00**. Eliminasi dilakukan terhadap akun Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah yang menerima dropping dana transfer dari Pemerintah Pusat. Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp63,929,113,660,472,00** berasal dari:

1. Pendapatan Perpajakan sebesar **Rp21,427,527,582,262,00**
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp4.377.373.567.936,00**
3. Pendapatan Transfer sebesar **Rp3,148,674,480,150,00**
4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar **Rp30,032,475,417,845,00**

Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian



Grafik 9: Komposisi Pendapatan Operasional konsolidasian Tahun 2023

C.2.2. PENDAPATAN PERPAJAKAN

Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tingkat Wilayah mencapai **Rp21,427,527,582,262,00** dan **Rp20.126.395.999.928,00**. Jumlah Pendapatan Perpajakan konsolidasian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **Rp1.301.131.582.334,00** atau sebesar **6,46%** dibandingkan dengan tahun 2022.

Peningkatan perpajakan tahun 2023 oleh pemerintah pusat terjadi hampir pada semua jenis pajak. Peningkatan penerimaan pajak pemerintah pusat terbesar disumbangkan oleh pendapatan Pendapatan Pajak Penghasilan, dimana Pendapatan Pajak Penghasilan tahun 2023 turundibandingkan dengan tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan ekonomi yang terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan. Hal yang sama terjadi pada pendapatan pajak daerah tahun 2023 yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan angka surplus sebesar **Rp757.263.362.203,00**. Peningkatan pendapatan pajak mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang semakin tinggi sebagai tanda pemulihan ekonomi nasional mulai berjalan normal. Selanjutnya, APBN/APBD sebagai salah satu alat bagi Pemerintah dalam memberikan stimulus perekonomian lebih dimampukan dalam mengarahkan belanjanya pada tumbuhnya tingkat pendapatan masyarakat.

Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat	14.128.130.176.927	13.376.747.657.031
Pendapatan Pajak Penghasilan	6,674,981,523,653	7.413.375.260.333
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	6,575,677,459,654	5.384.207.696.284
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	97,494,309,402	62.799.013.267

Pendapatan Cukai	↑	109,432,110,000	↓	82.555.517.750
Pendapatan Pajak Lainnya	↑	209,318,189,609	↓	172.905.586.488
Pendapatan Bea Masuk	↓	215,811,814,000	↑	225.590.379.000
Pendapatan Bea Keluar	↑	36,096,581,000	↓	35.324.283.000
Pendapatan Pajak Lain-lain	↑	209,318,189,609	↓	(10.079.091)
II. Pendapatan Pajak Daerah	↑	7,508,715,594,944	↓	6.749.648.342.897
Jumlah Pendapatan Perpajakan Konsolidasian	↑	21,427,527,582,262	↓	20.126.395.999.928

Tabel 25: Perbandingan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

C.2.3. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian Tingkat Wilayah pada Tahun 2023 dan 2022 mencapai Rp4.377.373.567.936,00 dan Rp4.250.172.122.759,00. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp127.201.445.177,00 atau 2,99% dibandingkan dengan tahun 2022.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2023 merupakan Konsolidasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah sebesar Rp2.178.966.747.148,00 atau 42,3% dan Konsolidasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Pemerintah Daerah sebesar Rp2.971.293.588.262,00 atau 57,7%.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Daerah sebesar Rp3.608.012.218.247,00 atau 15,78%. Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar minus -Rp122.709.686.122,00 dari capaian tahun 2022 yang nilainya Rp601.135.058.457,00.

Salah satu upaya untuk menjaga pertumbuhan pendapatan dari sektor bukan pajak adalah peningkatan kinerja layanan oleh satuan kerja BLU yang akan membawa dampak meningkatnya pendapatan. Selain itu diperlukan adanya perhatian bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan BUMD yang ada di daerah sehingga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang lebih baik.

C.2.4. PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Konsolidasian pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp4.184.085.577.716,00 dan Rp1.709.298.785.821,00. Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.474.786.791.895,00 atau sebesar 144,78% dibandingkan dengan tahun 2022.

Keseluruhan Pendapatan BLU berasal dari pemerintah pusat yang secara dirinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Pendapatan Jasa Layanan Umum	↑ 2.083.697.604.249	↓ 1.576.469.337.469
II. Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	↓ 4.120.831.817	↑ 13.554.639.020
III. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	↑ 33.312.633.665	↓ 24.344.138.600

IV. Pendapatan dari Alokasi APBN	↓	45.454.880.266	↑	55.043.584.191
V. Pendapatan BLU Lainnya	↑	57.581.524.603	↓	39.887.086.541
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Konsolidasian	↑	4.184.085.577.716	↓	1.709.298.785.821

Tabel 27: Perbandingan Pendapatan BLU Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Konsolidasian pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar **Rp4.184.085.577.716,00** dan **Rp1.709.298.785.821,00**. Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **Rp2.474.786.791.895,00** atau sebesar **144,78%** dibandingkan dengan tahun 2022.

C.2.5. PENDAPATAN TRANSFER

Jumlah Pendapatan Transfer Konsolidasian pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar **Rp3.148.674.480.150,00** dan **Rp3.863.995.866.922,00**. Pendapatan transfer konsolidasian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **-Rp715.321.386.772,00** atau sebesar **-18,51%** dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan Transfer Konsolidasian tahun 2023 sebesar **Rp3.148.674.480.150,00** merupakan nilai bersih setelah dilakukan eliminasi. Pendapatan transfer ini merupakan pencatatan transaksi transfer yang dilakukan antar Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

C.2.6. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah konsolidasian pada Tahun 2023 dan 2022 mencapai **Rp30.032.475.417.845,00** dan **Rp31.163.865.387.495,00**. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp1.131.389.969.650,00** atau sebesar **3,63%** dibandingkan tahun 2022. Keseluruhan Lain Lain Pendapatan Yang Sah berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara dirinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Pendapatan Hibah	↑ 2.662.138.601.179	↓ 1.086.352.470.646
II. Dana Darurat	-	-
II. Pendapatan Lainnya	↑ 30.032.475.417.845	↓ 30.077.512.916.849
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Konsolidasian	↑ 32.725.033.297.796	↓ 31.163.865.387.495

Tabel 28: Perbandingan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa lain lain pendapatan yang sah mencatat transaksi yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Pendapatan hibah tercatat sebesar **Rp2.662.138.601.179,00** berasal dari hibah pemerintah Pusat kepada Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan diperuntukkan dana bantuan operasional sekolah, PDAM (Proyek AMD dan AMK), Hibah Sanitasi dan aset tetap. Sedangkan untuk pendapatan lainnya mengalami penurunan sebesar **Rp45.037.499.004,00** atau sebesar **-0,15%** dibandingkan tahun 2022.

C.2.7. BEBAN OPERASI

Beban operasional merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar

Rp70.265.324.006.577,00 dan Rp69.708.049.222.719,00 Beban Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp557.274.783.858,00 atau sebesar 0,8%.

Beban Operasional konsolidasian Tahun 2023 merupakan konsolidasi dari Beban Operasional Pemerintah Pusat Rp56.248.763.717.340,00 atau sebesar 57,3% yang telah dilakukan eliminasi sebesar -Rp27.978.087.244.289,00 dan konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp41.994.647.533.526,00 atau sebesar 42,7%. Beban operasional terbesar ada pada beban pegawai yang diikuti dengan beban barang dan jasa, beban akrual lainnya dan beban transfer.

Beban operasional pemerintah pusat tahun 2023 secara umum mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang salah satu penyebabnya adalah menurunnya Beban Transfer pemerintah pusat, sementara beban operasional pemerintah daerah tahun 2023 secara umum menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang salah satu penyebabnya adalah kenaikan Beban Barang dan Jasa dan Beban Hibah pemerintah daerah.

Selanjutnya, diperlukan adanya kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk dapat senantiasa mengurangi beban operasional dengan melakukan gerakan efisiensi yang masif dan mengalihkan sebagian belanja operasional untuk belanja modal yang secara langsung dapat menambah aset negara dan sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat.

Beban operasional tahun 2023 dan 2022 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Uraian		31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Beban Operasional Pemerintah Pusat		30.549.197.388.421	31.553.888.504.614
1	Beban Pegawai	9.573.643.346.208	9.266.641.216.801
2	Beban Persediaan	1.664.900.272.850	1.324.184.123.640
3	Beban Barang dan Jasa	4.540.328.981.511	3.484.745.253.553
4	Beban Pemeliharaan	1.502.580.479.763	1.863.461.249.162
5	Beban Perjalanan Dinas	1.183.446.025.144	897.390.921.989
6	Beban Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.373.615.080.256	1.382.468.249.337
7	Beban Bantuan Sosial	80.470.983.785	86.781.511.296
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.055.599.116.629	7.497.668.693.557
9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	188.772.704.161	248.923.164.326
10	Beban Transfer	4.385.840.398.114	5.501.624.120.953
II. Beban Operasioanal Pemerintah Daerah		39.537.568.455.312	38.154.160.718.105
1	Belanja Pegawai	16.462.076.588.422	15.886.869.736.080
2	Beban Barang dan Jasa	12.751.863.565.348	11.890.385.951.614
3	Beban Pemeliharaan	-	-
4	Beban Perjalanan Dinas	-	-
5	Beban Bantuan Sosial	42.906.795.679	66.591.195.000
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.853.849.481.054	5.969.313.850.860
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	115.862.432.260	69.825.610.810
8	Beban Transfer	2.138.522.832.431	2.689.324.289.785
9	Beban Bunga	61.560.155.829	16.857.554.336

10	Beban Subsidi	↑	26.364.911.140	↓	5.644.057.611
11	Beban Hibah	↑	1.997.020.086.838	↓	1.393.845.932.679
12	Beban Lain-lain	↓	87.541.606.311	↑	165.502.539.330
Jumlah Beban Operasional Pemerintah		↑	70.265.324.006.577	↓	69.708.049.222.719

Tabel 28: Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

C.2.8. PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp24.842.756.782,00** dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat sebesar **Rp9.577.212.370,00** dan konsolidasi Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Daerah Rp15.265.544.412,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat	↓ 9.577.212.370	↑ 10.335.924.388
II. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Daerah	↑ 15.265.544.412	↓ 4.512.655.777
Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional	↑ 24.842.756.782	↓ 14.848.580.165

Tabel 29: Perbandingan Pendapatan Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

C.2.9. BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL

Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp139.504.542.054,00** dan **Rp173.655.926.326,00**. Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **-Rp34.151.384.272,00** atau sebesar **-19,70%** dibandingkan dengan tahun 2022.

Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian Tahun 2023 sebesar **Rp139.504.542.054,00** merupakan konsolidasi dari Beban Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar **Rp108.826.510.430,00** dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Daerah sebesar **Rp31.728.861.331,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat	↑ 108.826.510.430	↓ 104.804.641.369
II. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Daerah	↓ 30.678.031.624	↑ 68.851.284.957
Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional	↓ 139.504.542.054	↑ 173.655.926.326

Tabel 30: Perbandingan Beban Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban dari kegiatan non operasional merupakan beban pemerintah dari penjualan aset non lancar atas pelepasan aset non lancar pemerintah pusat dan daerah. Sementara beban pelepasan aset non lancar adalah nilai buku aset yang dijual.

Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya efisiensi beban yang bersumber dari aset yang tidak ekonomis.

C.2.10. SURPLUS (DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Nilai Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus **Rp1.198.250.002,00** dan minus **Rp34.574.835.929,00**. Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan selisih antara Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah konsolidasian dengan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah konsolidasian selama tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 nilai surplus/defisit tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp33.376.585.927,00**. Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
I. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
II. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	↓ 1.198.250.002	↑ 34.574.835.929
Surplus/Defisit Konsolidasian	↓ (1.198.250.002)	↓ (34.574.835.929)

Tabel 31: Perbandingan Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

C.2.11. PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp582.253.423.550,00** dan **Rp273.053.299.486,00**. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Konsolidasian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar surplus **Rp309.200.124.064,00** atau surplus **113,20%**.

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp582.253.423.550,00** merupakan konsolidasi dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat sebesar **Rp581.202.593.843,00** dan Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Daerah sebesar **Rp1.050.829.707,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat	↑ 581.202.593.843	↓ 154.023.088.837
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Daerah	↓ 1.050.829.707	↑ 119.030.210.649
Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	↑ 582.253.423.550	↓ 273.053.299.486

Tabel 32: Perbandingan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kenaikan Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Konsolidasian tahun 2023 terjadi karena peningkatan rasio jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, yang mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal di Sulawesi Selatan dan kenaikan pendapatan sektor investasi seperti properti investasi.

C.2.12. BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Konsolidasian tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp566.527.569.954,00** dan **Rp142.391.491.989,00**. Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya

Konsolidasian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar surplus **Rp424.136.077.965,00** atau sebesar **-297,90%**.

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar **Rp566.527.569.954,00** merupakan konsolidasi dari Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat sebesar **Rp500.499.699.664,00** dan dan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Daerah sebesar **Rp66.027.870.290,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat	↑ 500.499.699.664	↓ 53.886.984.824
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Daerah	↓ 66.027.870.290	↑ 88.504.507.165
Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional	↑ 566.527.569.954	↓ 142.391.491.989

Tabel 33: Perbandingan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh hal yang sama pada Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Pemerintah Pusat yang terjadi karena adanya penyesuaian harga barang persediaan.

C.2.13. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar minus **-Rp4.829.927.201,00** dan minus **-Rp32.993.984.187,00**. Pos Luar Biasa Konsolidasian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **Rp28.164.056.986,00** atau sebesar **85,36%**.

Pos Luar Biasa Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar minus **-Rp4.829.927.201,00** secara keseluruhan hanya berasal dari Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Luar Biasa sebesar **Rp18.142.344.284,00** dan Beban Luar Biasa sebesar **Rp22.972.271.485,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Luar Biasa	↓ 18.142.344.284	↑ 7.885.280.041
Beban Luar Biasa	↓ (22.972.271.485)	↑ 40.879.264.228
Jumlah Pos Luar Biasa	↑ (4.829.927.201)	↓ (32.993.984.187)

Tabel 34: Perbandingan Pos Luar Biasa Tahun per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Pendapatan Luar Biasa tahun 2023 adalah Pendapatan Luar Biasa pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar **Rp18.142.344.284,00** dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp0. Sementara Beban Luar Biasa tahun 2023 dari Pemerintah provinsi sebesar Rp0 dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar **Rp22.972.271.485,00** yang merupakan beban untuk menangani bencana alam atau belanja tak terduga.

D. CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LKPK-TW

D.1. RINGKASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LKPK-TW

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan salah satu komponen pada Laporan Keuangan yang menyajikan perubahan Ekuitas suatu Entitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal yang disesuaikan dengan Kenaikan/Penurunan Ekuitas berupa Surplus/Defisit, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, Penyesuaian akibat Konsolidasi Neraca dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas, untuk kemudian menghasilkan Ekuitas Akhir.

Nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Ekuitas untuk akhir tahun 2023 menunjukkan jumlah sebesar **Rp234.420.900.638.790,00** atau mengalami penurunan sebesar **31,50%** atau sebesar **Rp107.816.455.520.375,00** dibandingkan ekuitas akhir tahun 2022. Salah satu faktor pengurangan ekuitas ini terjadi karena nilai ekuitas awal tahun 2023 yaitu sebesar **Rp226.456.546.279.417,00** dibandingkan tahun 2022 sebesar **Rp343.453.175.783.236,00** yakni mengalami penurunan **Rp116.996.629.503.819,00** atau **34,06%**.

Peningkatan nilai ekuitas tahun 2023 menggambarkan bahwa pemerintah telah mengarahkan belanjapada hal-hal yang tepat. Selanjutnya, nilai ekuitas akhir akan tercatat pada neraca sebagai gambaran atas kinerja pemerintah yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

D.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LKPK-TW

D.2.1. EKUITAS AWAL

Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp226.456.546.279.417,00** dan **Rp343.453.175.783.236,00**, jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah Ekuitas Awal pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **-Rp116.996.629.503.819,00** atau sebesar **-34,06%**. Jumlah Ekuitas Awal tersebut hanya terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp226.456.546.279.417,00** atau **100%**.

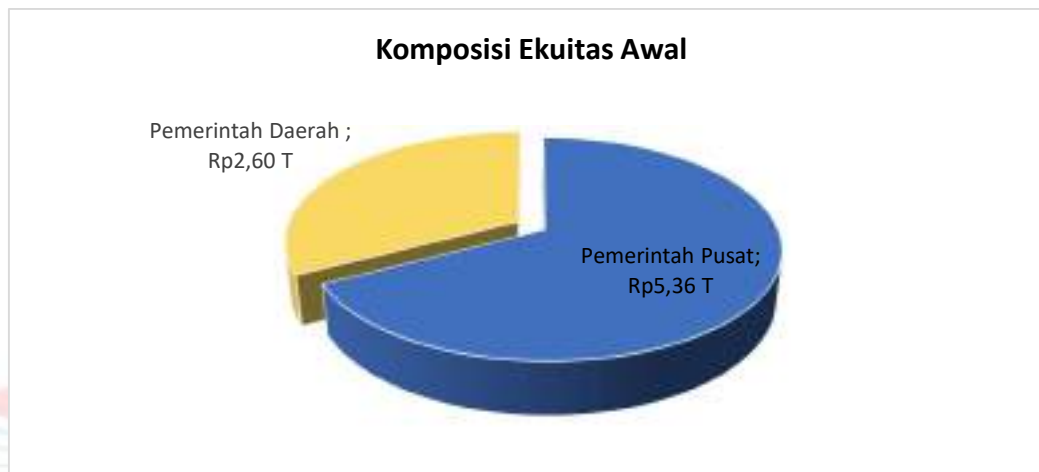


Grafik 10: Komposisi Ekuitas Awal berdasarkan kepemilikan

D.2.2. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp7.208.594.397.602,00** dan **-Rp1.215.819.624.071,00**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar

Rp6.748.534.735.302,00 atau sebesar **555,06%**. Jumlah Kenaikan/Penurunan Ekuitas tahun 2023 terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp5.363.403.563.851,00** atau sebesar **67,3%** dan Pemerintah Daerah sebesar **Rp2.600.950.795.522,00** atau sebesar **32,7%**.



Grafik 11: Komposisi Kenaikan/Penurunan berdasarkan kepemilikan

D.2.3. SURPLUS/DEFISIT

Defisit Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **-Rp6.244.082.231.288,00** dan **-Rp8.690.035.418.574,00** atau mengalami penurunan sebesar **Rp2.445.953.187.286,00** atau sebesar **28,15%** dibandingkan dengan defisit tahun 2022.

Defisit Konsolidasian per 31 Desember 2023 merupakan penggabungan Defisit pada LO Pemerintah Pusat sebesar **-Rp8.845.033.026.810,00** dan surplus pada LO Pemerintah Daerah sebesar **Rp2.600.950.795.522,00**

Turunnya defisit konsolidasian disebabkan turunnya defisit pada pemerintah pusat sebesar **Rp1.104.957.475.149,00** atau sebesar **-11,00%** dan naiknya surplus pada pemerintah daerah sebesar **Rp1.113.053.518.989,00** atau sebesar **81,00%** dibandingkan dengan tahun 2022.

D.2.4. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp1.729.260.077.624,00** dan **-Rp144.003.061.912,00** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp1.873.263.139.536,00** atau sebesar **1.300,85%** dibandingkan dengan Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun 2022. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi memberikan kontribusi terbesar terhadap koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2023. Berikut disajikan seluruh transaksi koreksi selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Koreksi Nilai Persediaan	↑ 292.314.569.262	↓ 229.115.158.453
Selish Revaluasi Aset Tetap	↓ -	↑ 17.443.321.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	↑ 1.231.241.230.710	↓ (294.168.151.696)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	↓ 22.231.116.421	↑ 22.999.122.303
Koreksi Lain-lain	↑ 183.473.161.231	↓ (119.392.511.972)

Jumlah Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	1.729.260.077.624	(144.003.061.912)
---	-------------------	-------------------

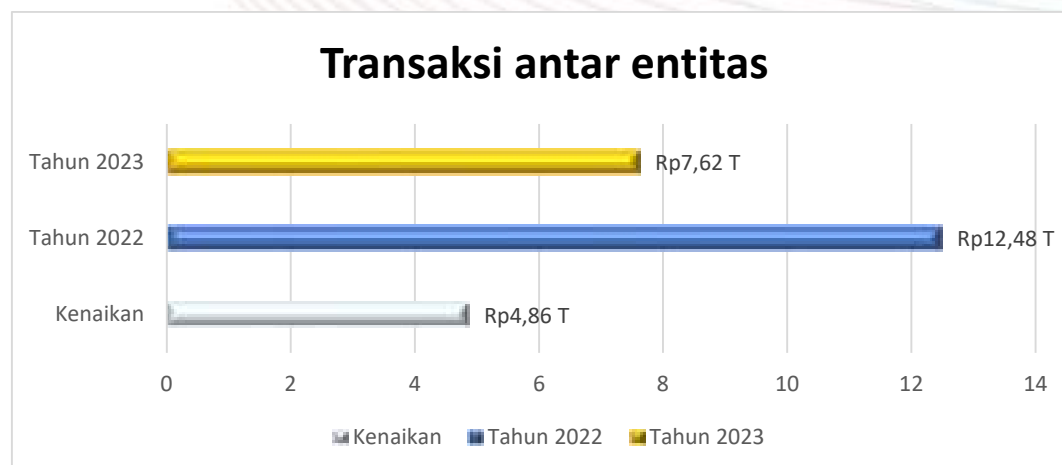
Tabel 35: Koreksi-koreksi yg Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

- Koreksi Nilai Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp292.314.569.262,00** merupakan seluruh Koreksi Nilai Persediaan pada LPE Pemerintah Pusat sebesar **Rp292.314.569.262,00** dan Koreksi Nilai Persediaan pada LPE Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00.
- Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 jika dibandingkan nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 Rp17.443.321.000,00. Mengalami penurunan dengan nilai yang sama.
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.231.241.230.710,00** yang terdapat pada LPE Pemerintah Pusat.
- Koreksi Nilai Reklasifikasi Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp22.231.116.421,00** yang terdapat pada LPE Pemerintah Pusat.
- Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp183.473.161.231,00** yang terdapat pada LPE Pemerintah Pusat.

Koreksi yang terjadi pada tahun 2023 berdampak pada bertambahnya nilai ekuitas sebesar **Rp Rp1.729.260.077.624,00**. Bertambahnya ekuitas tersebut didominasi oleh Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tahun 2023 sebesar **Rp1.231.241.230.710,00**.

D.2.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp12.479.176.513.037,00** dan **Rp7.618.218.856.415,00**. merupakan faktor penyeimbang dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat agar ekuitas tidak menjadi semakin berkurang atau bahkan minus. Transaksi Antar Entitas meningkat sebesar **Rp4.860.957.656.622,00** atau sebesar **63,81%** dibandingkan dengan tahun 2022.



Grafik 12: Komposisi Kenaikan/Penurunan berdasarkan tahun

D.2.6. PENYESUAIAN EKUITAS AKIBAT KONSOLIDASI NERACA

Penyesuaian Ekuitas Akibat Konsolidasi Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan penyesuaian selisih Kas pada Neraca

UAKKBUN dengan Neraca UAKPA yang keseluruhannya berasal dari pemerintah pusat.

Penyesuaian selisih kas pada neraca dapat terjadi diantaranya karena adanya transaksi yang belum dicatat, kesalahan perhitungan (nilai transaksi yang dicatat terlalu besar atau terlalu kecil dan terdapat transaksi yang tidak bisa diakui akibat penerapan sistem akrual.

D.2.7. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas bisa terjadi karena transaksi Uang Muka dari KPPN yang sampai dengan akhir tahun belum disetor kembali atau dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun.

Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas bernilai Rp0 menunjukkan kondisi baik karena artinya uang muka dari KPPN telah dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun.

D.2.8. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp234.420.900.638.790,00** dan **Rp342.237.356.159.165,00** atau menurun sebesar **Rp107.816.455.520.375,00** atau sebesar **31,50%** dibandingkan dengan Ekuitas Akhir yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah tersebut terdiri dari Ekuitas Akhir Pemerintah Pusat sebesar **Rp231.819.949.843.268,00** atau **67,35%** dan Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah sebesar **Rp2.600.950.795.522,00** atau **33,65%**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pemerintah Pusat	↑ 231.819.949.843.268	↓ 226.494.333.755.873
Pemerintah Daerah	↑ 2.600.950.795.522	↓ 115.743.022.403.292
Jumlah Ekuitas Akhir Pemerintah Konsolidasian	↑ 234.420.900.638.790	↓ 342.237.356.159.165

Tabel 36: Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Peningkatan nilai ekuitas ini telah menggambarkan bahwa Pemerintah berhasil mengarahkan belanja pada hal-hal yang tepat. Selanjutnya, nilai ekuitas akhir akan tercatat pada neraca sebagai gambaran atas kinerja pemerintah yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.



CALK LSKP-TW

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN SEKTOR PEMERINTAH UMUM

GAMBARAN UMUM STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Sebagai perwujudan dari amanah tersebut, Pemerintah telah mulai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) sejak tahun 2013. Penyusunan LKPK dan LSKP tersebut masih terdapat beberapa keterbatasan, karena belum menggunakan data informasi akuntansi yang berbasis akrual. Namun demikian dengan upaya keras, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah berhasil menyusun petunjuk teknis penyusunan LKPK dan LSKP sehingga mampu menghasilkan LKPK dan LSKP yang lebih berkualitas dengan data yang relevan dan andal karena mendasarkan pada informasi pada laporan keuangan yang berbasis akrual.

Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) disusun berdasarkan informasi akuntansi berbasis akrual dan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan telah mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi yang digunakan dalam mengkompilasi statistik. Di samping itu, pengaturan tersebut menjadi panduan penyajian statistik fiskal dalam suatu kerangka analitis sehingga laporan statistik keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi pengguna (stakeholder). Beberapa manfaat laporan statistik keuangan, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, analisis perbandingan antar negara, dan sebagai jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi sehingga dapat lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi.

Data statistik keuangan pemerintah secara keseluruhan dikompilasi dari laporan sektor korporasi publik dan sektor pemerintahan umum. Adapun cakupan statistik keuangan sektor publik berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah, dapat dilihat pada bagan berikut :



Bagan 1. Cakupan Statistik Keuangan Sektor Publik Berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah

Laporan statistik Sektor publik mengkonsolidasi transaksi dari Pemerintahan Umum dan sektor Korporasi Publik yang masing-masing sektor secara lebih rinci, meliputi :

1. Sektor Pemerintah Umum

Laporan statistik pada sektor pemerintah umum meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi. Sektor pemerintah umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan.

Lebih lanjut, statistik keuangan pada Pemerintah Pusat terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun tetap berada dalam kendali Pemerintah Pusat.

2. Sektor Korporasi Publik

Laporan statistik pada sektor korporasi publik meliputi sub-sektor korporasi publik non keuangan dan sub-sektor korporasi publik keuangan. Pada Sub-sektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sementara sub-sektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan.

Mereka dapat memunculkan kewajiban keuangan atas tanggung jawabnya sendiri. Sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK TW dan LSKP TW Pada Kanwil DJPb, maka Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Provinsi Sulawesi Selatan ini, tidak disusun secara keseluruhan (sektor publik), namun hanya Laporan Statistik Keuangan pada Pemerintah Umum dan tidak termasuk Statistik Keuangan pada sektor Korporasi Publik.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) membutuhkan sumber data yang bisa diyakini keandalannya karena informasi statistik keuangan tersebut akan digunakan stakeholder dalam cakupan yang sangat luas. Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

Mapping BAS mutlak diperlukan karena adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik keuangan Pemerintah. Adapun data yang di-mapping merupakan data akundetil pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, data hasil mapping Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi laporan statistik keuangan sektor pemerintah umum, yaitu: **Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Metadata.**

LSKP-TW disusun melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW, melalui mapping BAS detil data LKPP-TW;



2. Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui mapping BAS detil data LKPKD-TW;
3. Konsolidasian kertas kerja LSKPPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW akan menghasilkan LSKP-TW.

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Konsolidasian dilakukan dengan mapping BAS detil kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPKD-TW) ke dalam Government Financial Statistic (GFS) Classification Assistant yang menyediakan kerangka mapping masing-masing akun BAS detil ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:

1. Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

2. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah

Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

Sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3402/PB.6/2018 tanggal 13 April 2018 hal Penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW Tahun 2017 Menggunakan Data Audited dan Triwulan I 2018, dan dengan adanya penyesuaian modul penyusunan Laporan Arus Kas LKPK-TW dan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas LSKP-TW dengan sentralisasi Bank Operasional yang mempengaruhi konsepsi arus kas wilayah, maka Laporan Arus Kas LKPK-TW dan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas LSKP-TW Tahun 2017 tidak disusun.

5. Metadata LSKP

Metadata LKSP-TW berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- ✓ Infomasi dasar
- ✓ Definisi Data
- ✓ Cakupan Data
- ✓ Periode Publikasi
- ✓ Ketepatan Waktu Publikasi
- ✓ Sumber Data
- ✓ Metodologi
- ✓ Integritas Data
- ✓ Akses Data

PENJELASAN POS-POS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 3 (tiga) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Ekonomi Pemerintah Lainnya.

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Laporan operasi menyajikan informasi atas transaksi operasi (pendapatan dan beban) dan Transaksi aset (non keuangan dan keuangan). Laporan ini disusun untuk mengetahui komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (*net cost*) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (*full cost*) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil netto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), laporan operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

- a. Saldo Operasi Neto (net operating balance), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban, dan
- b. Pinjaman Neto (net lending/borrowing), yang juga dikenal dengan saldo fiskal (fiscal balance) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.

Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan hasil konsolidasi LO-Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan LO-Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

Berdasarkan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tahun 2023, secara umum Pendapatan Pemerintah Umum mencapai **Rp85.793.689.985.285,00** dan Beban Pemerintah Umum mencapai **Rp58.849.674.895.198,00**. Saldo operasi netto atau net operating balance sebesar **Rp26.944.015.090.087,00**, yang setelah dikurangi dengan akuisisi aset non keuangan netto sebesar **Rp13.721.159.421.965,00** menghasilkan angka Peminjaman

Neto (net lending) sebesar **Rp15.965.439.251.988,00**. Peminjaman neto (Net lending) tersebut berasal dari akuisisi neto aset keuangan (net acquisition of financial assets) sebesar **Rp17.371.644.186.961,00** dan keterjadian kewajiban neto (net incurrence of liabilities) sebesar **-Rp372.164.831.580,00**

Berikut dijelaskan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

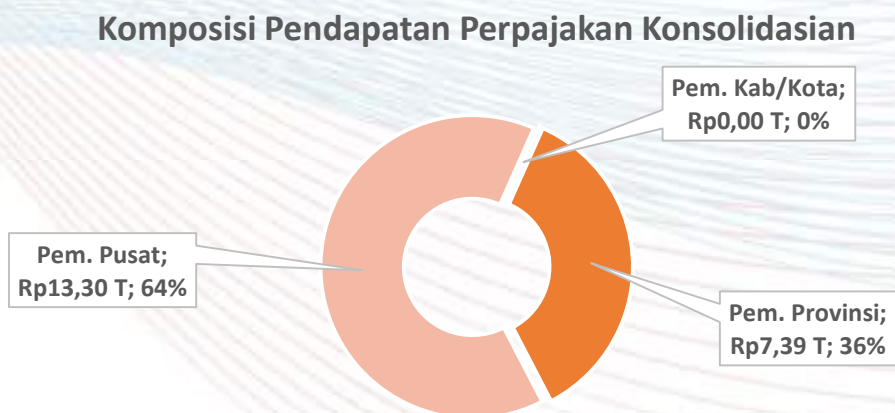
1. Pendapatan Pemerintahan Umum

Pendapatan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar **Rp85.793.689.985.285,00** dan Tahun 2022 sebesar **Rp75.790.869.356.106,00**.

Pendapatan pemerintah Umum tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **13,20%** atau sebesar **Rp10.002.820.629.179,00** jika dibandingkan dengan Pendapatan Pemerintahan Umum Tahun 2022. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar **Rp20.688.344.853.593,00** atau **24,11%**, Pendapatan hibah sebesar **Rp2.807.445.440.227,00** atau **3,27%** dan Pendapatan Lainnya Konsolidasian sebesar **Rp62.297.899.691.465,00** **72,61%** dari total jumlah Pendapatan Pemerintah Umum Tahun 2023.

a. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian

Sampai dengan saat ini, Pendapatan perpajakan menjadi sumber pendapatan yang sangat penting dalam postur penganggaran pemerintah dan sangat menentukan arah kebijakan dan stabilitas fiskal. Pendapatan Perpajakan konsolidasian disumbangkan oleh seluruh tingkat pemerintahan. Berikut disajikan data pendapatan perpajakan untuk masing-masing tingkat pemerintahan yaitu :



Grafik 12: Komposisi Pendapatan Pajak Pemerintah Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kontribusi pendapatan pajak yang sangat dominan yaitu mencapai **64%**, diikuti dengan Pemerintah Provinsi sebesar **36%**, sedangkan Pemerintah Kab/Kota belum memberikan kontribusi.

Besarnya kontribusi pendapatan pajak pada Pemerintah Pusat disebabkan karena beberapa jenis pendapatan pajak dengan volume nilai transaksi sangat besar yang melibatkan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diakui menjadi pendapatan pemerintah pusat.

Pendapatan Pajak Pemerintah Provinsi mayoritas disumbangkan dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.

Sedangkan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak sebesar **36%**, yang berasal dari Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pendapatan Hibah Konsolidasian

Pendapatan Hibah Konsolidasian pada statistik keuangan pemerintah ini merupakan penerimaan dalam bentuk transfer tidak wajib yang diterima dari unit pemerintah umum lainnya, organisasi atau perorangan dalam bentuk kas dan non-kas (barang/jasa). Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat meskipun terdapat realisasi dari Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Perorangan, namun tidak diakui sebagai pendapatan hibah pemerintah pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengingat entitas akuntansi yang mencatat pendapatan hibah satker pada BA 999.02 yang merupakan entitas kantor pusat dan berlokasi di Jakarta.

Pendapatan Hibah Konsolidasian yang diterima pada Pemerintah Provinsi dan Pemkot/kab memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian pendapatan hibah konsolidasian. Besarnya jumlah pendapatan hibah yang disajikan pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023 sebesar **Rp2.807.445.440.227,00** dan Tahun 2022 sebesar **Rp671.765.035.210,00** atau mengalami peningkatan sebesar **317,92%** dibandingkan dengan jumlah pendapatan hibah Tahun 2022.

Sebagian besar pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Badan dan/atau perorangan, dan sebagian kecil berasal dari pendapatan transfer dan bantuan keuangan yang diterima dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang tidak habis tereliminasi disebabkan karena kesalahan pencatatan.

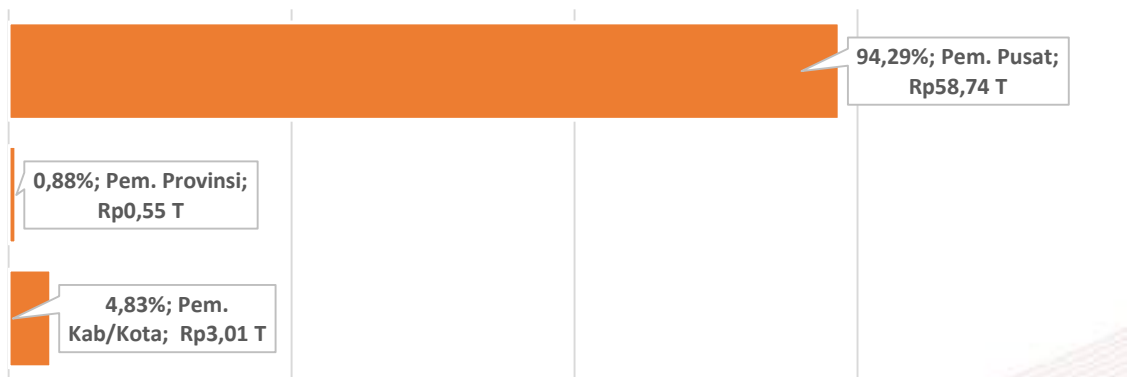
Pemerintah Provinsi mampu mencatatkan pendapatan hibah sebesar **Rp2.807.445.440.227,00**. Pendapatan hibah ini dikurangi dengan eliminasi sebesar - **Rp29.606.715.491.216,00**. Pendapatan hibah yang diterima Pemprov dan Pemkab/pemkot sebagian besar merupakan pendapatan transfer dari pemerintah yang mempunyai tingkatan lebih tinggi.

c. Pendapatan Lainnya Konsolidasian

Pendapatan Lainnya mencakup semua transaksi pendapatan yang tidak diklasifikasikan sebagai pajak, kontribusi sosial, atau hibah. Pendapatan lainnya di sini antara lain meliputi penjualan barang dan jasa, bunga dan pendapatan properti lainnya, transfer sukarela dalam bentuk kas dan non-kas selain hibah, denda dan penalti.

Pendapatan Lainnya Tahun 2023 sebesar **Rp62.297.899.691.465,00** dan Tahun 2022 sebesar **Rp55.711.729.515.051,00** atau mengalami kenaikan sebesar **11,82%** dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya yang terjadi di Tahun 2022. Secara keseluruhan posisi Pendapatan Lainnya dapat dilihat Berikut disajikan data untuk masing-masing tingkat pemerintahan yaitu:

Komposisi Pendapatan Lainnya Pemerintah



Grafik 13: Komposisi Pendapatan Lainnya Pemerintah Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kontribusi Pendapatan Lainnya yang paling besar yaitu sebesar **Rp58.740.367.392,00** atau sebesar **94,29%**.

2. Beban Pemerintah Umum

Beban Pemerintah Umum dalam pengertian statistik keuangan pemerintah adalah semua transaksi yang mengurangi kekayaan neto sektor pemerintah umum. Beban Pemerintah Umum pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 mencapai **Rp58.849.674.895.198,00** dan **Rp49.502.206.650.285,00** atau mengalami kenaikan sebesar **18,88%** dibandingkan dengan jumlah beban pemerintah Tahun 2022. Jumlah tersebut terdiri dari:

a. Kompensasi Pegawai

Kompensasi Pegawai berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp25.904.365.130.869,00** dan **Rp25.174.238.448.871,00** atau mengalami kenaikan sebesar **2,90%** dibandingkan dengan kompensasi pegawai Tahun 2022.

Beban kompensasi pegawai ini berasal dari jumlah belanja pegawai yang dibayarkan oleh pemerintah di semua tingkatan, termasuk belanja gaji pada satker BLU Pemerintah Pusat meskipun dibayarkan melalui belanja barang BLU.

Beban kompensasi pegawai disebabkan karena pengeluaran pada beberapa pos Pemerintah Pusat antara lain belanja gaji pokok PNS, Belanja Tunjangan Fungsional, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Profesi Guru, Belanja Gaji Pokok TNI/Polri, Belanja Tunjangan LaukPauk TNI/Polri, dan belanja tunjangan khusus kegiatan. Sedangkan pada Pemerintah Daerah Beban kompensasi pegawai berasal dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Pimpinan DPRD, Uang Lembur dan Tunjangan Lainnya.

b. Penggunaan Barang dan Jasa

Penggunaan Barang dan Jasa berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp18.592.632.139.206,00** dan **Rp17.622.993.982.789,00** atau mengalami kenaikan sebesar **5,50%** jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

Beban penggunaan barang dan jasa ini berasal dari besarnya jumlah belanja barang yang dibayar oleh pemerintah di semua tingkatan dan tidak termasuk belanja gaji pada BLU Pemerintah Pusat meskipun dalam pembayarannya menggunakan akun belanja barang BLU dan belanja yang diserahkan kepada masyarakat.

Penggunaan Barang dan Jasa berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai **Rp17.079.396.138.501,00** menunjukkan terjadinya penurunan penggunaan barang dan jasa sebesar **-3,08%**. Penurunan penggunaan belanja barang dan jasa menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan belanja barang dan jasa sedikit lebih kurang dari tahun sebelumnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasionalnya.

c. Konsumsi Aset Tetap

Konsumsi Aset Tetap berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp3.872.596.002.375,00 sedangkan Tahun 2022 tidak tersedia. Meskipun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan penyusutan Aset Tetap pada masing-masing entitas, namun demikian beban penyusutan tersebut belum dilakukan mapping ke dalam beban depresiasi dalam Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah. Hal ini disebabkan karena penyusunan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah masih mendasarkan pada data Laporan Realisasi Anggaran-LKPK dan belum menggunakan Laporan Operasional-LKPK.

d. Bunga

Bunga berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp69.882.906.168,00** dan **Rp33.881.515.394,00** atau mengalami peningkatan sebesar **106,26%** dari jumlah bunga yang terjadi pada Tahun 2023. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp0,00 atau sebesar **0,00%** dan Pemerintah Kab/Kota sebesar **Rp69.882.906.168,00** atau sebesar **100,00%**.

Beban bunga ini timbul pada debitor untuk penggunaan dana unit lain. Instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai deposito, surat berharga utang, pinjaman dan piutang/utang. Beban Bunga tidak dicatat pada Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengingat Utang Jangka Panjang dicatat di BA 999.01 (BABUN Pengelola Utang) yang berlokasi di Jakarta dan tidak dicatat pada entitas akuntansi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak ada beban bunga yang terjadi di entitas Pemerintah Pusat.

e. Subsidi

Subsidi berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp26.364.911.140,00** dan **Rp5.644.057.611,00**. Nilai subsidi konsolidasian Tahun 2023 keseluruhannya berasal dari Pemerintah Kab/Kota dan mengalami peningkatan sebesar **367,13%**.

Beban subsidi merupakan transfer tahun berjalan yang dibayar oleh unit pemerintah kepada perusahaan, baik berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor. Subsidi meliputi transfer ke korporasi publik dan perusahaan lain yang ditujukan untuk menutupi kerugian operasi.

f. Hibah

Hibah berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp7.330.400.754.264,00** dan **Rp671.765.035.210,00** atau mengalami peningkatan sebesar **991,21%** dari Hibah yang terjadi pada Tahun 2022. Belanja Hibah yang terjadi pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

g. Manfaat Sosial

Manfaat sosial berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan 2022 sebesar **Rp123.164.159.679,00** dan **Rp149.117.313.682,00** atau mengalami penurunan sebesar **-17,40%** dari manfaat sosial pada Tahun 2022. Manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan kepada rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan yang timbul dari kejadian seperti sakit, menganggur, pensiun, perumahan atau keadaan keluarga yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas.

Jumlah beban manfaat sosial konsolidasian Tahun 2023 tercatat pada Pemerintah Pusat sebesar **Rp80.293.364.000,00** atau sebesar **65,19%**, Pemerintah Provinsi sebesar **Rp1.469.604.500,00** atau sebesar **1,19%** dan Pemerintah Kab/kota sebesar **Rp41.401.191.179,00** atau sebesar **33,61%**. Belanja manfaat sosial yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan sosial, antara lain melalui pemberian stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya dan belanja bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat. Penurunan belanja untuk manfaat sosial dipengaruhi oleh penurunan manfaat sosial yang paling besar berasal dari Pemda Kab Kepulauan Selayar, Pemda Kota Makassar, Pemda Kab Maros dengan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat.

h. Beban Lainnya

Belanja lainnya berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp2.930.268.891.497,00** dan **Rp2.131.156.462.991,00** atau mengalami kenaikan sebesar **37,50%** dari beban lainnya pada Tahun 2022. Beban Lainnya konsolidasian terjadi pada Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.800.230.793.656,00** atau sebesar **62,72%**, Pemerintah Provinsi sebesar **Rp80.521.295.402,00** atau sebesar **2,81%** sedangkan pada Pemerintah Kab/Kota sebesar **Rp989.506.198.812,00** atau sebesar **34,47%**.

Beban lainnya meliputi semua beban transaksi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, meliputi Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat, Belanja Tak Terduga, dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Berdasarkan rincian di atas, beban pemerintah umum didominasi oleh Compensation of employees (Belanja Pegawai) diikuti Other expense.

Belanja pegawai tidak dimungkinkan dilakukan efisiensi mengingat belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah untuk membayar hak pegawai pemerintah. Hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurangi beban operasional pemerintah adalah melakukan kebijakan efisiensi terhadap belanja barang dan meningkatkan kualitas belanja yang benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya, efisiensi dimaksud dapat dialokasikan pada belanja untuk pembentukan capital/modal yang mampu memberikan dorongan pada produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. Saldo Operasi Bruto/Neto

Pada posisi akhir Tahun 2023, Saldo Operasi menunjukkan pada angka sebesar **Rp26.944.015.090.087** (Saldo Neto) yang merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dan beban. Pendapatan konsolidasian berjumlah **Rp85.793.689.985.285,00** sedangkan beban konsolidasian berjumlah sebesar **Rp58.849.674.895.198,00**.

Kondisi saldo operasi neto pada masing-masing tingkat pemerintahan menunjukkan bahwa Pempus, Pemprov, dan Pemkot/Pemkab mampu menaikkan nilai kekayaan neto akibat peningkatan realisasi pendapatan yang sebanding dengan tingginya beban operasional selama

Tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kegiatan pemerintah senantiasa dapat meningkatkan nilai kekayaan neto antar transaksi.

4. Transaksi Aset Non Keuangan

Transaksi aset non keuangan berupa akuisisi neto aset non keuangan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar **Rp13.721.159.421.965,00** dan **Rp11.860.699.788.812,00** atau mengalami kenaikan sebesar **15,69%** dibandingkan dengan transaksi aset non keuangan Tahun 2022. Jumlah tersebut terdiri dari Akuisisi Aset Tetap sebesar **Rp13.399.120.972.083,00** serta Aset Non Produksi sebesar **Rp322.038.449.882,00**.

Kenaikan perolehan aset non keuangan menggambarkan bahwa aktivitas pemerintah dalam rangka menambah aset tetap atau pembentukan capital/modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini perlu ditingkatkan dengan cara pemerintah dapat mengarahkan belanja ke arah yang lebih produktif dengan meningkatkan pada pembentukan capital/modal.

5. Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing)

Selama Tahun 2023, Pinjaman Neto mencapai Rp15.965.439.251.988,00 (net lending) atau mengalami kenaikan sebesar 10,66% dari Tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp14.427.962.917.009,00.

6. Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban (Pembiayaan)

Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban berupa Akuisisi Neto Aset Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp15.593.274.420.408,00 dan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar - Rp372.164.831.580,00. Transaksi Aset Keuangan sebesar Rp15.593.274.420.408,00 merupakan transaksi penggunaan SilPA, Dana Cadangan, penerimaan kembali piutang, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Sementara Kewajiban Netto sebesar - Rp372.164.831.580,00 merupakan penarikan pinjaman dalam negeri.

NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta kewajiban yang dimiliki pemerintah pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang.

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam Aset Non-keuangan, Aset Keuangan dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, pengubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur.

Berikut aset keuangan/kewajiban baik aset keuangan/kewajiban dalam negeri (domestik)

maupun aset keuangan/kewajiban luar negeri berdasarkan struktur klasifikasi yang terdapat pada Neraca Konsolidasian dengan penjelasan sebagai berikut:

7. Aset Non Keuangan Pemerintah

Posisi Aset Non Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp348.733.424.503.180,00**. Nilai Aset Non Keuangan Pemerintah Umum tersebut terdiri dari Aset Tetap sebesar **Rp128.445.486.838.024,00** dengan porsi terhadap nilai Aset Non Keuangan sebesar **2.329%**. Persediaan sebesar **Rp10.340.373.564.259,00** serta Aset Non Produksi sebesar **Rp209.947.564.100.897,00**. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022, nilai pembentuk komponen Aset Non Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 menunjukkan adanya peningkatan sebesar **3,47%**.

Hal tersebut mengindikasikan tetap terjaganya kemampuan pemerintah untuk merealisasikan sejumlah pengadaan Aset Non Keuangan di tengah kondisi perlambatan ekonomi akibat situasi perang Rusia-Ukraina dan fenomena El Nino sepanjang tahun 2023 yang menyebabkan kontraksi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Aset Non-Keuangan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Aset Tetap

Aset Tetap meliputi Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya. Laporan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah menunjukkan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp125.952.022.337.055,00** dan **Rp121.499.053.281.545,00** yang meliputi :

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	↑ 107.166.308.918.055	↑ 97.120.689.467.401
Peralatan dan Mesin	↓ 14.422.430.061.002	↓ 18.583.216.414.125
Aset Tetap Lainnya	↑ 6.802.471.819.976	↓ 5.795.147.400.019
Jumlah	↑ 128.445.486.838.024	↓ 121.499.053.281.545

Tabel 38: Aset Tetap Tahun 2023

Peningkatan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 terjadi pada Gedung dan Bangunan sebesar 10,34%, Aset Tetap Lainnya sebesar **17,38%**. Sementara itu, penurunan terjadi pada pos Peralatan dan Mesin sebesar **-22,39%**. Peningkatan total aset tetap ini terjadi karena adanya kebijakan penambahan belanja untuk pembentukan modal dalam bentuk aset baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya sinergi dan keselarasan antara arah kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait dengan peningkatan nilai kapitalisasi Aset Tetap untuk mendukung performa nilai Kekayaan Bersih Pemerintah sebagai salah satu indikator kesehatan keuangan pemerintah, serta dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

b. Persediaan

Nilai Persediaan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 adalah **Rp10.340.373.564.259,00**. Nilai tersebut meningkat dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 dengan persentase

peningkatan sebesar **17,66%** atau Rp1.551.662.847.645,00.

Terjadinya peningkatan nilai persediaan berada pada pada Pemerintah Pusat. Hal ini menggambarkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam pengadaan barang persediaan tidak didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang persediaan yang realistis. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang persediaan melampaui jumlah yang dibutuhkan selama Tahun 2023 untuk kegiatan operasional.

c. Aset Non Produksi

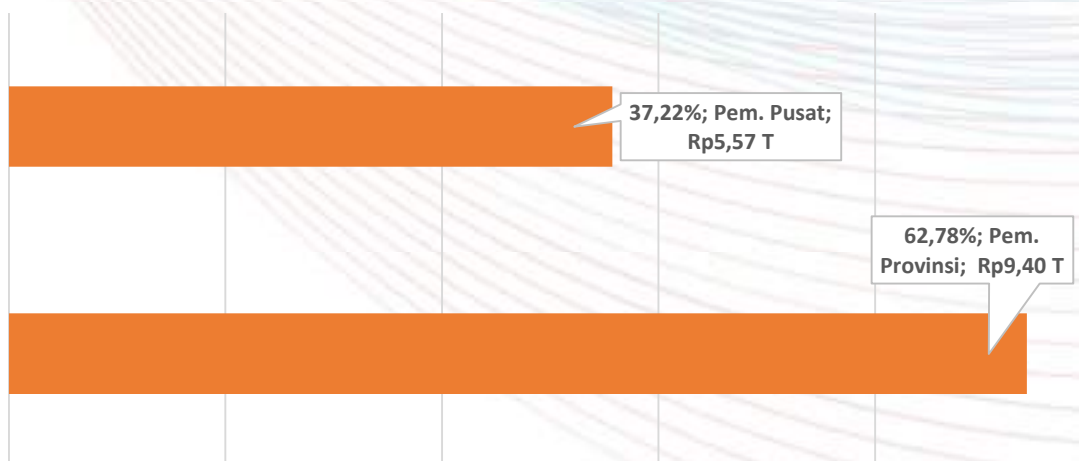
Aset Non Produksi Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp209.947.564.100.897,00** dan **Rp206.757.380.422.708,00** atau mengalami peningkatan sebesar **1,54%**. Jumlah tersebut berasal dari Pembelian Tanah, Hak Cipta, Paten, dan Lisensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai pembentuk Aset Non Produksi berasal keseluruhan dari Tanah.

Apabila dilihat berdasarkan komposisi kepemilikan, Pemerintah Pusat memberikan kontribusi sebesar **73,63%** atau **Rp154.575.263.567.781,00**. Sedangkan, Pemerintah Daerah berkontribusi sebesar **26,36%** dengan nilai kumulatif sebesar **Rp55.339.788.320.342,00**.

8. Aset Keuangan Pemerintah

Posisi Aset Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp14.975.526.535.220,00**. Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, nilai Aset Keuangan Pemerintah Umum mengalami peningkatan sebesar **14,27%** atau **Rp1.870.679.096.899,00**. Nilai pembentuk Aset Keuangan Pemerintah Umum tersebut terdiri dari Uang dan Deposito, Surat Berharga Selain Saham, Pinjaman, Saham dan Ekuitas Lain, serta Piutang Lainnya. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan komposisi kepemilikan, porsi Aset Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komposisi Kepemilikan Aset Keuangan Pemerintah Umum



Grafik 22: Komposisi Kepemilikan Aset Keuangan Pemerintah Umum Tahun 2023

Aset Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposito

Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran, sedangkan deposito merupakan aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan

bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya. Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposit terdiri dari uang dan deposit yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Posisi Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposito per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp4.809.260.146.411,00,00** atau berkontribusi sebesar **32,11%** terhadap nilai total Aset Keuangan Pemerintah Umum. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, nilai Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposito mengalami kenaikan sebesar 1,16% atau **Rp55.362.755.014,00,00**.

b. Aset Keuangan Domestik – Surat Berharga Selain Saham

Posisi Aset Keuangan Domestik – Surat Berharga Selain Saham per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp68.647.300.021,00** atau berkontribusi sebesar **0,46%** terhadap nilai total Aset Keuangan Pemerintah Umum. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, nilai Aset Keuangan Domestik – Surat Berharga Selain Saham mengalami penurunan sebesar **-57,50%** atau **-Rp92.860.145.751,00,00**. Nilai Surat Berharga Selain Saham per 31 Desember 2023 tersebut berasal dari kontribusi kepemilikan pada Pemerintah Pusat sebesar **87,4%** atau sebesar **Rp60.000.000.000,00** dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar **12,60%** atau sebesar **Rp8.647.300.021,00,00**.

c. Aset Keuangan Domestik – Pinjaman

Pinjaman merupakan instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset. Aset tersebut merupakan Investasi Non Permanen Lainnya. Posisi Aset Keuangan Domestik – Pinjaman 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, nilai Pinjaman mengalami penurunan yang relatif signifikan sebesar **-100,00%** atau **-Rp2.169.411.249,00**. Nilai pinjaman tersebut merupakan Aset Keuangan Domestik – Pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

d. Aset Keuangan Domestik – Saham dan Ekuitas Lain

Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan berupa Investasi Permanen PMN/D. Posisi Aset Keuangan Domestik – Saham dan Ekuitas Lain per 31 Desember 2023 adalah **Rp 4.587.131.705.723,00**. Nilai tersebut memberikan kontribusi terhadap total Aset Keuangan Domestik sebesar **30,63%**. Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, nilai Saham dan Ekuitas Lain mengalami peningkatan sebesar **10,02%** atau sebesar **Rp 417.701.783.076,00**.

Untuk investasi pemerintah daerah berupa saham dan ekuitas lain kepada BUMD, Perusda, dan Perusahaan Swasta memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga menghasilkan pertumbuhan pendapatan badan usaha dimaksud. Dengan pertumbuhan tersebut badan usaha akan memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai pendapatan. Untuk itu diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan modal bagi badan usaha.

e. Aset Keuangan Domestik – Piutang Lainnya

Piutang Lainnya meliputi kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang masih harus dibayar. Posisi Aset Keuangan Domestik – Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp5.510.487.383.065,00**. Nilai tersebut memberikan kontribusi paling besar terhadap total Aset Keuangan Domestik sebesar **36,80%**.

Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, nilai Piutang Lainnya mengalami peningkatan sebesar **37,15%** atau **Rp1.492.644.115.809,00**. Peningkatan nilai Piutang Lainnya mengindikasikan kondisi yang negatif bagi pemerintah untuk karena dana yang dimiliki oleh

pemerintah tidak dapat segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

9. Kewajiban Pemerintah Umum

Posisi Kewajiban Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp8.987.528.333.287,00** Nilai Kewajiban tersebut seluruhnya berasal dari Kewajiban Domestik dan tidak ada yang berasal dari Kewajiban Luar Negeri. Kewajiban Domestik yang tercatat per 31 Desember 2023 berasal dari Pinjaman dan Utang Lainnya. Nilai Pinjaman per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp0,00 dengan porsi sebesar **0,00%** terhadap nilai total Kewajiban Pemerintah Umum.

Sedangkan, nilai Utang Lainnya sebesar **Rp6.851.785.569.913,00** dengan porsi sebesar **76,24%**. Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, nilai Kewajiban Pemerintah Umum mengalami kenaikan sebesar **23,89%** atau sebesar **Rp1.732.831.397.375,00**. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan komposisi kepemilikan, porsi Kewajiban Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komposisi Kepemilikan Kewajiban Pemerintah Umum



Grafik 23: Komposisi Kepemilikan Kewajiban Pemerintah Umum Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas Pemerintah Daerah memiliki komposisi Kewajiban sebesar **56,19%** atau sebesar **Rp5.323.335.266.357,00**, Sedangkan, Pemerintah Pusat memiliki komposisi Kewajiban sebesar **43,81%** atau sebesar **Rp4.150.839.398.832,00**. Komposisi Kewajiban pada Pemerintah Daerah terbagi kembali pada Pemerintah Provinsi dengan nilai sebesar **Rp2.192.619.083.863,00** dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar **Rp3.130.716.182.494,00**

a. Kewajiban Domestik – Pinjaman

Posisi Kewajiban Domestik - Pinjaman per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau berkontribusi sebesar **0,00%** terhadap nilai total Kewajiban Pemerintah Umum. Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 nilai Pinjaman mengalami penurunan sebesar **-100,00%** atau sebesar **-Rp2.169.411.249,00**. Pinjaman ini merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) kepada Pemerintah

Pusat. Penurunan nilai Pinjaman didorong antara lain oleh intensifikasi program penerimaan perpajakan di daerah berhasil memberikan pendanaan tambahan sehingga Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam menjalankan kegiatan operasional.

b. Kewajiban Domestik – Utang Lainnya

Posisi Kewajiban Domestik - Utang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp7.617.855.935.459,00** atau berkontribusi sebesar **84,76%** terhadap nilai total Kewajiban Pemerintah Umum. Apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 nilai Pinjaman mengalami kenaikan sebesar **61,32%** atau sebesar **Rp 2.895.589.732.204,00**.



LAMPIRAN

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Audited)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. Pendapatan Negara dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	13.351.270.838.901
1. Pajak Dalam Negeri	13.100.954.143.901
2. Pajak Perdagangan Internasional	250.316.695.000
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.305.073.033.228
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	2.130.178.416.544
4. Pendapatan PNBPN Lainnya	1.174.894.616.684
III. Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	16.656.343.872.129
B. Belanja Negara	
I. Belanja Pemerintah Pusat	25.252.614.988.031
1. Belanja Pegawai	8.808.890.450.913
2. Belanja Barang	10.150.834.657.414
3. Belanja Modal	6.212.596.515.704
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
5. Belanja Subsidi	
6. Belanja Hibah	
7. Bantuan Sosial	80.293.364.000
8. Belanja Lain-lain	
II. Transfer ke Daerah	30.142.800.607.636
1. Dana Bagi Hasil	1.314.241.042.710
2. Dana Alokasi Umum	18.509.811.490.278
3. Dana Alokasi Khusus	7.864.091.924.801
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	2.267.961.495.723
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.596.130.429.078
c. Hibah Kepada Daerah	
4. Dana Otonomi Khusus	
5. Dana Keistimewaan DIY	
6. Dana Desa	2.051.988.955.347
7. Insentif Fiskal	402.667.194.500
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	55.395.415.595.667
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(38.739.071.723.538)
D. Pembiayaan	
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	
1. Rekening Pemerintah	
2. Pemberian Pinjaman	
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
5. Surat Berharga Negara (Neto)	
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	
6. Pinjaman dalam negeri (Neto)	
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
7. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	
8. Kewajiban Penjaminan	
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	
10. Pembiayaan Lain-lain	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	
a. Penarikan Pinjaman Tunai	
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	(38.739.071.723.538)

NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas:	
Rekening Kas BUN di BI	
Rekening Pemerintah Lainnya	
Rekening Kas di KPPN	
Kas dalam Transito	
Kas di Bendahara Pengeluaran	110.281.524
Kas di Bendahara Penerimaan	1.900.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	573.582.574.807
Kas pada Badan Layanan Umum	1.747.086.053.228
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.320.780.809.559
Uang Muka Dari Rekening BUN	
Investasi Jangka Pendek	
Investasi dalam Deposito	
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
Investasi Jangka Pendek BLU	60.000.000.000
Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Investasi Jangka Pendek	60.000.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	11.740.609.466
Uang Muka Belanja (prepayment)	53.032.174.500
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	12.515.375.765
Piutang:	
Piutang Perpajakan	1.531.751.012.652
Piutang Bukan Pajak	680.746.784.787
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	35.680.412
Piutang Penerusan Pinjaman	
Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	
Piutang dari Kegiatan BLU	173.941.529.082
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	
Piutang PFK	
Jumlah Piutang (Bruto)	2.386.475.006.933
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.073.322.746.010)
Jumlah Piutang (Bersih)	1.313.152.260.923
Persediaan	9.596.765.261.658
Persediaan yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lancar	13.367.986.491.871
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	
Dana Restrukturisasi Perbankan	
Dana Bergulir	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)	
Investasi dalam Obligasi	
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Diragukan Tertagih	
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)	
Jumlah Investasi Non Permanen	
Investasi Permanen	
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Permanen Lainnya	
Jumlah Investasi Permanen	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	
Aset Tetap	
Tanah	154.575.263.567.781
Peralatan dan Mesin	37.460.857.356.325
Gedung dan Bangunan	18.392.736.251.591

Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.982.667.334.436
Aset Tetap Lainnya	1.505.227.160.033
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.853.166.673.354
Tanah Belum Diregister	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	
Aset Konsesi Jasa	4.045.648.366.822
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	273.815.566.710.342
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(53.692.335.560.840)
Jumlah Aset Tetap	220.123.231.149.502
Properti Investasi	
Properti Investasi	326.664.793.100
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	326.664.793.100
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(20.883.979.853)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	305.780.813.247
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1.641.060.060
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
Piutang Jangka Panjang Subsidi	
Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	1.641.060.060
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(1.624.776.310)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	16.283.750
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	918.601.283.782
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	727.262.336.871
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Dana Jangka Panjang	
Aset Lain-lain	1.870.487.121.754
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Aset Lainnya yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	3.516.350.742.407
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(822.342.204.319)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(367.494.853.479)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	2.326.513.684.609
JUMLAH ASET	236.123.528.422.979
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
Utang kepada Pihak Ketiga	805.583.903.680
Utang Bunga	
Utang Subsidi	
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	
Utang Transfer	3.780.573.093
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	87.785.219.590
Pendapatan Diterima Dimuka	29.700.003.476
Pendapatan Yang Ditangguhkan	
Utang Kepada KUN	
Utang Kepada RPL	
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.346.470.766
Hibah Yg Belum Disahkan	
Uang Muka Rekening Khusus	
Uang Muka	
Uang Muka Dari KPPN	102.762.470
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	930.298.933.075
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	
Utang Jangka Panjang Subsidi	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Kewajiban Konsesi Jasa	3.373.279.646.636
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	3.373.279.646.636
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	3.373.279.646.636
JUMLAH KEWAJIBAN	4.303.578.579.711
EKUITAS	231.819.949.843.268
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	236.123.528.422.979

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
EKUITAS AWAL	226.456.546.279.417
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	226.456.546.279.417
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(8.845.033.026.810)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	292.314.569.262
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	1.231.241.230.710
Koreksi Atas Reklasifikasi	22.231.116.421
Koreksi Lain-lain	183.473.161.231
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI	1.729.260.077.624
EKUITAS	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12.479.176.513.037
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5.363.403.563.851
EKUITAS AKHIR	231.819.949.843.268

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	6.674.981.523.653
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	6.575.677.459.654
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	97.494.309.402
Pendapatan Cukai	109.432.110.000
Pendapatan Pajak Lainnya	209.318.189.609
Pendapatan Bea Masuk	215.811.814.000
Pendapatan Bea Keluar	36.096.581.000
Pendapatan Pajak Lain-lain	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	13.918.811.987.318
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Penerimaan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.091.882.591.783
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.237.483.851.540
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.329.366.443.323
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Hibah	
PENDAPATAN PENYESUAIAN	
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	30.030.076.199.636
Jumlah Pendapatan Penyesuaian	30.030.076.199.636
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	47.278.254.630.277
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	9.572.293.233.774
Beban Persediaan	1.679.835.085.976
Beban Barang dan Jasa	4.541.229.195.636
Beban Pemeliharaan	1.444.163.833.840
Beban Perjalanan Dinas	1.181.738.952.200
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.474.270.047.862
Beban Bunga	
Beban Subsidi	
Beban Hibah	
Beban Bantuan Sosial	80.470.983.785
Beban Transfer	30.030.076.199.636
Beban Lain-lain	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.058.765.308.936
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	185.920.875.695
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	56.248.763.717.340
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8.970.509.087.063)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	9.577.212.370
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	38.143.894.430
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(28.566.682.060)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	168.765.871.814
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.723.129.501
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	154.042.742.313
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	125.476.060.253
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(8.845.033.026.810)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	6.728.274.053.990
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	5.957.726.875.753
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	103.431.485.575
e. Pendapatan Cukai	109.427.110.000
f . Pendapatan Pajak Lainnya	202.094.618.583
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	250.316.695.000
Total Penerimaan Perpajakan	13.351.270.838.901
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
c. Pendapatan PNBPN Lainnya	1.165.317.404.314
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	2.130.178.416.544
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.295.495.820.858
3. Penerimaan Hibah	
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	16.646.766.659.759
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	8.808.890.450.913
2. Belanja Barang	10.150.834.657.414
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
4. Belanja Subsidi	
5. Belanja hibah	
6. Belanja Bantuan Sosial	80.293.364.000
7. Belanja Lain-lain	
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	687.370.704.000
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	606.608.711.550
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	20.261.627.160
11. Dana Alokasi Umum	18.509.811.490.278
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	2.267.961.495.723
13. Transfer Dana Otonomi Khsus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	402.667.194.500
14. Transfer Lainnya	5.596.130.429.078
15. Dana Desa	2.051.988.955.347
16. Hibah Kepada Daerah	
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	49.182.819.079.963
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	(32.536.052.420.204)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	9.577.212.370
2. Penerimaan Kembali Investasi	
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	9.577.212.370
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	6.212.596.515.704
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penyertaan Modal Negara	
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	6.212.596.515.704
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(6.203.019.303.334)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	

II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	726.344.627.460
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	726.344.627.460
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(38.012.727.096.078)
Penggunaan SAL	
Penyesuaian Pembukuan	(30.143.507.907.636)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(68.156.235.003.714)
SALDO AWAL KAS	1.023.766.753.652
SALDO AKHIR KAS	(67.132.468.250.062)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(67.132.468.250.062)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(38.739.071.723.538)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(38.739.071.723.538)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	
Total Penyesuaian SAL (A.II)	
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	(38.739.071.723.538)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
PENDAPATAN - LRA	43.576.277.343.856
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	10.837.933.969.829
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.386.653.662.223
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	418.695.051.540
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	383.352.273.796
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	2.649.232.982.270
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	32.388.621.753.814
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	27.301.742.574.453
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	2.454.656.149.847
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	2.321.681.393.214
Bantuan Keuangan - LRA	310.541.636.300
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	349.721.620.213
Pendapatan Hibah - LRA	158.898.209.937
Dana Darurat - LRA	
Pendapatan Lainnya - LRA	190.823.410.276
BELANJA	47.009.765.547.863
BELANJA OPERASI	33.124.540.705.774
Belanja Pegawai	16.392.442.439.790
Belanja Barang dan Jasa	14.976.225.138.921
Belanja Bunga	69.882.906.168
Belanja Subsidi	26.364.911.140
Belanja Hibah	1.616.754.514.076
Belanja Bantuan Sosial	42.870.795.679
BELANJA MODAL	7.532.260.145.283
Belanja Modal Tanah	31.653.950.462
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.775.770.030.326
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.261.958.561.851
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.310.229.360.466
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.204.364.188
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	
Belanja Modal Aset Lainnya	7.443.877.990
Belanja Modal BLUD	
BELANJA TAK TERDUGA	48.839.435.652
Belanja Tak Terduga	48.839.435.652
TRANSFER	6.304.125.261.154
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.388.950.617.342
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.383.850.731.275
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.099.886.067
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.915.174.643.812
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	335.767.611.022
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	3.579.407.032.790
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT LRA	(3.433.488.204.007)
PEMBIAYAAN	2.346.069.110.510
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.768.809.942.090
Penggunaan SiLPA	2.740.708.554.087
Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Pinjaman Dalam Negeri	8.000.000.000
Penerimaan Kembali Piutang	96.747.003
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	4.641.000
Pinjaman Luar Negeri	
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	422.740.831.580
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	27.576.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	380.164.831.580
Pemberian Pinjaman Daerah	
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(1.087.419.093.497)
--	---------------------

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023
ASET	125.667.065.395.729
ASET LANCAR	4.220.561.001.488
Kas dan Setara Kas	1.750.361.516.135
Investasi Jangka Pendek	10.000.000.000
Piutang Pendapatan	2.522.947.048.320
Piutang Lainnya	89.566.334.203
Penyisihan Piutang	(910.738.156.372)
Beban Dibayar Dimuka	14.815.956.601
Persediaan	743.608.302.601
Aset Untuk Dikonsolidasikan	
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.595.779.005.744
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	8.647.300.021
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.587.131.705.723
ASET TETAP	114.136.424.078.432
Tanah	55.339.788.320.342
Peralatan dan Mesin	20.257.979.001.060
Gedung dan Bangunan	34.039.380.955.191
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	66.926.480.322.085
Aset Tetap Lainnya	2.063.863.487.854
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.226.102.301.788
Akumulasi Penyusutan	(66.717.170.309.888)
DANA CADANGAN	855.483.846
Dana Cadangan	855.483.846
ASET LAINNYA	2.713.445.826.219
Tagihan Jangka Panjang	50.480.710.399
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	367.273.106.818
Aset Tidak Berwujud	(283.469.700.725)
Aset Lain-lain	2.579.161.709.727
KEWAJIBAN	5.463.284.327.073
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.763.971.973.689
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.821.811.920
Utang Bunga	12.269.580.127
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	449.694.617.941
Pendapatan Diterima Dimuka	58.997.272.959
Utang Belanja	2.990.811.738.238
Utang Jangka Pendek Lainnya	250.376.952.504
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.699.312.353.384
Utang Dalam Negeri	1.488.659.405.296
Utang Jangka Panjang Lainnya	210.652.948.088
EKUITAS	120.203.781.068.656

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
EKUITAS AWAL	
Surplus/Defisit-LO	2.536.507.878.749
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Lainnya	
JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.536.507.878.749

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
PENDAPATAN - LO	44.628.946.274.484
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	11.226.652.242.754
Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.508.715.594.944
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	434.600.371.928
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	571.050.434.702
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2.712.285.841.180
PENDAPATAN TRANSFER - LO	30.546.191.299.989
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	27.367.612.639.852
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	619.175.637.500
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.190.481.238.123
Bantuan Keuangan - LO	368.921.784.514
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	2.856.102.731.741
Pendapatan Hibah - LO	2.662.138.601.179
Dana Darurat - LO	
Pendapatan Lainnya - LO	193.964.130.562
BEBAN	41.994.647.533.526
BEBAN OPERASI - LO	37.568.334.790.901
Beban Pegawai - LO	16.493.218.620.306
Beban Barang dan Jasa	12.754.163.612.830
Beban Bunga	57.076.560.226
Beban Subsidi	22.410.349.680
Beban Hibah	2.065.960.136.099
Beban Bantuan Sosial	35.120.886.679
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.908.901.531.758
Beban Penyisihan Piutang	134.100.300.698
Beban Lain-lain	97.382.792.625
BEBAN TRANSFER	4.426.312.742.625
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.213.682.524.646
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.004.669.115
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	452.058.686.522
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.751.607.090.653
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	3.959.771.689
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	2.634.298.740.958
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	18.533.190.406
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	16.547.087.983
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.986.102.423
DEFISIT NON OPERASIONAL	111.494.125.414
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	35.892.994.334
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	1.198.250.002
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	74.402.881.078
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(92.960.935.008)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2.541.337.805.950
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	18.142.344.284
Pendapatan Luar Biasa - LO	18.142.344.284
BEBAN LUAR BIASA	22.972.271.485
Beban Luar Biasa	22.972.271.485
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	(4.829.927.201)
SURPLUS/DEFISIT-LO	2.536.507.878.749

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	(7.386.653.662.223)
Penerimaan Retribusi Daerah	(418.695.051.540)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(383.352.273.796)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(2.649.232.982.270)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(671.987.941.863)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(444.195.729.650)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(18.510.950.842.190)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(7.674.608.060.750)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	
Penerimaan Dana Penyesuaian	(73.734.414.000)
Penerimaan Hibah	(156.838.544.765)
Penerimaan Dana Darurat	
Penerimaan Lainnya	(190.823.410.276)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
Jumlah Arus Masuk Kas	(38.561.072.913.323)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	16.392.442.439.790
Pembayaran Barang	11.103.629.136.546
Pembayaran Bunga	69.882.906.168
Pembayaran Subsidi	26.364.911.140
Pembayaran Beban Hibah	1.616.754.514.076
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	42.870.795.679
Pembayaran Tak Terduga	48.839.435.652
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.383.850.731.275
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	5.099.886.067
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	5.099.886.067
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
Jumlah Arus Keluar Kas	31.694.834.642.460
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(70.255.907.555.783)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	(20.000.000.000)
Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan Aset Tetap Lainnya	
Penjualan Aset Lainnya	

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Masuk Kas	(20.000.000.000)
Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000
Perolehan Tanah	26.007.590.980
Perolehan Peralatan dan Mesin	1.369.556.714.449
Perolehan Gedung dan Bangunan	2.017.761.785.455
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.137.912.286.962
Perolehan Aset Tetap Lainnya	131.469.574.871
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.000.000.000
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	6.708.707.952.717
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(6.728.707.952.717)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(21.083.332)
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Masuk Kas	(21.083.332)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	90.215.923.460
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	289.948.908.120
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Keluar Kas	380.164.831.580
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(380.185.914.912)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	(77.364.801.423.412)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
Saldo Akhir Kas	(77.364.801.423.412)

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Audited) DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Sub Total	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
Sub Total	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4)	
Lain-lain	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

LAMPIRAN I
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1110100- Kas di Kas Daerah	0	1.385.340.413.216	1.385.340.413.216
1110200- Kas di Bendahara Penerimaan	0	3.148.959.761	3.148.959.761
1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.167.502.746	8.167.502.746
1110400- Kas di BLUD	0	287.927.963.845	287.927.963.845
1110500- Kas Lainnya	0	65.776.676.567	65.776.676.567
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	8.532.000	(1.802.946)	6.729.054
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	196.992.940	(93.440.470)	103.552.470
111711- Kas di Bendahara Penerimaan	81.064.953	(79.164.953)	1.900.000
111819- Setara Kas lainnya	15.000.000.000	(15.000.000.000)	0
111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	638.194.861	(520.195.257)	117.999.604
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	0	477.530.366.671	477.530.366.671
111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	7.932.551.160	(6.348.823.377)	1.583.727.783
111826- Kas Lainnya di BLU	48.178.385.685	46.172.095.064	94.350.480.749
111911- Kas dan Bank - BLU	1.831.928.639.859	(90.009.632.377)	1.741.919.007.482
111929- Setara kas Lainnya - BLU	60.604.867.445	(55.437.821.699)	5.167.045.746
1120200- Investasi dalam Deposito	0	10.000.000.000	10.000.000.000
1130100- Piutang Pajak Daerah	0	1.284.056.304.251	1.284.056.304.251
1130200- Piutang Retribusi	0	119.233.321.497	119.233.321.497
1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	77.843.688.343	77.843.688.343
1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	297.320.119.920	297.320.119.920
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	46.848.279.379	46.848.279.379
1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	586.006.265.173	586.006.265.173
1130800- Piutang Pendapatan Lainnya	0	111.639.069.757	111.639.069.757
113311- Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	155.000.000.000	(95.000.000.000)	60.000.000.000
1140100- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	3.270.912.521	3.270.912.521
1140200- Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	57.141.726	57.141.726
1140300- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	39.331.715.159	39.331.715.159
1140400- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	22.366.351.817	22.366.351.817
1140500- Uang Muka	0	13.629.194.314	13.629.194.314
114111- Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	31.814.233	(13.199.778)	18.614.455
114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	23.732.282.865	(12.010.287.854)	11.721.995.011
114115- Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	14.482.668.184	(14.482.668.184)	0
114211- uang muka belanja pegawai (prepayment)	2.125.140	(2.125.140)	0
114213- uang muka belanja modal (prepayment)	84.515.992.184	(31.483.817.684)	53.032.174.500
114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	15.881.617.019	(3.366.241.254)	12.515.375.765
114ZZZZ- Piutang Lainnya (BAS Level 4)	0	10.911.018.666	10.911.018.666
1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan	0	(790.280.776.303)	(790.280.776.303)
1150200- Penyisihan Piutang Lainnya	0	(120.457.380.069)	(120.457.380.069)
115111- Piutang PPh Minyak Bumi	930.037.527	31.896.007	961.933.534
115121- Piutang PPh Pasal 21	37.120.373.407	1.806.531.449	38.926.904.856
115122- Piutang PPh Pasal 22	4.883.749.245	(1.469.777.530)	3.413.971.715
115123- Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.726.000	49.129.000	51.855.000
115124- Piutang PPh Pasal 23	26.266.020.787	1.933.715.618	28.199.736.405
115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	76.881.159.081	(14.411.143.707)	62.470.015.374
115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	390.592.969.132	81.984.242.048	472.577.211.180
115127- Piutang PPh Pasal 26	3.566.711.498	550.760.440	4.117.471.938
115128- Piutang PPh Final	101.404.414.822	(11.584.743.234)	89.819.671.588
115131- Piutang PPN Dalam Negeri	623.401.469.501	86.125.281.169	709.526.750.670
115132- Piutang PPN Impor	671.032.051	3.030.777	674.062.828
115153- Piutang PBB Perkebunan	34.480.288.751	8.838.417.291	43.318.706.042
115154- Piutang PBB Perhutanan	446.513.008	261.890.982	708.403.990
115155- Piutang PBB Pertambangan	5.076.210.679	3.637.497.973	8.713.708.652
115159- Piutang PBB Lainnya	723.816	106.423.070	107.146.886
115164- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	5.000.000	5.000.000
115165- Piutang Bea Materai	75.348.000	(75.348.000)	0
115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh	31.333.083.420	3.901.343.988	35.234.427.408
115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN	42.176.681.026	(12.893.838.360)	29.282.842.666
115181- Piutang Bea masuk	27.626.000	1.559.573.000	1.587.199.000
115183- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.286.806.000	23.599.000	1.310.405.000
115184- Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	646.199.000	0	646.199.000
115185- Piutang Pajak/pungutan ekspor	60.227.000	413.000	60.640.000
115187- Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	28.633.920	0	28.633.920
115193- Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	8.115.000	8.115.000

115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	401.414.445.259	26.272.832.992	427.687.278.251
115212- Piutang Lainnya	11.784.216.386	1.774.029.663	13.558.246.049
115231- Piutang Transfer Dana Perimbangan	(3.333.785.064)	242.835.045.551	239.501.260.487
115239- Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	4.584.484.351	(4.584.484.351)	0
115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	29.934.828	5.745.584	35.680.412
115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	101.366.526.752	66.336.130.862	167.702.657.614
115712- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	321.305.000	456.456.000	777.761.000
115719- Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	2.135.000.000	712.444.000	2.847.444.000
115741- Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	235.656.980	148.787.020	384.444.000
115812- Piutang Sewa Gedung - BLU	0	49.300.000	49.300.000
115813- Piutang Sewa Ruangan - BLU	0	31.000.000	31.000.000
115891- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	685.108.617	1.463.813.851	2.148.922.468
1160100- Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0	81.498.430	81.498.430
1160200- Beban Barang Dibayar Dimuka	0	5.055.021.228	5.055.021.228
1160300- Beban Jasa Dibayar Dimuka	0	6.392.939.768	6.392.939.768
1160400- Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0	254.110.580	254.110.580
1160500- Beban Lainnya	0	3.032.386.595	3.032.386.595
116111- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Migas	(93.003.753)	(297.443.180)	(390.446.933)
116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas	(284.754.376.318)	(26.607.792.809)	(311.362.169.127)
116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN	(351.597.403.922)	(1.897.428.353)	(353.494.832.275)
116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(24.192.646.029)	2.538.806.827	(21.653.839.202)
116116- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai	0	(25.000)	(25.000)
116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	(51.260.022.085)	17.126.587.919	(34.133.434.166)
116118- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(2.012.054.050)	(7.958.500)	(2.020.012.550)
116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	(308.867.513.443)	(13.442.206.144)	(322.309.719.587)
116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(3.685.201.573)	(7.226.157.922)	(10.911.359.495)
116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(149.674)	(28.331.503)	(28.481.177)
116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(15.929.938.513)	(979.174.423)	(16.909.112.936)
116612- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(158.215.740)	84.481.855	(73.733.885)
116619- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	(22.511.345)	(22.511.345)
116641- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	(1.178.285)	(743.935)	(1.922.220)
116712- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	0	(246.500)	(246.500)
116713- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	(155.000)	(155.000)
116791- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(3.425.544)	(7.319.068)	(10.744.612)
1170100- Persediaan Bahan Pakai Habis	0	506.020.016.538	506.020.016.538
1170200- Persediaan Bahan/Material	0	66.107.756.885	66.107.756.885
1170300- Persediaan Barang Lainnya	0	171.480.529.178	171.480.529.178
117111- Barang Konsumsi	332.515.684.498	53.522.314.642	386.037.999.140
117112- Amunisi	1.000.277.664.612	(43.398.070.332)	956.879.594.280
117113- Bahan untuk Pemeliharaan	3.050.654.353	2.230.198.877	5.280.853.230
117114- Suku Cadang	3.391.053.172.117	739.405.804.918	4.130.458.977.035
117121- Pita Cukai, Materai dan Leges	12.767.000	(12.767.000)	0
117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	308.568.417.726	104.455.643.452	413.024.061.178
117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2.533.481.743	(428.135.174)	2.105.346.569
117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	45.625.211.008	(1.206.148.393)	44.419.062.615
117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.507.566.923.998	378.629.725.894	2.886.196.649.892
117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	60.976.131.633	13.799.002.301	74.775.133.934

Masyarakat			
117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.839.416.100	(43.400.000)	1.796.016.100
117128- Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	9.382.080.802	4.643.716.468	14.025.797.270
117129- Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	246.018.362.475	257.398.559.152	503.416.921.627
117131- Bahan Baku	44.301.282.715	6.082.758.506	50.384.041.221
117141- Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	2.740.814.116	(84.035.785)	2.656.778.331
117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.402.299.850	9.655.531.360	12.057.831.210
117199- Persediaan Lainnya	141.307.007.097	(28.056.809.071)	113.250.198.026
1210100- Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	6.000.000.000	6.000.000.000
1210400- Dana Bergulir	0	23.069.547.654	23.069.547.654
1210600- Investasi Non Permanen Lainnya	0	2.647.300.021	2.647.300.021
1210700- Cadangan Dana Bergulir	0	(23.069.547.654)	(23.069.547.654)
1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	4.567.958.319.180	4.567.958.319.180
1220200- Investasi Permanen Lainnya	0	19.173.386.543	19.173.386.543
1310100- Tanah Perkampungan	0	56.180.117.473	56.180.117.473
1310200- Tanah Pertanian	0	1.979.067.837	1.979.067.837
1310300- Tanah Perkebunan	0	224.793.201.850	224.793.201.850
1310400- Kebun Campuran	0	2.809.680.000	2.809.680.000
1310500- Hutan	0	9.428.800	9.428.800
1310600- Kolam Ikan	0	648.667.000	648.667.000
1310700- Danau/Rawa	0	99.251.761.733	99.251.761.733
1310800- Tanah Tandus/Rusak	0	281.760.797.661	281.760.797.661
1310900- Alang-alang dan Padang Rumput	0	1.317.724.500	1.317.724.500
1311000- Tanah Pengguna Lain	0	4.148.916.394.629	4.148.916.394.629
1311100- Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	7.355.196.629.535	7.355.196.629.535
131111- Tanah	153.387.255.073.421	1.188.008.494.360	154.575.263.567.781
1311300- Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	7.962.888.299.666	7.962.888.299.666
131ZZZZ- Tanah (BAS Level 4)	0	35.204.036.549.658	35.204.036.549.658
1320100- Alat-Alat Besar Darat	0	398.632.075.084	398.632.075.084
1320300- Alat-alat Bantu	0	61.270.127.045	61.270.127.045
1320400- Alat Angkutan Darat Bermotor	0	1.729.631.938.308	1.729.631.938.308
1320500- Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	0	293.453.580	293.453.580
1320600- Alat Angkut Apung Bermotor	0	568.906.000	568.906.000
1320700- Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	150.880.000	150.880.000
1320900- Alat Bengkel Bermesin	0	120.171.118.645	120.171.118.645
1321000- Alat Bengkel Tak Bermesin	0	5.148.876.832	5.148.876.832
1321100- Alat Ukur	0	4.661.431.026	4.661.431.026
132111- Peralatan dan Mesin	35.337.676.256.801	2.123.181.099.524	37.460.857.356.325
1321200- Alat Pengolahan	0	29.347.094.824	29.347.094.824
1321300- Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0	77.743.679.662	77.743.679.662
1321400- Alat Kantor	0	2.110.618.441.705	2.110.618.441.705
1321500- Alat Rumah Tangga	0	212.398.929.386	212.398.929.386
1321600- Komputer	0	1.496.471.660.325	1.496.471.660.325
1321700- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	106.693.307.428	106.693.307.428
1321800- Alat Studio	0	258.676.053.004	258.676.053.004
1321900- Alat Komunikasi	0	37.428.325.165	37.428.325.165
1322000- Peralatan Pemancar	0	799.045.389	799.045.389
1322100- Alat Kedokteran	0	3.001.728.484.957	3.001.728.484.957
1322200- Alat Kesehatan	0	92.631.168.636	92.631.168.636
1322300- Unit-Unit Laboratorium	0	1.500.458.954.077	1.500.458.954.077
1322400- Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	74.229.068.633	74.229.068.633
1322500- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	1.210.319.281	1.210.319.281
1322600- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	2.692.479.679	2.692.479.679
1322700- Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0	22.640.197.301	22.640.197.301
1322800- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0	48.510.000	48.510.000
1322900- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	2.025.820.200	2.025.820.200
1323000- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	20.755.177.843	20.755.177.843
1323100- Senjata Api	0	7.080.443.250	7.080.443.250
1323200- Persenjataan Non Senjata Api	0	617.536.283	617.536.283
1323500- Alat Keamanan dan Perlindungan	0	46.578.059.458	46.578.059.458
132ZZZZ- Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	8.834.577.438.054	8.834.577.438.054
1330100- Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	20.398.218.230.567	20.398.218.230.567
1330200- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	554.600.646.830	554.600.646.830
1330300- Bangunan Menara	0	11.461.901.425	11.461.901.425
1330400- Bangunan Bersejarah	0	5.054.016.946	5.054.016.946
1330500- Tugu Peringatan	0	26.992.007.203	26.992.007.203
1330700- Monumen/Bangunan Bersejarah	0	61.295.852.788	61.295.852.788

1330800- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	416.457.128.484	416.457.128.484
1330900- Rambu-Rambu	0	60.000.000	60.000.000
133111- Gedung dan Bangunan	17.319.812.628.271	1.072.923.623.320	18.392.736.251.591
133ZZZZ- Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	12.565.241.170.948	12.565.241.170.948
1340100- Jalan	0	25.278.702.071.117	25.278.702.071.117
1340200- Jembatan	0	4.231.512.589.078	4.231.512.589.078
1340300- Bangunan Air Irigasi	0	2.671.768.620.763	2.671.768.620.763
1340400- Bangunan Air Pasang Surut	0	18.644.204.846	18.644.204.846
1340500- Bangunan Air Rawa	0	24.713.549.083	24.713.549.083
1340600- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	721.637.490.883	721.637.490.883
1340700- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	54.197.907.156	54.197.907.156
1340800- Bangunan Air Bersih/Baku	0	189.464.975.668	189.464.975.668
1340900- Bangunan Air Kotor	0	95.609.562.418	95.609.562.418
1341000- Bangunan Air	0	1.256.723.144.529	1.256.723.144.529
1341100- Instalasi Air Minum Bersih	0	234.203.400.393	234.203.400.393
134111- Jalan dan Jembatan	20.711.204.384.771	862.134.253.325	21.573.338.638.096
134112- Irigasi	25.548.373.382.121	641.126.526.317	26.189.499.908.438
134113- Jaringan	1.217.658.437.476	2.170.350.426	1.219.828.787.902
1341200- Instalasi Air Kotor	0	43.376.262.452	43.376.262.452
1341300- Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	0	8.048.430.634	8.048.430.634
1341400- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	979.029.026	979.029.026
1341500- Instalasi Pembangkit Listrik	0	83.513.694.359	83.513.694.359
1341600- Instalasi Gardu Listrik	0	50.289.837.342	50.289.837.342
1341700- Instalasi Pertahanan	0	1.393.138.600	1.393.138.600
1341800- Instalasi Gas	0	3.722.087.818	3.722.087.818
1341900- Instalasi Pengaman	0	19.089.320.776	19.089.320.776
1342000- Jaringan Air Minum	0	391.134.910.410	391.134.910.410
1342100- Jaringan Listrik	0	114.564.884.368	114.564.884.368
1342200- Jaringan Telepon	0	7.468.399.588	7.468.399.588
1342300- Jaringan Gas	0	6.489.941.360	6.489.941.360
134ZZZZ- Jalan, Irigasi, dan Jaringan (BAS Level 4)	0	31.419.232.869.418	31.419.232.869.418
1350100- Buku	0	66.716.333.245	66.716.333.245
1350300- Barang-Barang Perpustakaan	0	926.164.058.360	926.164.058.360
1350400- Barang Bercorak Kebudayaan	0	22.281.898.564	22.281.898.564
1350500- Alat Olah Raga Lainnya	0	123.551.955	123.551.955
1350600- Hewan	0	7.286.714.807	7.286.714.807
1350700- Tanaman	0	21.963.578.463	21.963.578.463
1350800- Aset Tetap Renovasi	0	100.836.262.019	100.836.262.019
135111- Aset Tetap Renovasi	1.188.206.786.054	(80.398.809.663)	1.107.807.976.391
135121- Aset Tetap Lainnya	395.222.388.341	2.196.795.301	397.419.183.642
135ZZZZ- Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	918.491.090.441	918.491.090.441
1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	2.226.102.301.788	2.226.102.301.788
136111- Konstruksi Dalam pengerjaan	6.478.367.722.320	2.374.798.951.034	8.853.166.673.354
1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(15.019.072.636.044)	(15.019.072.636.044)
1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(9.393.916.048.216)	(9.393.916.048.216)
1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0	(42.203.702.301.769)	(42.203.702.301.769)
1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	(100.479.323.859)	(100.479.323.859)
137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.329.098.515.976)	(2.893.959.105.372)	(28.223.057.621.348)
137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.205.296.408.033)	(599.972.736.798)	(3.805.269.144.831)
137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(12.106.217.689.051)	(1.240.560.623.805)	(13.346.778.312.856)
137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi	(6.037.148.666.504)	(1.035.308.880.216)	(7.072.457.546.720)
137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan	(435.192.496.692)	(28.399.626.021)	(463.592.122.713)
137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(490.391.686.045)	(71.329.826.832)	(561.721.512.877)
138111- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	495.130.654.528	495.130.654.528
138121- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	2.560.771.881.005	989.745.831.289	3.550.517.712.294
138211- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	(32.702.431.251)	(32.702.431.251)
138221- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(69.174.823.287)	(117.582.044.957)	(186.756.868.244)
138311- Properti Investasi	699.830.116	325.964.962.984	326.664.793.100
138411- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(20.994.903)	(20.862.984.950)	(20.883.979.853)
1410100- Dana Cadangan	0	855.483.846	855.483.846
1510100- Tagihan Penjualan Angsuran	0	1.609.350.400	1.609.350.400
1510200- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	48.069.394.731	48.069.394.731
151ZZZZ- Tagihan Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	801.965.268	801.965.268
1520100- Sewa	0	371.981.500	371.981.500
1520200- Kerjasama Pemanfaatan	0	297.998.172.266	297.998.172.266
1520300- Bangun guna serah	0	68.902.953.052	68.902.953.052

152111- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1.663.523.415	(22.463.355)	1.641.060.060
1530200- Lisensi dan frenchise	0	23.039.646.686	23.039.646.686
1530300- Hak Cipta	0	79.901.775.758	79.901.775.758
1530400- Paten	0	1.933.874.310	1.933.874.310
1530500- Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	73.823.274.371	73.823.274.371
1530600- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	(597.224.777.555)	(597.224.777.555)
153ZZZZ- Aset Tidak Berwujud (BAS Level 4)	0	135.056.505.705	135.056.505.705
1540100- Aset Lain-lain	0	2.579.161.709.727	2.579.161.709.727
156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(1.626.977.789)	2.201.479	(1.624.776.310)
161111- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	220.749.497.528	(220.749.497.528)	0
162121- Hak Cipta	25.000.000	0	25.000.000
162141- Paten	692.438.265	0	692.438.265
162151- Software	188.933.989.913	363.434.318.603	552.368.308.516
162161- Lisensi	9.941.490.482	21.853.284.027	31.794.774.509
162171- Hasil Kajian/Penelitian	76.372.243.517	(2.599.749.828)	73.772.493.689
162191- Aset Tak Berwujud Lainnya	292.049.804.024	(39.425.254.709)	252.624.549.315
162311- Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	2.274.483.000	5.049.236.488	7.323.719.488
163119- Dana lainnya	1.473.046.935	(460.094.108)	1.012.952.827
163139- Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	726.249.384.044	726.249.384.044
166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.968.569.266.572	(184.212.284.120)	1.784.356.982.452
166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.686.189.977	16.115.490.325	18.801.680.302
166114- BMN Dalam Proses PMPP	0	67.328.459.000	67.328.459.000
169111- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	(28.399.819.399)	28.399.819.399	0
169121- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	(23.564.960.650)	(23.564.960.650)
169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(955.669.492.726)	156.892.249.057	(798.777.243.669)
169312- Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(3.928.565)	(357.142)	(4.285.707)
169314- Akumulasi Amortisasi Paten	(386.330.004)	(43.376.827)	(429.706.831)
169315- Akumulasi Amortisasi Software	(143.763.473.765)	(167.491.255.498)	(311.254.729.263)
169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi	(7.504.301.951)	(5.808.426.712)	(13.312.728.663)
169317- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(37.172.602.731)	(4.323.683.147)	(41.496.285.878)
169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(1.159.177.152)	162.060.015	(997.117.137)
2110200- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0	(34.007.683)	(34.007.683)
2110300- Utang PPh Pusat	0	(116.776.744)	(116.776.744)
2110400- Utang PPN Pusat	0	(290.067.737)	(290.067.737)
2110700- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0	(89.829.637)	(89.829.637)
211116- Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggota Polri/PNS Polri	(26.413.424.000)	0	(26.413.424.000)
211166- Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	26.413.424.000	0	26.413.424.000
211ZZZZ- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (BAS Level 4)	0	(1.291.130.119)	(1.291.130.119)
2120100- Utang Bunga kepada Pemerintah	0	(915.970.447)	(915.970.447)
2120300- Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	0	(9.200.039.953)	(9.200.039.953)
2120400- Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(667.664.313)	(667.664.313)
212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(38.319.270.536)	(49.018.295.313)	(87.337.565.849)
212112- Belanja barang yang masih harus dibayar	(14.451.035.365)	(7.058.128.462)	(21.509.163.827)
212113- Belanja modal yang masih harus dibayar	(29.689.126.187)	(23.050.940.529)	(52.740.066.716)
212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(122.986.575.708)	54.966.014.572	(68.020.561.136)
212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(5.034.383.860)	(519.199.538.318)	(524.233.922.178)
212192- Dana Pihak Ketiga	(5.728.856.213)	3.135.021.268	(2.593.834.945)
212193- Dana Pihak Ketiga BLU	(20.987.196.549)	(28.161.592.480)	(49.148.789.029)
212ZZZZ- Utang Bunga (BAS Level 4)	0	(1.485.905.414)	(1.485.905.414)
2130200- Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(267.051.438.390)	(267.051.438.390)
2130300- Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	0	(138.245.817.615)	(138.245.817.615)
2130500- Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0	(7.785.000)	(7.785.000)
213ZZZZ- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	(44.389.576.936)	(44.389.576.936)
2140100- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0	(1.279.031.475)	(1.279.031.475)
2140200- Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0	(31.500.000)	(31.500.000)
2140400- Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0	(55.732.477.271)	(55.732.477.271)

214ZZZZ- Pendapatan Diterima Dimuka (BAS Level 4)	0	(1.954.264.213)	(1.954.264.213)
2150100- Utang Belanja Pegawai	0	(238.259.592.038)	(238.259.592.038)
2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa	0	(820.113.505.134)	(820.113.505.134)
2150300- Utang Belanja Modal	0	(873.811.366.940)	(873.811.366.940)
2150400- Utang Belanja Subsidi	0	(7.461.358.339)	(7.461.358.339)
2150500- Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	(676.806.542.494)	(676.806.542.494)
2150600- Utang Belanja Lain-lain	0	(73.004.173.807)	(73.004.173.807)
215111- Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	0	(3.780.573.093)	(3.780.573.093)
215ZZZZ- Utang Belanja (BAS Level 4)	0	(301.355.199.486)	(301.355.199.486)
2160500- Utang Jangka Pendek Lainnya	0	(250.376.952.504)	(250.376.952.504)
219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	(1.912.132.237)	(48.167.217.427)	(50.079.349.664)
219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	(7.916.986.913)	(29.788.883.013)	(37.705.869.926)
219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(3.726.793.451)	193.186.793	(3.533.606.658)
219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	(66.406.436.104)	49.783.707.092	(16.622.729.012)
219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU	(38.526.656.727)	28.982.988.921	(9.543.667.806)
219511- Uang Muka dari KPPN	(102.762.470)	0	(102.762.470)
219913- Utang Jangka Pendek Lain-lain	(4.175.582.698)	835.010.814	(3.340.571.884)
219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	(5.898.882)	0	(5.898.882)
2210200- Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(1.216.740.493.612)	(1.216.740.493.612)
2210400- Utang Pemerintah Pusat	0	(271.918.911.684)	(271.918.911.684)
2220100- Utang Jangka Panjang Lainnya	0	(210.652.948.088)	(210.652.948.088)
226112- Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pembayaran Kepada Mitra	0	(949.118.775.179)	(949.118.775.179)
226113- Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra	(2.462.350.254.657)	38.189.383.200	(2.424.160.871.457)
3110100- Ekuitas	0	(120.565.112.056.113)	(120.565.112.056.113)
311111- SAL	21.567.658.269.502	0	21.567.658.269.502
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(21.577.166.450.268)	(52.930.961.408.985)	(74.508.127.859.253)
313121- Diterima dari Entitas Lain	4.242.511.213	14.861.171.637.456	14.865.414.148.669
313211- Transfer Keluar	0	4.418.109.414.231	4.418.109.414.231
313221- Transfer Masuk	0	(8.254.500.056.992)	(8.254.500.056.992)
391111- Ekuitas	(225.431.426.064.008)	30.030.076.199.636	(195.401.349.864.372)
391113- Koreksi Nilai Persediaan	0	(292.314.569.262)	(292.314.569.262)
391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(1.234.336.101.265)	(1.234.336.101.265)
391118- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	3.094.870.555	3.094.870.555
391119- Koreksi Lainnya	4.014.970.266	(184.842.013.860)	(180.827.043.594)
391121- Ekuitas Transaksi Lainnya	0	1.368.852.629	1.368.852.629
391131- Pengesahan Hibah Langsung	0	(568.424.908.497)	(568.424.908.497)
391133- Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(34.647.389.886)	(34.647.389.886)
391151- Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	(22.231.116.421)	(22.231.116.421)
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BP KL	(102.762.470)	0	(102.762.470)
399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BLU KL	(1.023.766.753.652)	0	(1.023.766.753.652)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(45.510.808)	(45.510.808)
411112- Pendapatan PPh Gas Bumi	0	(93.242)	(93.242)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(1.493.465)	(1.493.465)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(2.678.513.799.616)	(2.678.513.799.616)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(293.921.639.752)	(293.921.639.752)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(127.392.387.575)	(127.392.387.575)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(532.005.635.259)	(532.005.635.259)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(161.407.348.105)	(161.407.348.105)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.688.903.129.437)	(1.688.903.129.437)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(15.778.721.248)	(15.778.721.248)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(1.170.651.228.025)	(1.170.651.228.025)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(258.672.598)	(258.672.598)
411141- Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	(4.789.611.653)	(4.789.611.653)
411148- Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	(1.312.252.870)	(1.312.252.870)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(6.000.992.007.020)	(6.000.992.007.020)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(529.798.872.575)	(529.798.872.575)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(919.299.745)	(919.299.745)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(24.757.719.388)	(24.757.719.388)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(67.362.766)	(67.362.766)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(5.979.093)	(5.979.093)
411241- Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	0	(19.136.219.067)	(19.136.219.067)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(26.079.232.932)	(26.079.232.932)

411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(2.553.984.783)	(2.553.984.783)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(68.154.622.639)	(68.154.622.639)
411316- Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	(1.190.336.214)	(1.190.336.214)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	483.867.166	483.867.166
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(100.869.029.000)	(100.869.029.000)
411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	0	(7.029.000.000)	(7.029.000.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(1.435.266.000)	(1.435.266.000)
411519- Pendapatan Cukai Lainnya	0	(98.815.000)	(98.815.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(3.468.937.686)	(3.468.937.686)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	(147.494.070.915)	(147.494.070.915)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(26.867.910)	(26.867.910)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(38.833.071.527)	(38.833.071.527)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(19.487.949.784)	(19.487.949.784)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(185.193.004.000)	(185.193.004.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(4.703.294.000)	(4.703.294.000)
412119- Pendapatan Pabean Lainnya	0	(111.000)	(111.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(583.827.000)	(583.827.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(25.331.578.000)	(25.331.578.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(36.096.581.000)	(36.096.581.000)
419999- Pendapatan Pajak lain-lain	0	(7.291.787)	(7.291.787)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(1.168.072.744.409)	(1.168.072.744.409)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(913.215.792.163)	(913.215.792.163)
424113- Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	(8.279.501.565)	(8.279.501.565)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(6.641.286.140)	(6.641.286.140)
424231- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa	0	(1.278.974.846)	(1.278.974.846)
424241- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	0	(220.000.000)	(220.000.000)
424242- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	0	(2.621.856.971)	(2.621.856.971)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(202.142.158)	(202.142.158)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(29.162.230.898)	(29.162.230.898)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(4.271.700.609)	(4.271.700.609)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(39.721.091.466)	(39.721.091.466)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(5.903.625.500)	(5.903.625.500)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(32.491.881.071)	(32.491.881.071)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(50.667.799)	(50.667.799)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(14.647.346.192)	(14.647.346.192)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(253.483.423)	(253.483.423)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(2.245.154.725)	(2.245.154.725)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(6.675.852.049)	(6.675.852.049)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(1.047.830.000)	(1.047.830.000)
424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	(27.240.000)	(27.240.000)
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	(504.117.355)	(504.117.355)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(3.880.135.670)	(3.880.135.670)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(234.014.600)	(234.014.600)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(470.239.042)	(470.239.042)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(6.518.846.286)	(6.518.846.286)
425124- Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	0	(2.518.000)	(2.518.000)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(2.585.609.042)	(2.585.609.042)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(16.168.859.761)	(16.168.859.761)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(48.177.476)	(48.177.476)
425133- Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	(604.413.419)	(604.413.419)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan	0	(2.795.067.517)	(2.795.067.517)

Bangunan			
425139- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	(2.608.200)	(2.608.200)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(2.979.573.024)	(2.979.573.024)
425211- Pendapatan Paspor	0	(58.732.800.000)	(58.732.800.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.725.500.000)	(1.725.500.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(6.857.150.000)	(6.857.150.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(2.816.400.000)	(2.816.400.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(177.697.435)	(177.697.435)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(11.720.000)	(11.720.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(129.960.000)	(129.960.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(948.768.000)	(948.768.000)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(1.264.106.410)	(1.264.106.410)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(6.465.855.800)	(6.465.855.800)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(600.750.000)	(600.750.000)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(2.059.620.237)	(2.059.620.237)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(5.911.784.000)	(5.911.784.000)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(80.750.000)	(80.750.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(44.430.037.879)	(44.430.037.879)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(850.000.000)	(850.000.000)
425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	(626.419.501)	(626.419.501)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(516.448.600)	(516.448.600)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(19.250.000)	(19.250.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(1.744.119.529)	(1.744.119.529)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(18.328.880.000)	(18.328.880.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(15.365.505.000)	(15.365.505.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(78.545.600.000)	(78.545.600.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(939.580.000)	(939.580.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(70.367.400.000)	(70.367.400.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(42.218.700.000)	(42.218.700.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(1.120.850.000)	(1.120.850.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.496.200.000)	(1.496.200.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(16.245.000.000)	(16.245.000.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(7.564.920.000)	(7.564.920.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(6.738.600.000)	(6.738.600.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(798.235.000)	(798.235.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(10.589.742.488)	(10.589.742.488)
425282- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(12.909.500)	(12.909.500)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(7.150.775.722)	(7.150.775.722)
425284- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	0	(486.520.000)	(486.520.000)
425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	(11.176.828.000)	(11.176.828.000)
425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	0	(2.342.174.000)	(2.342.174.000)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(9.882.225.284)	(9.882.225.284)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(24.280.839.795)	(24.280.839.795)

425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(149.846.016.406)	(149.846.016.406)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(18.431.509.279)	(18.431.509.279)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.245.405.000)	(1.245.405.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(1.503.105.000)	(1.503.105.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(904.920.000)	(904.920.000)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(6.131.544.491)	(6.131.544.491)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(41.255.000)	(41.255.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(112.071.174.301)	(112.071.174.301)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(28.582.200.000)	(28.582.200.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(2.919.854.445)	(2.919.854.445)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(1.073.807.500)	(1.073.807.500)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(93.795.767.650)	(93.795.767.650)
425413- Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	0	(13.542.000)	(13.542.000)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(2.520.991.600)	(2.520.991.600)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(22.572.440.159)	(22.572.440.159)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(492.615.000)	(492.615.000)
425431- Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	0	(10.505.000)	(10.505.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(27.675.645.000)	(27.675.645.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(189.830.002)	(189.830.002)
425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	(307.721.700)	(307.721.700)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(468.289)	(468.289)
425439- Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	(4.833.160)	(4.833.160)
425459- Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	0	(189.564.450)	(189.564.450)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(151.000.000)	(151.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(26.816.966.545)	(26.816.966.545)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.279.707.641)	(10.279.707.641)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(6.099.080.665)	(6.099.080.665)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(3.732.658.159)	(3.732.658.159)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(288.779.652)	(288.779.652)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(16.381.622.797)	(16.381.622.797)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(862.534.573)	(862.534.573)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(333.039.260)	(333.039.260)
425533- Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	(67.509.910)	(67.509.910)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(2.276.787.000)	(2.276.787.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(597.478.234)	(597.478.234)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	(422.196.301)	(422.196.301)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(64.327.640)	(64.327.640)
425692- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	(125.000)	(125.000)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.778.489.099)	(2.778.489.099)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(262.608)	(262.608)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(34.810.355)	(34.810.355)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(26.500.002)	(26.500.002)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(12.808.102.681)	(12.808.102.681)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(5.573.394.898)	(5.573.394.898)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(19.013.749.122)	(19.013.749.122)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(1.704.997.713)	(1.704.997.713)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(89.994.500)	(89.994.500)
425792- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	(2.271.974)	(2.271.974)
425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	(19.500.000)	(19.500.000)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(12.915.479.581)	(12.915.479.581)

425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(8.112.720)	(8.112.720)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(3.377.335.488)	(3.377.335.488)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(7.387.597.295)	(7.387.597.295)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(1.451.105.435)	(1.451.105.435)
425917- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(3.596.000)	(3.596.000)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(103.905.693.668)	(103.905.693.668)
425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	(354.190)	(354.190)
425995- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	(3.409)	(3.409)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(7.387.116.540)	(7.387.116.540)
491111- Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	(1.042.388.912)	(1.042.388.912)
491315- Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa	0	(39.411.813.756)	(39.411.813.756)
491421- Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	(2.399.218.209)	(2.399.218.209)
491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	(8.000.562.611)	(8.000.562.611)
491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(4.023.344.376)	(4.023.344.376)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(30.030.076.199.636)	(30.030.076.199.636)
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	1.741.974.401.226	1.741.974.401.226
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	25.872.281	25.872.281
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	118.955.263.038	118.955.263.038
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	34.709.795.950	34.709.795.950
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	17.857.389.891	17.857.389.891
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	325.197.794.786	325.197.794.786
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	27.596.880.805	27.596.880.805
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	92.648.824.430	92.648.824.430
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	299.062.449.910	299.062.449.910
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	1.498.701.322	1.498.701.322
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	27.580.000	27.580.000
511138- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	54.125.000	54.125.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.270.800.000	1.270.800.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	25.065.636.228	25.065.636.228
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	430.914.377.054	430.914.377.054
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	214.580.757.396	214.580.757.396
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	77.980.114.600	77.980.114.600
511155- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	15.000.000	15.000.000
511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	6.907.072.506	6.907.072.506
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	8.013.170.000	8.013.170.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	108.444.466.749	108.444.466.749
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	1.615.913	1.615.913
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	6.366.980.234	6.366.980.234
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	1.899.001.468	1.899.001.468
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	3.949.220.000	3.949.220.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	403.225.000	403.225.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	163.337.158	163.337.158
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	5.475.438.866	5.475.438.866
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	18.362.038.900	18.362.038.900
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	1.085.940.000	1.085.940.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	3.593.492.500	3.593.492.500
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.565.836.686.772	1.565.836.686.772
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	29.448.726	29.448.726
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	110.059.899.531	110.059.899.531
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	33.908.621.069	33.908.621.069
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	68.372.337.576	68.372.337.576
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.552.426.000	1.552.426.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	9.418.528.424	9.418.528.424
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	140.460.402.072	140.460.402.072
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	887.953.973.050	887.953.973.050
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	751.800.000	751.800.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	3.439.625.000	3.439.625.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	4.264.025.000	4.264.025.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	1.168.400.000	1.168.400.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	15.477.432.200	15.477.432.200
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	606.090.000	606.090.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	7.380.456.000	7.380.456.000

511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	27.240.982.850	27.240.982.850
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	690.805.000	690.805.000
511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri	0	5.275.000	5.275.000
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	33.847.209.240	33.847.209.240
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	33.918.226.463	33.918.226.463
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	4.194.639.176	4.194.639.176
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	652.468.644	652.468.644
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	116.900.000	116.900.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	376.784.766.610	376.784.766.610
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	28.013.189.954	28.013.189.954
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	379.000.000	379.000.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	138.011.607.341	138.011.607.341
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1.713.737	1.713.737
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7.881.187.720	7.881.187.720
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2.393.237.320	2.393.237.320
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	15.676.047.000	15.676.047.000
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	8.285.385.960	8.285.385.960
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	30.317.654.193	30.317.654.193
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	6.213.000	6.213.000
512111- Belanja Uang Honor Tetap	0	18.089.863.677	18.089.863.677
512211- Belanja Uang Lembur	0	51.041.654.360	51.041.654.360
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	144.520.000	144.520.000
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1.617.459.686.715	1.617.459.686.715
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	44.846.382.012	44.846.382.012
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	508.618.214.804	508.618.214.804
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	196.548.064.011	196.548.064.011
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	10.341.224.598	10.341.224.598
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	4.250.676.945	4.250.676.945
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	168.434.169.735	168.434.169.735
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	604.257.427.349	604.257.427.349
521121- Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	71.500.000	71.500.000
521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.523.838.557	1.523.838.557
521211- Belanja Bahan	0	379.492.210.564	379.492.210.564
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	718.543.227.185	718.543.227.185
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	402.802.944.923	402.802.944.923
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	1.754.652.200	1.754.652.200
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	5.708.740.000	5.708.740.000
521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	62.718.756	62.718.756
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	4.761.103.819	4.761.103.819
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	19.000.000	19.000.000
521254- Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	24.292.000	24.292.000
521723- Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	235.661.768.105	235.661.768.105
522111- Belanja Langganan Listrik	0	149.345.444.883	149.345.444.883
522112- Belanja Langganan Telepon	0	9.834.173.442	9.834.173.442
522113- Belanja Langganan Air	0	12.361.791.007	12.361.791.007
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	29.263.739.168	29.263.739.168
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	161.313.624	161.313.624
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	71.918.865.574	71.918.865.574
522141- Belanja Sewa	0	118.274.793.802	118.274.793.802
522151- Belanja Jasa Profesi	0	88.736.005.655	88.736.005.655
522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	177.061.819	177.061.819
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	164.082.512.213	164.082.512.213
522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.771.928.326	1.771.928.326
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	215.181.230.946	215.181.230.946
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	12.694.318.034	12.694.318.034
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	220.481.073.660	220.481.073.660
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	59.940.806.336	59.940.806.336
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	5.594.564.764	5.594.564.764

523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	171.330.259.787	171.330.259.787
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	125.985.952.334	125.985.952.334
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	187.444.814.546	187.444.814.546
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	4.756.548.086	4.756.548.086
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	657.736.509.253	657.736.509.253
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	1.725.421.646	1.725.421.646
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	113.677.164.810	113.677.164.810
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	169.790.864.693	169.790.864.693
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	168.043.696.845	168.043.696.845
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	7.126.307.788	7.126.307.788
524219- Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	1.391.843.330	1.391.843.330
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	707.513.703.171	707.513.703.171
525112- Belanja Barang	0	257.397.456.100	257.397.456.100
525113- Belanja Jasa	0	191.919.504.757	191.919.504.757
525114- Belanja Pemeliharaan	0	123.369.368.961	123.369.368.961
525115- Belanja Perjalanan	0	62.247.143.835	62.247.143.835
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	197.584.390.319	197.584.390.319
525143- Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	232.540.000	232.540.000
525152- Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	68.056.816	68.056.816
525154- Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.542.070.714	1.542.070.714
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	1.359.133.589	1.359.133.589
526121- Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	27.000.000	27.000.000
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	630.000.000	630.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	4.338.895.000	4.338.895.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	235.438.375.000	235.438.375.000
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	399.275.857.184	399.275.857.184
571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	5.371.200.000	5.371.200.000
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	5.032.683.785	5.032.683.785
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	70.067.100.000	70.067.100.000
591111- Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3.012.624.898.493	3.012.624.898.493
591211- Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	578.034.762.958	578.034.762.958
591311- Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1.194.300.061.128	1.194.300.061.128
591312- Belanja Penyusutan Irigasi	0	1.014.921.721.129	1.014.921.721.129
591313- Belanja Penyusutan Jaringan	0	41.984.190.941	41.984.190.941
591411- Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	7.147.005.676	7.147.005.676
591511- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	2.141.836.026	2.141.836.026
591521- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	87.618.038.042	87.618.038.042
591611- Beban Penyusutan Properti Investasi	0	13.996.602	13.996.602
592112- Belanja Amortisasi Hak Cipta	0	357.142	357.142
592114- Belanja Amortisasi Paten	0	43.376.827	43.376.827
592115- Belanja Amortisasi Software	0	86.619.108.184	86.619.108.184
592116- Belanja Amortisasi Lisensi	0	1.524.436.809	1.524.436.809
592117- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	4.224.745.596	4.224.745.596
592118- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	7.228.125	7.228.125
592211- Belanja Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	2.160.775.826	2.160.775.826
592222- Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	25.398.769.432	25.398.769.432
593111- Belanja Persediaan konsumsi	0	1.093.114.395.463	1.093.114.395.463
593112- Belanja Persediaan amunisi	0	108.171.642.353	108.171.642.353
593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	12.366.455.435	12.366.455.435
593114- Belanja Persediaan suku cadang	0	304.817.985.710	304.817.985.710
593121- Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	910.255.144	910.255.144
593122- Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	95.580.399.240	95.580.399.240

593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	36.976.146.782	36.976.146.782
593124- Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	16.379.871.213	16.379.871.213
593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	562.367.754.396	562.367.754.396
593126- Belanja Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	30.230.371.599	30.230.371.599
593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	92.115.122.304	92.115.122.304
593131- Belanja Persediaan bahan baku	0	69.528.498.079	69.528.498.079
593141- Belanja Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	207.075.000	207.075.000
593149- Belanja persediaan lainnya	0	408.813.475.081	408.813.475.081
593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	0	5.582.766.742	5.582.766.742
594111- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Migas	0	297.443.180	297.443.180
594112- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas	0	66.295.854.137	66.295.854.137
594113- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN	0	66.145.869.430	66.145.869.430
594115- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB	0	105.810.336	105.810.336
594116- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai	0	25.000	25.000
594117- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	0	(3.290.428.350)	(3.290.428.350)
594118- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	7.958.500	7.958.500
594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	54.853.340.832	54.853.340.832
594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	11.448.925	11.448.925
594611- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	1.413.423.250	1.413.423.250
594612- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	17.294.385	17.294.385
594619- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	22.511.345	22.511.345
594651- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	0	1.052.176	1.052.176
594712- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	0	246.500	246.500
594713- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	155.000	155.000
594791- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	10.695.586	10.695.586
594931- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	28.175.463	28.175.463
595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	1.661.190.992	1.661.190.992
595113- Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	200.455.241	200.455.241
595122- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU	0	661.449.285	661.449.285
596111- Kerugian Pelepasan Aset	0	38.143.894.430	38.143.894.430
596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang	0	8.998.072.815	8.998.072.815
596211- Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	142.289.944	142.289.944
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	499.634.460.000	499.634.460.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	33.461.936.000	33.461.936.000
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	16.969.948.000	16.969.948.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	85.404.000.000	85.404.000.000
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	254.000	254.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	22.569.064.000	22.569.064.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	11.888.383.000	11.888.383.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	407.600.577.000	407.600.577.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	83.084.000	83.084.000

612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	1.093.604.550	1.093.604.550
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	475.704.000	475.704.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	53.873.847.000	53.873.847.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	48.238.825.000	48.238.825.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	20.222.948.160	20.222.948.160
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	13.144.387.868.000	13.144.387.868.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	1.167.267.870.000	1.167.267.870.000
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	158.599.171.878	158.599.171.878
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	2.021.040.945.000	2.021.040.945.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	1.428.243.952.000	1.428.243.952.000
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	590.271.683.400	590.271.683.400
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	2.267.961.495.723	2.267.961.495.723
643111- Insentif Fiskal	0	402.667.194.500	402.667.194.500
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	2.645.085.970.816	2.645.085.970.816
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	59.803.542.000	59.803.542.000
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	51.516.355.236	51.516.355.236
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.833.806.586.969	1.833.806.586.969
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	632.096.675.900	632.096.675.900
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	117.771.170.000	117.771.170.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	11.009.581.000	11.009.581.000
654821- Dana Pelayanan Kepariwisata	0	8.434.356.000	8.434.356.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	122.868.083.508	122.868.083.508
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	61.788.607.649	61.788.607.649
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	9.712.500.000	9.712.500.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	5.959.000.000	5.959.000.000
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	11.240.500.000	11.240.500.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	14.787.500.000	14.787.500.000
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	10.250.000.000	10.250.000.000
662111- Belanja Dana Desa	0	2.051.988.955.347	2.051.988.955.347
8110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	0	(1.707.493.572.168)	(1.707.493.572.168)
8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	0	(1.093.899.241.697)	(1.093.899.241.697)
8110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	0	(946.806.123.192)	(946.806.123.192)
8110400- Pajak Air Permukaan - LO	0	(193.556.348.076)	(193.556.348.076)
8110500- Pajak Rokok - LO	0	(702.657.201.437)	(702.657.201.437)
8110600- Pajak Hotel - LO	0	(148.581.362.212)	(148.581.362.212)
8110700- Pajak Restoran - LO	0	(334.673.140.853)	(334.673.140.853)
8110800- Pajak Hiburan - LO	0	(42.159.439.372)	(42.159.439.372)
8110900- Pajak Reklame - LO	0	(85.675.351.752)	(85.675.351.752)
8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO	0	(716.862.480.566)	(716.862.480.566)
8111100- Pajak Parkir - LO	0	(32.580.110.095)	(32.580.110.095)
8111200- Pajak Air Tanah - LO	0	(9.956.648.978)	(9.956.648.978)
8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO	0	(258.267.700)	(258.267.700)
8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0	(183.092.977.767)	(183.092.977.767)
8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	0	(567.974.071.269)	(567.974.071.269)
8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	0	(742.489.257.810)	(742.489.257.810)
8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0	(167.579.733.901)	(167.579.733.901)
8120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	0	(42.723.750.840)	(42.723.750.840)
8120400- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	0	(938.810.000)	(938.810.000)
8120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	0	(7.239.094.000)	(7.239.094.000)
8120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0	(29.009.766.792)	(29.009.766.792)

8120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0	(6.346.920.406)	(6.346.920.406)
8120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	0	(624.174.200)	(624.174.200)
8121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0	(569.690.000)	(569.690.000)
8121100- Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	0	(386.080.000)	(386.080.000)
8121200- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0	(619.589.459)	(619.589.459)
8121400- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0	(6.491.326.396)	(6.491.326.396)
8121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	0	(21.537.345.567)	(21.537.345.567)
8121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	0	(6.330.447.700)	(6.330.447.700)
8121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0	(3.615.984.667)	(3.615.984.667)
8121800- Retribusi Terminal - LO	0	(1.865.348.800)	(1.865.348.800)
8121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	0	(6.930.264.102)	(6.930.264.102)
8122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	0	(372.739.000)	(372.739.000)
8122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	0	(10.850.046.000)	(10.850.046.000)
8122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	0	(2.083.320.088)	(2.083.320.088)
8122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0	(16.771.577.716)	(16.771.577.716)
8122400- Retribusi Penyebrangan Air - LO	0	(75.000.000)	(75.000.000)
8122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0	(1.509.679.603)	(1.509.679.603)
8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0	(53.831.032.984)	(53.831.032.984)
8122700- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	0	(655.233.783)	(655.233.783)
8122900- Retribusi Izin Trayek - LO	0	(90.884.450)	(90.884.450)
8123000- Retribusi Izin Perikanan - LO	0	(300.016.000)	(300.016.000)
8123100- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	0	(658.791.200)	(658.791.200)
812ZZZZ- Pendapatan Retribusi Daerah - LO (BAS Level 4)	0	(44.593.724.274)	(44.593.724.274)
8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	0	(539.215.453.269)	(539.215.453.269)
8130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	0	(22.560.625.520)	(22.560.625.520)
8130300- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	0	(9.274.355.913)	(9.274.355.913)
8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0	(6.161.239.458)	(6.161.239.458)
8140200- Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	0	(2.177.274.696)	(2.177.274.696)
8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO	0	(102.497.609.043)	(102.497.609.043)
8140400- Pendapatan Bunga - LO	0	(23.818.875.512)	(23.818.875.512)
8140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0	(45.025.437.823)	(45.025.437.823)
8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	0	(40.153.977.080)	(40.153.977.080)
8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0	(27.540.665.559)	(27.540.665.559)
8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO	0	(89.899.256.392)	(89.899.256.392)
8140900- Pendapatan Denda Retribusi - LO	0	(277.501.901)	(277.501.901)
8141000- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	0	(6.853.421.100)	(6.853.421.100)
8141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(4.426.099.107)	(4.426.099.107)
8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO	0	(17.725.809.593)	(17.725.809.593)
8141800- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0	(12.520.653.851)	(12.520.653.851)
8141900- Pendapatan Zakat* - LO	0	(162.910.152)	(162.910.152)
8142000- Pendapatan BLUD - LO	0	(1.946.601.726.176)	(1.946.601.726.176)
8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0	(386.443.383.737)	(386.443.383.737)
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	(654.830.683.880)	(654.830.683.880)
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	(556.062.877.146)	(556.062.877.146)
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	(18.511.485.026.190)	(18.511.485.026.190)
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	(7.645.234.052.636)	(7.645.234.052.636)
8220300- Dana Penyesuaian - LO	0	(216.508.443.000)	(216.508.443.000)
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	(402.667.194.500)	(402.667.194.500)
8230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0	(2.190.481.238.123)	(2.190.481.238.123)
8240100- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0	(368.921.784.514)	(368.921.784.514)
8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0	(467.032.683.975)	(467.032.683.975)
8310200- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0	(1.952.796.638.502)	(1.952.796.638.502)
8310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0	(138.178.965.366)	(138.178.965.366)

8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0	(104.130.313.336)	(104.130.313.336)
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	(193.964.130.562)	(193.964.130.562)
8410100- Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	(16.547.087.983)	(16.547.087.983)
8430100- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	(1.986.102.423)	(1.986.102.423)
8510100- Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	0	(18.142.344.284)	(18.142.344.284)
9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO	0	10.804.194.723.666	10.804.194.723.666
9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0	4.976.763.031.700	4.976.763.031.700
9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	0	676.736.473.866	676.736.473.866
9110500- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	27.827.865.669	27.827.865.669
9110600- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	7.696.525.405	7.696.525.405
9120100- Beban Bahan Pakai Habis	0	3.440.733.632.375	3.440.733.632.375
9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material	0	163.115.007.020	163.115.007.020
9120300- Beban Jasa Kantor	0	3.567.734.284.904	3.567.734.284.904
9120400- Beban Premi Asuransi	0	841.978.773.261	841.978.773.261
9120700- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	62.748.317.610	62.748.317.610
9120800- Beban Sewa Sarana Mobilitas	0	58.464.194.768	58.464.194.768
9120900- Beban Sewa Alat Berat	0	831.813.198	831.813.198
9121000- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	118.537.062.888	118.537.062.888
9121100- Beban Makanan dan Minuman	0	26.075.571.662	26.075.571.662
9121200- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0	310.357.500	310.357.500
9121300- Belanja Pakaian Kerja	0	727.350.000	727.350.000
9121400- Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0	986.853.250	986.853.250
9121500- Beban Perjalanan Dinas	0	1.682.842.033.350	1.682.842.033.350
9121800- Beban Pemeliharaan	0	398.548.711.782	398.548.711.782
9121900- Beban Jasa Konsultasi	0	79.315.676.108	79.315.676.108
9122000- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	37.448.690.993	37.448.690.993
9122100- Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	3.525.694.450	3.525.694.450
9122200- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0	1.628.900.000	1.628.900.000
9122300- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	106.956.534.819	106.956.534.819
9122400- Beban Honorarium Non Pegawai	0	5.978.062.215	5.978.062.215
9122500- Honorarium PNS	0	65.043.275.000	65.043.275.000
9122600- Honorarium Non PNS	0	19.444.561.626	19.444.561.626
9122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	8.808.973.944	8.808.973.944
9122800- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	0	153.660.663.547	153.660.663.547
9122900- Beban Jaminan kesehatan Nasional (BPJS)	0	143.221.539.008	143.221.539.008
9123000- Beban Jasa Pihak Ketiga	0	58.311.706.284	58.311.706.284
9123100- Beban Barang dan Jasa BLUD	0	867.964.692.991	867.964.692.991
9123200- Beban Barang dan Jasa dana BOS	0	752.862.564.812	752.862.564.812
9123300- Beban Penghargaan atau Prestasi	0	5.426.253.335	5.426.253.335
9123400- Beban Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara	0	205.966.200	205.966.200
9123800- Beban Peralatan Rumah Tangga	0	80.725.893.930	80.725.893.930
9130100- Bunga Utang Pinjaman	0	57.076.560.226	57.076.560.226
9140100- Beban Subsidi	0	22.410.349.680	22.410.349.680
9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah	0	576.671.644.985	576.671.644.985
9150200- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	252.565.130.957	252.565.130.957
9150300- Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0	8.270.686.633	8.270.686.633
9150500- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	894.123.553.447	894.123.553.447
9150600- Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	0	225.396.573.865	225.396.573.865
915ZZZZ- Beban Hibah (BAS Level 4)	0	108.932.546.212	108.932.546.212
9160100- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	356.483.000	356.483.000
9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	34.764.403.679	34.764.403.679
9170100- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1.840.803.829.508	1.840.803.829.508
9170200- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	822.045.119.963	822.045.119.963
9170300- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	3.223.573.835.980	3.223.573.835.980
9170400- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	22.478.746.307	22.478.746.307
9180100- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	133.826.654.916	133.826.654.916
9180200- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	273.645.782	273.645.782
9190100- Beban Penurunan Nilai Investasi	0	4.170.240.761	4.170.240.761
9190300- Beban Lain-lain	0	73.259.264.530	73.259.264.530
919ZZZZ- Beban Lain-lain (BAS Level 4)	0	19.953.287.334	19.953.287.334
9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	0	2.213.682.524.646	2.213.682.524.646

Pemerintahan Kabupaten/Kota			
9220100- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	5.004.669.115	5.004.669.115
9230200- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	452.058.686.522	452.058.686.522
9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	1.751.607.090.653	1.751.607.090.653
9250100- Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0	3.959.771.689	3.959.771.689
9310100- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	35.892.994.334	35.892.994.334
9320100- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	1.198.250.002	1.198.250.002
9330100- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	74.402.881.078	74.402.881.078
9410100- Beban Luar Biasa	0	22.972.271.485	22.972.271.485
9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah	0	2.600.950.795.522	2.600.950.795.522
Jumlah	0	(296.888.070.684)	(296.888.070.684)

LAMPIRAN II

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	4.266.000	(1.802.946)	2.463.054
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	98.496.470	(93.440.470)	5.056.000
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	0	477.530.366.671	477.530.366.671
111911- Kas dan Bank - BLU	1.023.766.753.652	(240.447.454.076)	783.319.299.576
211116- Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggotaan Polri/PNS Polri	(26.413.424.000)	0	(26.413.424.000)
211166- Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	26.413.424.000	0	26.413.424.000
311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	61.978.422.415	0	61.978.422.415
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(77.295.554.010.007)	(53.229.905.420.929)	(130.525.459.430.936)
313121- Diterima dari Entitas Lain	36.097.619.541.289	14.979.388.112.256	51.077.007.653.545
391111- Ekuitas	40.137.079.522.227	30.142.800.607.636	70.279.880.129.863
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BP KL	(102.762.470)	95.243.416	(7.519.054)
399918- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas KPPN	4.546.600	0	4.546.600
399919- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas BLU	(26.509.358.098)	0	(26.509.358.098)
399921- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas Hibah	1.614.581.922	707.300.000	2.321.881.922
4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0	(1.707.513.843.123)	(1.707.513.843.123)
4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0	(1.093.899.241.697)	(1.093.899.241.697)
4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0	(943.506.434.539)	(943.506.434.539)
4110400- Pajak Air Permukaan - LRA	0	(195.868.079.896)	(195.868.079.896)
4110500- Pajak Rokok - LRA	0	(702.657.201.437)	(702.657.201.437)
4110600- Pajak Hotel - LRA	0	(148.738.773.166)	(148.738.773.166)
4110700- Pajak Restoran - LRA	0	(332.693.029.280)	(332.693.029.280)
4110800- Pajak Hiburan - LRA	0	(41.634.456.228)	(41.634.456.228)
4110900- Pajak Reklame - LRA	0	(87.433.038.814)	(87.433.038.814)
4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA	0	(713.961.068.210)	(713.961.068.210)
4111100- Pajak Parkir - LRA	0	(32.359.210.951)	(32.359.210.951)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(71.000)	(71.000)
411112- Pendapatan PPh Gas Bumi	0	(93.242)	(93.242)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(1.493.465)	(1.493.465)
4111200- Pajak Air Tanah - LRA	0	(9.654.836.755)	(9.654.836.755)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(2.705.299.885.309)	(2.705.299.885.309)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(291.151.807.068)	(291.151.807.068)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(141.395.867)	(141.395.867)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(532.333.265.803)	(532.333.265.803)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(166.383.617.141)	(166.383.617.141)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.848.415.179.239)	(1.848.415.179.239)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(13.391.296.252)	(13.391.296.252)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(1.170.897.277.006)	(1.170.897.277.006)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(258.672.598)	(258.672.598)
4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0	(253.370.700)	(253.370.700)
4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0	(183.717.594.318)	(183.717.594.318)
4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0	(607.616.902.809)	(607.616.902.809)
4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	0	(585.146.580.300)	(585.146.580.300)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(5.927.884.866.968)	(5.927.884.866.968)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(4.149.659.793)	(4.149.659.793)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(919.299.745)	(919.299.745)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(24.757.719.388)	(24.757.719.388)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(9.350.766)	(9.350.766)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(5.979.093)	(5.979.093)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(22.091.107.050)	(22.091.107.050)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(2.292.093.801)	(2.292.093.801)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(78.936.723.525)	(78.936.723.525)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(111.561.199)	(111.561.199)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(100.869.029.000)	(100.869.029.000)
411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	0	(7.029.000.000)	(7.029.000.000)

411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(1.430.266.000)	(1.430.266.000)
411519- Pendapatan Cukai Lainnya	0	(98.815.000)	(98.815.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(4.993.991.686)	(4.993.991.686)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	0	(147.494.070.915)	(147.494.070.915)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(26.908.451)	(26.908.451)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(23.821.935.095)	(23.821.935.095)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(25.757.712.436)	(25.757.712.436)
4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	0	(179.352.874.336)	(179.352.874.336)
4120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	0	(37.757.117.314)	(37.757.117.314)
4120400- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	0	(1.046.960.000)	(1.046.960.000)
4120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	0	(7.253.659.000)	(7.253.659.000)
4120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	0	(26.064.563.657)	(26.064.563.657)
4120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	0	(5.979.325.906)	(5.979.325.906)
4120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	0	(618.664.200)	(618.664.200)
4121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	0	(569.690.000)	(569.690.000)
4121100- Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	0	(392.705.000)	(392.705.000)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(183.633.431.000)	(183.633.431.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(4.679.695.000)	(4.679.695.000)
412119- Pendapatan Pabean Lainnya	0	(111.000)	(111.000)
4121200- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	0	(612.962.459)	(612.962.459)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(583.827.000)	(583.827.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(25.323.463.000)	(25.323.463.000)
4121300- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	0	(2.629.240.000)	(2.629.240.000)
4121400- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	0	(21.986.338.903)	(21.986.338.903)
4121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0	(24.180.780.860)	(24.180.780.860)
4121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	0	(6.099.769.800)	(6.099.769.800)
4121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0	(3.539.318.000)	(3.539.318.000)
4121800- Retribusi Terminal - LRA	0	(2.555.321.300)	(2.555.321.300)
4121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	0	(6.385.156.102)	(6.385.156.102)
4122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	0	(362.839.000)	(362.839.000)
4122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	0	(10.850.046.000)	(10.850.046.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(36.096.168.000)	(36.096.168.000)
4122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	0	(3.512.230.108)	(3.512.230.108)
4122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	0	(17.114.267.716)	(17.114.267.716)
4122400- Retribusi Penyeberangan Air - LRA	0	(75.000.000)	(75.000.000)
4122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	0	(5.416.779.330)	(5.416.779.330)
4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	0	(52.285.033.599)	(52.285.033.599)
4122700- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	0	(13.000.000)	(13.000.000)
4122900- Retribusi Izin Trayek - LRA	0	(329.049.200)	(329.049.200)
4123000- Retribusi Izin Perikanan - LRA	0	(1.341.522.250)	(1.341.522.250)
4123100- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	0	(370.837.500)	(370.837.500)
4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0	(381.081.414.886)	(381.081.414.886)
4130300- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	0	(2.270.858.910)	(2.270.858.910)
4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0	(14.120.026.652)	(14.120.026.652)
4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA	0	(102.764.679.227)	(102.764.679.227)
4140400- Pendapatan Bunga - LRA	0	(23.844.280.119)	(23.844.280.119)
4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0	(43.921.917.165)	(43.921.917.165)
4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	0	(44.642.347.283)	(44.642.347.283)
4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0	(28.500.045.813)	(28.500.045.813)
4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA	0	(80.594.210.579)	(80.594.210.579)
4140900- Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0	(139.550.335)	(139.550.335)
4141000- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	0	(1.304.151.627)	(1.304.151.627)
4141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(4.425.594.107)	(4.425.594.107)
4141300- Pendapatan dari Pengembalian	0	(17.497.801.771)	(17.497.801.771)

4141600- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0	(12.624.031.419)	(12.624.031.419)
4141800- Pendapatan BLUD - LRA	0	(1.992.715.307.144)	(1.992.715.307.144)
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	(11.051.020.681)	(11.051.020.681)
4142000- Pendapatan Jaminan kesehatan Nasional (BPJS)	0	(271.088.018.348)	(271.088.018.348)
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	(671.987.941.863)	(671.987.941.863)
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	(444.195.729.650)	(444.195.729.650)
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	(18.510.950.842.190)	(18.510.950.842.190)
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	(7.674.608.060.750)	(7.674.608.060.750)
4220300- Dana Penyesuaian - LRA	0	(73.734.414.000)	(73.734.414.000)
4220400- Dana Insentif Daerah	0	(457.757.128.500)	(457.757.128.500)
4220500- Dana Desa	0	(1.905.504.739.347)	(1.905.504.739.347)
4220600- Dana Bantuan Operasional Sekolah	0	(17.659.868.000)	(17.659.868.000)
4230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	0	(2.310.922.812.714)	(2.310.922.812.714)
4230200- Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	0	(10.758.580.500)	(10.758.580.500)
4240100- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0	(310.541.636.300)	(310.541.636.300)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(1.137.086.839.549)	(1.137.086.839.549)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(880.950.031.850)	(880.950.031.850)
424113- Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	(9.515.323.965)	(9.515.323.965)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(5.979.286.140)	(5.979.286.140)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(202.142.158)	(202.142.158)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(27.461.253.347)	(27.461.253.347)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(4.271.700.609)	(4.271.700.609)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(8.362.374.696)	(8.362.374.696)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(891.778.800)	(891.778.800)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(30.048.367.547)	(30.048.367.547)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(50.667.799)	(50.667.799)
424916- Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(15.182.200)	(15.182.200)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(14.629.680.192)	(14.629.680.192)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(17.360.000)	(17.360.000)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(2.195.854.725)	(2.195.854.725)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(6.976.385.612)	(6.976.385.612)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(1.047.830.000)	(1.047.830.000)
424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	(27.240.000)	(27.240.000)
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	(449.117.355)	(449.117.355)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(3.792.435.670)	(3.792.435.670)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(234.014.600)	(234.014.600)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(470.239.042)	(470.239.042)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(6.518.846.286)	(6.518.846.286)
425124- Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	0	(2.518.000)	(2.518.000)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(2.585.609.042)	(2.585.609.042)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(16.532.382.527)	(16.532.382.527)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(48.177.476)	(48.177.476)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(2.795.067.517)	(2.795.067.517)
425139- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	(2.608.200)	(2.608.200)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(2.979.573.024)	(2.979.573.024)
425211- Pendapatan Paspor	0	(59.265.750.000)	(59.265.750.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.725.500.000)	(1.725.500.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(6.857.150.000)	(6.857.150.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(2.816.400.000)	(2.816.400.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	0	(177.697.435)	(177.697.435)

Lainnya			
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(11.720.000)	(11.720.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(129.960.000)	(129.960.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(920.235.000)	(920.235.000)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(1.264.106.410)	(1.264.106.410)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(3.813.585.024)	(3.813.585.024)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(600.750.000)	(600.750.000)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(2.044.480.237)	(2.044.480.237)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(5.962.434.000)	(5.962.434.000)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(80.750.000)	(80.750.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(5.678.265.606)	(5.678.265.606)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(2.526.932.737)	(2.526.932.737)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(850.000.000)	(850.000.000)
425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	(626.419.501)	(626.419.501)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(516.448.600)	(516.448.600)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(19.250.000)	(19.250.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(2.609.470.991)	(2.609.470.991)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(18.328.880.000)	(18.328.880.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(15.365.580.000)	(15.365.580.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(78.545.600.000)	(78.545.600.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(939.580.000)	(939.580.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(70.367.400.000)	(70.367.400.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(42.218.700.000)	(42.218.700.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(1.120.850.000)	(1.120.850.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.496.200.000)	(1.496.200.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(16.245.000.000)	(16.245.000.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(7.564.920.000)	(7.564.920.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(6.738.600.000)	(6.738.600.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(798.235.000)	(798.235.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(10.587.842.488)	(10.587.842.488)
425282- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(12.909.500)	(12.909.500)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(6.994.523.222)	(6.994.523.222)
425284- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	0	(486.520.000)	(486.520.000)
425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	(10.801.962.000)	(10.801.962.000)
425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	0	(2.342.174.000)	(2.342.174.000)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(9.882.225.284)	(9.882.225.284)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(18.802.499.795)	(18.802.499.795)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(143.366.255.924)	(143.366.255.924)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(17.054.402.547)	(17.054.402.547)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.245.405.000)	(1.245.405.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(1.503.105.000)	(1.503.105.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(904.920.000)	(904.920.000)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan	0	(6.131.526.091)	(6.131.526.091)

Peternakan			
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(41.255.000)	(41.255.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(59.606.569.418)	(59.606.569.418)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(28.582.200.000)	(28.582.200.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(2.976.814.445)	(2.976.814.445)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(1.074.307.500)	(1.074.307.500)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(98.043.121.816)	(98.043.121.816)
425413- Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	0	(13.542.000)	(13.542.000)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(2.520.991.600)	(2.520.991.600)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(22.572.440.159)	(22.572.440.159)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(492.615.000)	(492.615.000)
425431- Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	0	(10.505.000)	(10.505.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(27.675.645.000)	(27.675.645.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(189.830.002)	(189.830.002)
425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	(307.721.700)	(307.721.700)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(468.289)	(468.289)
425436- Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	(5.000.000)	(5.000.000)
425439- Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	(4.833.160)	(4.833.160)
425459- Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	0	(189.564.450)	(189.564.450)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(151.000.000)	(151.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(26.217.739.240)	(26.217.739.240)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.279.707.641)	(10.279.707.641)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(6.099.080.665)	(6.099.080.665)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(3.760.262.251)	(3.760.262.251)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(288.779.652)	(288.779.652)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(17.832.063.525)	(17.832.063.525)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(862.534.573)	(862.534.573)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(303.585.000)	(303.585.000)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(2.258.192.000)	(2.258.192.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(597.478.234)	(597.478.234)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	(422.196.301)	(422.196.301)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(64.327.640)	(64.327.640)
425692- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	(125.000)	(125.000)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.778.489.099)	(2.778.489.099)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(262.608)	(262.608)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(29.845.312)	(29.845.312)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(26.500.002)	(26.500.002)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(12.897.292.164)	(12.897.292.164)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(5.239.438.468)	(5.239.438.468)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(19.013.749.122)	(19.013.749.122)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(1.714.179.531)	(1.714.179.531)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(105.030.467)	(105.030.467)
425792- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	(2.271.974)	(2.271.974)
425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	(19.500.000)	(19.500.000)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(12.921.048.469)	(12.921.048.469)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(8.112.720)	(8.112.720)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(3.548.885.020)	(3.548.885.020)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(9.333.084.424)	(9.333.084.424)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(22.691.983.522)	(22.691.983.522)
425917- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial	0	(3.596.000)	(3.596.000)

Tahun Anggaran Yang Lalu			
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(142.863.198.668)	(142.863.198.668)
425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	(1.770.950)	(1.770.950)
425995- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	(3.409)	(3.409)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(3.947.285.718)	(3.947.285.718)
4310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	0	(25.539.177.629)	(25.539.177.629)
4310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	0	(126.943.025.775)	(126.943.025.775)
4310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	0	(4.356.341.361)	(4.356.341.361)
431ZZZZ- Pendapatan Hibah - LRA (BAS Level 4)	0	(2.059.665.172)	(2.059.665.172)
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	(190.823.410.276)	(190.823.410.276)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(30.142.800.607.636)	(30.142.800.607.636)
5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	10.731.498.398.091	10.731.498.398.091
5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	4.932.710.613.142	4.932.710.613.142
5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0	416.320.595.168	416.320.595.168
5110400- Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0	5.520.710.000	5.520.710.000
5110500- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	475.897.189	475.897.189
5110600- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	7.532.052	7.532.052
5110800- Belanja Pegawai Dana BOS	0	39.409.473.694	39.409.473.694
5110900- Belanja Pegawai Dana BLUD	0	266.499.220.454	266.499.220.454
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	1.742.007.774.228	1.742.007.774.228
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	25.772.126	25.772.126
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	118.960.435.502	118.960.435.502
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	34.714.466.406	34.714.466.406
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	17.849.079.891	17.849.079.891
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	325.358.825.086	325.358.825.086
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	27.542.277.273	27.542.277.273
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	92.649.258.950	92.649.258.950
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	299.845.775.318	299.845.775.318
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	1.498.701.322	1.498.701.322
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	27.580.000	27.580.000
511138- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	54.125.000	54.125.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.270.800.000	1.270.800.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	25.074.823.808	25.074.823.808
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	430.719.317.054	430.719.317.054
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	214.907.353.796	214.907.353.796
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	77.992.948.000	77.992.948.000
511155- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	15.000.000	15.000.000
511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	6.908.422.506	6.908.422.506
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	8.013.170.000	8.013.170.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	108.444.466.749	108.444.466.749
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	1.615.913	1.615.913
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	6.366.980.234	6.366.980.234
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	1.899.001.468	1.899.001.468
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	3.949.220.000	3.949.220.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	403.225.000	403.225.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	163.337.158	163.337.158
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	5.475.438.866	5.475.438.866
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	18.185.126.900	18.185.126.900
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	1.085.940.000	1.085.940.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	3.593.492.500	3.593.492.500
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.565.836.686.772	1.565.836.686.772
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	29.448.726	29.448.726
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	110.059.899.531	110.059.899.531
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	33.908.621.069	33.908.621.069
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	68.372.337.576	68.372.337.576
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.552.426.000	1.552.426.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	9.418.528.424	9.418.528.424
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	140.460.402.072	140.460.402.072
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	887.953.973.050	887.953.973.050
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	751.800.000	751.800.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	3.439.625.000	3.439.625.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	4.264.025.000	4.264.025.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	1.168.400.000	1.168.400.000

511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	15.477.432.200	15.477.432.200
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	606.090.000	606.090.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	7.380.456.000	7.380.456.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	27.240.982.850	27.240.982.850
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	690.805.000	690.805.000
511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri	0	5.275.000	5.275.000
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	33.847.209.240	33.847.209.240
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	33.918.226.463	33.918.226.463
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	4.194.713.176	4.194.713.176
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	652.468.644	652.468.644
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	116.900.000	116.900.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	375.269.920.010	375.269.920.010
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	28.013.189.954	28.013.189.954
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	379.000.000	379.000.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	137.419.390.074	137.419.390.074
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1.707.744	1.707.744
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	7.845.687.090	7.845.687.090
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2.383.720.022	2.383.720.022
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	15.738.679.000	15.738.679.000
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	8.250.407.100	8.250.407.100
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	29.082.614.443	29.082.614.443
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	6.213.000	6.213.000
5120100- Belanja Bahan Pakai Habis	0	1.823.402.214.794	1.823.402.214.794
5120200- Belanja Bahan/Material	0	31.003.086.081	31.003.086.081
5120300- Belanja Jasa Kantor	0	2.590.726.845.507	2.590.726.845.507
5120400- Belanja Premi Asuransi	0	807.790.822.109	807.790.822.109
5120500- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	1.588.431.978	1.588.431.978
5120700- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	62.367.272.360	62.367.272.360
5120800- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	42.302.749.579	42.302.749.579
5121000- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	83.211.703.261	83.211.703.261
5121100- Belanja Makanan dan Minuman	0	24.014.734.412	24.014.734.412
512111- Belanja Uang Honor Tetap	0	18.089.863.677	18.089.863.677
5121200- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	1.607.142.500	1.607.142.500
5121300- Belanja Pakaian Kerja	0	24.900.000	24.900.000
5121400- Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0	280.823.250	280.823.250
5121500- Belanja Perjalanan Dinas	0	1.427.301.415.222	1.427.301.415.222
5121800- Belanja Pemeliharaan	0	595.668.672.614	595.668.672.614
5121900- Belanja Jasa Konsultansi	0	76.391.378.769	76.391.378.769
5122000- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	53.226.041.906	53.226.041.906
5122100- Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	30.346.053.006	30.346.053.006
512211- Belanja Uang Lembur	0	51.020.206.360	51.020.206.360
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	142.564.000	142.564.000
5122200- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	1.600.350.000	1.600.350.000
5122300- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	104.055.364.025	104.055.364.025
5122600- Honorarium Non PNS	0	33.126.873.849	33.126.873.849
5122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	158.568.620.932	158.568.620.932
5122800- Belanja Jaminan kesehatan Nasional (BPJS)	0	44.325.685.920	44.325.685.920
5122900- Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	52.433.536.006	52.433.536.006
5123000- Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	1.832.495.140.324	1.832.495.140.324
5123100- Belanja Barang dan Jasa dana BOS	0	1.225.769.278.142	1.225.769.278.142
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1.566.732.928.899	1.566.732.928.899
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	42.163.876.693	42.163.876.693
512ZZZZ- Belanja Barang dan Jasa (BAS Level 4)	0	3.872.596.002.375	3.872.596.002.375
5130100- Bunga Utang Pinjaman	0	69.882.906.168	69.882.906.168
5140100- Belanja Subsidi	0	26.364.911.140	26.364.911.140
5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah	0	385.377.363.170	385.377.363.170
5150200- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	3.612.821.565	3.612.821.565
5150300- Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0	9.078.032.593	9.078.032.593
5150400- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	24.620.987.015	24.620.987.015
5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	898.009.054.242	898.009.054.242

5150600- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***	0	296.056.255.491	296.056.255.491
5160100- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	2.346.695.500	2.346.695.500
5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	40.524.100.179	40.524.100.179
5210100- Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0	863.494.000	863.494.000
5211000- Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	0	5.668.405.500	5.668.405.500
5211100- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	8.942.553.788	8.942.553.788
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	509.609.426.122	509.609.426.122
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	197.408.512.560	197.408.512.560
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	10.341.224.598	10.341.224.598
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	4.244.943.815	4.244.943.815
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	168.713.091.678	168.713.091.678
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	605.463.558.740	605.463.558.740
5211200- Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan	0	3.129.109.150	3.129.109.150
521121- Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	71.500.000	71.500.000
5211300- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	7.404.028.542	7.404.028.542
521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.527.413.175	1.527.413.175
521211- Belanja Bahan	0	383.793.340.117	383.793.340.117
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	718.269.448.288	718.269.448.288
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	403.768.080.868	403.768.080.868
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	1.754.652.200	1.754.652.200
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	5.708.740.000	5.708.740.000
521234- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	0	116.133.000	116.133.000
521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	62.718.756	62.718.756
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	4.859.434.773	4.859.434.773
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	35.000.000	35.000.000
521254- Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	24.292.000	24.292.000
521723- Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	267.489.818.184	267.489.818.184
521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	229.768.492.929	229.768.492.929
521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	41.930.000	41.930.000
521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	2.850.284.238	2.850.284.238
521822- Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	1.071.568.333	1.071.568.333
521831- Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	103.845.000	103.845.000
521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	39.806.013.864	39.806.013.864
521841- Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2.746.254.733	2.746.254.733
521ZZZZ- Belanja Modal Tanah (BAS Level 4)	0	5.646.359.482	5.646.359.482
5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	21.270.950.016	21.270.950.016
5220300- Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0	10.418.303.529	10.418.303.529
5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	142.273.871.908	142.273.871.908
5220500- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	1.516.180.000	1.516.180.000
5220600- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0	15.773.030.600	15.773.030.600
5220700- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	55.000.000	55.000.000
5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0	1.324.979.495	1.324.979.495
5221000- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0	204.441.750	204.441.750
5221100- Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0	4.328.296.020	4.328.296.020
522111- Belanja Langganan Listrik	0	151.363.539.664	151.363.539.664
522112- Belanja Langganan Telepon	0	9.864.758.862	9.864.758.862
522113- Belanja Langganan Air	0	12.391.995.475	12.391.995.475
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	29.311.001.950	29.311.001.950
5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0	18.559.730.752	18.559.730.752
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	163.422.024	163.422.024
5221300- Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan	0	2.320.370.863	2.320.370.863

Tanaman/Alat Penyimpan			
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	73.243.706.574	73.243.706.574
5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0	148.665.709.191	148.665.709.191
522141- Belanja Sewa	0	128.416.684.588	128.416.684.588
5221500- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	136.496.901.228	136.496.901.228
522151- Belanja Jasa Profesi	0	83.321.430.028	83.321.430.028
5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer	0	238.761.973.601	238.761.973.601
522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	107.432.000	107.432.000
5221700- Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	4.263.471.325	4.263.471.325
5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0	75.805.409.725	75.805.409.725
5221900- Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0	5.014.185.700	5.014.185.700
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	168.240.314.026	168.240.314.026
522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.771.928.326	1.771.928.326
5222000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0	3.085.050.000	3.085.050.000
5222100- Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0	244.290.323.200	244.290.323.200
5222200- Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0	107.270.115.168	107.270.115.168
5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0	151.624.368.651	151.624.368.651
5222400- Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	30.748.564.886	30.748.564.886
5222600- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	834.197.979	834.197.979
5222700- Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0	422.356.000	422.356.000
5222900- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	2.203.892.997	2.203.892.997
5223000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	1.115.492.500	1.115.492.500
5223500- Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	909.547.365	909.547.365
522ZZZZ- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	406.213.315.877	406.213.315.877
5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	1.942.000.850.410	1.942.000.850.410
5230200- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	14.438.718.329	14.438.718.329
5230700- Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0	5.046.473.734	5.046.473.734
5230900- Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	56.275.742.982	56.275.742.982
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	217.973.320.454	217.973.320.454
523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	3.072.625.257	3.072.625.257
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	12.694.318.034	12.694.318.034
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	226.514.238.494	226.514.238.494
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	59.978.332.298	59.978.332.298
523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	24.355.141.031	24.355.141.031
523125- Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	7.554.713.000	7.554.713.000
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	5.594.564.764	5.594.564.764
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	173.701.452.708	173.701.452.708
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	125.985.952.334	125.985.952.334
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	185.207.165.731	185.207.165.731
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	4.910.946.806	4.910.946.806
523ZZZZ- Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	244.196.776.396	244.196.776.396
5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan	0	2.354.581.502.160	2.354.581.502.160
5240200- Belanja modal Pengadaan Jembatan	0	136.203.071.696	136.203.071.696
5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0	256.975.820.246	256.975.820.246
5240400- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0	4.181.131.044	4.181.131.044
5240500- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	0	20.000.000	20.000.000
5240600- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	81.671.323.292	81.671.323.292
5240800- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0	25.951.737.241	25.951.737.241
5240900- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0	141.827.622.519	141.827.622.519

5241000- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	0	15.405.892.880	15.405.892.880
5241100- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0	44.111.926.511	44.111.926.511
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	659.409.215.118	659.409.215.118
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	1.725.421.646	1.725.421.646
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	109.994.204.481	109.994.204.481
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	169.595.812.893	169.595.812.893
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	168.217.808.914	168.217.808.914
5241200- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0	12.082.843.986	12.082.843.986
5241300- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0	2.263.537.043	2.263.537.043
5241500- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0	4.847.702.447	4.847.702.447
5241600- Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0	10.210.137.653	10.210.137.653
5241800- Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	0	29.962.250	29.962.250
5241900- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0	150.110.217	150.110.217
5242000- Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	9.302.839.053	9.302.839.053
5242100- Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	0	34.087.630.724	34.087.630.724
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	7.126.307.788	7.126.307.788
524219- Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	1.391.843.330	1.391.843.330
5242200- Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	0	807.565.000	807.565.000
5242300- Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	0	3.199.931.000	3.199.931.000
524ZZZZ- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (BAS Level 4)	0	172.317.073.504	172.317.073.504
5250100- Belanja modal Pengadaan Buku	0	2.089.155.963	2.089.155.963
5250200- Belanja modal Pengadaan Terbitan	0	25.000.000	25.000.000
5250300- Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0	19.880.310.510	19.880.310.510
5250400- Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	2.182.148.000	2.182.148.000
5250500- Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	4.470.000	4.470.000
5250600- Belanja modal Pengadaan Hewan	0	234.150.000	234.150.000
5250800- Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN	0	107.054.340.398	107.054.340.398
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	703.032.240.166	703.032.240.166
525112- Belanja Barang	0	256.498.416.101	256.498.416.101
525113- Belanja Jasa	0	184.448.579.012	184.448.579.012
525114- Belanja Pemeliharaan	0	123.066.566.231	123.066.566.231
525115- Belanja Perjalanan	0	62.202.611.600	62.202.611.600
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	199.713.576.331	199.713.576.331
525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	64.551.056.127	64.551.056.127
525123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	3.199.011.746	3.199.011.746
525125- Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	401.726.235	401.726.235
525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	367.437.673.767	367.437.673.767
525143- Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	232.540.000	232.540.000
525152- Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	68.056.816	68.056.816
525153- Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12.961.754	12.961.754
525154- Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.542.070.714	1.542.070.714
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	1.347.460.589	1.347.460.589
525ZZZZ- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	13.734.789.317	13.734.789.317
526111- Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	174.395.216	174.395.216
526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	18.907.104.297	18.907.104.297
526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	99.514.475.131	99.514.475.131
526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	891.777.138.368	891.777.138.368
526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	45.462.528.245	45.462.528.245
526121- Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	27.000.000	27.000.000

526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	630.000.000	630.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	4.338.895.000	4.338.895.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	235.438.375.000	235.438.375.000
526222- Belanja Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	3.765.230.000	3.765.230.000
526223- Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	29.954.138.897	29.954.138.897
526224- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	5.690.164.729	5.690.164.729
526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	69.510.703.305	69.510.703.305
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	395.040.645.468	395.040.645.468
5270100- Belanja Modal Aset Lainnya	0	7.443.877.990	7.443.877.990
5310100- Belanja Tak Terduga	0	48.839.435.652	48.839.435.652
531111- Belanja Modal Tanah	0	9.519.622.148	9.519.622.148
531112- Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	30.785.076.789	30.785.076.789
531113- Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	248.400.000	248.400.000
531114- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	523.500.000	523.500.000
531115- Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	223.753.000	223.753.000
531117- Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	627.509.339	627.509.339
531121- Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN	0	241.251.299.241	241.251.299.241
532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	494.683.466.195	494.683.466.195
532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1.403.373.475	1.403.373.475
533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	729.754.169.466	729.754.169.466
533113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	1.105.836.024	1.105.836.024
533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	11.870.973.251	11.870.973.251
533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	131.026.882.139	131.026.882.139
534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	418.127.644.234	418.127.644.234
534115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	132.109.482	132.109.482
534121- Belanja Modal Irigasi	0	621.210.628.524	621.210.628.524
534131- Belanja Modal Jaringan	0	2.051.917.888.117	2.051.917.888.117
534132- Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	0	8.576.900	8.576.900
534135- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	0	83.253.320	83.253.320
534138- Belanja Modal Perjalanan Jaringan	0	98.540.000	98.540.000
534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	1.019.414.995.545	1.019.414.995.545
534151- Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	310.034.000	310.034.000
534161- Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	17.560.884.854	17.560.884.854
536111- Belanja Modal Lainnya	0	20.519.825.158	20.519.825.158
536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	481.132.000	481.132.000
536113- Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	74.000.000	74.000.000
536114- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	28.800.000	28.800.000
536117- Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	1.504.887.874	1.504.887.874
536121- Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	5.228.131.198	5.228.131.198
537111- Belanja Modal Tanah - BLU	0	7.205.338.903	7.205.338.903
537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	277.082.383.049	277.082.383.049
537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	113.941.261.169	113.941.261.169
537114- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	2.048.572.958	2.048.572.958
537115- Belanja Modal Lainnya - BLU	0	2.593.767.352	2.593.767.352
571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	5.371.200.000	5.371.200.000
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	4.855.064.000	4.855.064.000
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	70.067.100.000	70.067.100.000
6110100- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	0	2.383.850.731.275	2.383.850.731.275

Pemerintahan Kabupaten/Kota			
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	539.164.472.000	539.164.472.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	43.952.383.000	43.952.383.000
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	17.032.504.000	17.032.504.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	86.369.154.000	86.369.154.000
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0	1.362.000	1.362.000
611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	0	47.162.000	47.162.000
611215- Belanja Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	0	803.667.000	803.667.000
6120100- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	5.099.886.067	5.099.886.067
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	348.000	348.000
612112- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	0	3.000	3.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	22.569.064.000	22.569.064.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	12.162.884.000	12.162.884.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	429.337.896.000	429.337.896.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	186.079.000	186.079.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	13.111.107.550	13.111.107.550
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	27.128.658.000	27.128.658.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	53.873.847.000	53.873.847.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	48.238.825.000	48.238.825.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	20.261.627.160	20.261.627.160
6210200- Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	335.767.611.022	335.767.611.022
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	13.144.387.868.000	13.144.387.868.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	1.167.267.870.000	1.167.267.870.000
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	158.599.171.878	158.599.171.878
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	2.021.040.945.000	2.021.040.945.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	1.428.243.952.000	1.428.243.952.000
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	590.271.683.400	590.271.683.400
6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	3.579.407.032.790	3.579.407.032.790
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	2.267.961.495.723	2.267.961.495.723
643111- Insentif Fiskal	0	402.667.194.500	402.667.194.500
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	2.645.085.970.816	2.645.085.970.816
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	59.803.542.000	59.803.542.000
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	51.516.355.236	51.516.355.236
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.833.806.586.969	1.833.806.586.969
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	632.096.675.900	632.096.675.900
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	117.771.170.000	117.771.170.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	11.009.581.000	11.009.581.000
654821- Dana Pelayanan Kepariwisata	0	8.434.356.000	8.434.356.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	122.868.083.508	122.868.083.508
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	61.788.607.649	61.788.607.649
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	9.712.500.000	9.712.500.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	5.959.000.000	5.959.000.000
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	11.240.500.000	11.240.500.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	14.787.500.000	14.787.500.000
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	10.250.000.000	10.250.000.000
662111- Belanja Dana Desa	0	2.051.988.955.347	2.051.988.955.347
7110100- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	0	(2.740.708.554.087)	(2.740.708.554.087)
7120100- Pencairan Dana Cadangan	0	(20.000.000.000)	(20.000.000.000)
714ZZZZ- Pinjaman Dalam Negeri (BAS Level 4)	0	(8.000.000.000)	(8.000.000.000)

7150200- Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah	0	(21.083.332)	(21.083.332)
7150500- Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	0	(75.663.671)	(75.663.671)
7160200- Penarikan Dana Bergulir	0	(4.641.000)	(4.641.000)
7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping LSKP	0	1.655.164.490.369	1.655.164.490.369
7210100- Pembentukan Dana Cadangan	0	15.000.000.000	15.000.000.000
7220200- Penyertaan Modal pada BUMD	0	11.000.000.000	11.000.000.000
722ZZZZ- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah (BAS Level 4)	0	16.576.000.000	16.576.000.000
7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	289.948.908.120	289.948.908.120
7230400- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0	90.215.923.460	90.215.923.460
815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	(51.913.389.746)	(51.913.389.746)
815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(12.804.030.700)	(12.804.030.700)
815114- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu	0	(4.266.000)	(4.266.000)
815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	(622.493.584.101)	(622.493.584.101)
815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(61.901.644.894)	(61.901.644.894)
815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(98.496.470)	(98.496.470)
815619- Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	(976.510.980.013)	(976.510.980.013)
817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	(2.051.988.955.347)	(2.051.988.955.347)
825111- Pengeluaran Uang Persediaan	0	51.915.852.800	51.915.852.800
825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	12.804.030.700	12.804.030.700
825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	0	622.498.640.101	622.498.640.101
825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	61.901.644.894	61.901.644.894
825619- Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	250.261.595.969	250.261.595.969
827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	2.051.988.955.347	2.051.988.955.347
Jumlah	0	2.742.583.583.866	2.742.583.583.866

LAMPIRAN III
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(499.634.460.000)	(499.634.460.000)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(33.461.936.000)	(33.461.936.000)
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	(22.569.064.000)	(22.569.064.000)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(16.969.948.000)	(16.969.948.000)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(85.404.000.000)	(85.404.000.000)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	(11.888.383.000)	(11.888.383.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(407.600.577.000)	(407.600.577.000)
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	(254.000)	(254.000)
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	(20.222.948.160)	(20.222.948.160)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(13.144.387.868.000)	(13.144.387.868.000)
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	(83.084.000)	(83.084.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(1.093.604.550)	(1.093.604.550)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(475.704.000)	(475.704.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(53.873.847.000)	(53.873.847.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(2.645.085.970.816)	(2.645.085.970.816)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(51.516.355.236)	(51.516.355.236)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.833.806.586.969)	(1.833.806.586.969)
643111- Insentif Fiskal	0	(402.667.194.500)	(402.667.194.500)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(632.096.675.900)	(632.096.675.900)
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(117.771.170.000)	(117.771.170.000)
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	(11.009.581.000)	(11.009.581.000)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(122.868.083.508)	(122.868.083.508)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(2.267.961.495.723)	(2.267.961.495.723)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(59.803.542.000)	(59.803.542.000)
654821- Dana Pelayanan Kepariwisataa	0	(8.434.356.000)	(8.434.356.000)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(61.788.607.649)	(61.788.607.649)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	(9.712.500.000)	(9.712.500.000)
8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0	386443383736,745	386443383736,745
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	347599424591,662	347599424591,662
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	545.823.342.550	545.823.342.550
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	18.509.811.490.278	18.509.811.490.278
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	7.591.778.278.071	7.591.778.278.071
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	402.667.194.500	402.667.194.500
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	193964130561,593	193964130561,593
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(5.959.000.000)	(5.959.000.000)
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	(11.240.500.000)	(11.240.500.000)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(14.787.500.000)	(14.787.500.000)
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	(10.250.000.000)	(10.250.000.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(1.167.267.870.000)	(1.167.267.870.000)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(158.599.171.878)	(158.599.171.878)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(2.021.040.945.000)	(2.021.040.945.000)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(1.428.243.952.000)	(1.428.243.952.000)
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	(590.271.683.400)	(590.271.683.400)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(48.238.825.000)	(48.238.825.000)
Jumlah	0	0	0

LAMPIRAN IV

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

ELIMINASI/KONSOLDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	-665819697737,399	-665819697737,399
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	-54277245411,4863	-54277245411,4863
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	-16526438971,4773	-16526438971,4773
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	-21033612661,6871	-21033612661,6871
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	-106658147924,322	-106658147924,322
611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	0	-58240834,133988	-58240834,133988
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	-8906402150,44619	-8906402150,44619
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	-314387275271,427	-314387275271,427
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	-254826,72928191	-254826,72928191
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	-25021289739,8386	-25021289739,8386
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(13.144.387.868.000)	(13.144.387.868.000)
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0	-1681947,67165285	-1681947,67165285
611215- Belanja Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	0	-992456563,461256	-992456563,461256
612112- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	0	-2196,78214898198	-2196,78214898198
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	-136258341,833473	-136258341,833473
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	-9600749006,40763	-9600749006,40763
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	-19865250540,0791	-19865250540,0791
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	-39449701795,5288	-39449701795,5288
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	-2581353105624,45	-2581353105624,45
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	-50275078030,0258	-50275078030,0258
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	-1789621350918,39	-1789621350918,39
662111- Belanja Dana Desa	0	(1.905.504.739.347)	(1.905.504.739.347)
643111- Insentif Fiskal	0	(402.667.194.500)	(402.667.194.500)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	-616866421504,626	-616866421504,626
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	-114933495087,398	-114933495087,398
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	-10744307149,006	-10744307149,006
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	-119907599391,809	-119907599391,809
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	-2213315376140,75	-2213315376140,75
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	-58362586536,8067	-58362586536,8067
654821- Dana Pelayanan Kepariwisataa	0	-8231131726,81703	-8231131726,81703
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	-60299822390,1781	-60299822390,1781
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	-9478479079,69624	-9478479079,69624
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	11.051.020.681	11.051.020.681
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	671.987.941.863	671.987.941.863
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	444.195.729.650	444.195.729.650
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	18.509.811.490.278	18.509.811.490.278
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	7.674.608.060.750	7.674.608.060.750
4220400- Dana Insentif Daerah	0	402.667.194.500	402.667.194.500
4220500- Dana Desa	0	1.905.504.739.347	1.905.504.739.347
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	190.823.410.276	190.823.410.276
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	-5815418979,24426	-5815418979,24426
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	-10969662197,7169	-10969662197,7169
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	-14431197878,0961	-14431197878,0961
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	-10003028114,9947	-10003028114,9947
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(1.167.267.870.000)	(1.167.267.870.000)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(158.599.171.878)	(158.599.171.878)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(2.021.040.945.000)	(2.021.040.945.000)

621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(1.428.243.952.000)	(1.428.243.952.000)
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	(590.271.683.400)	(590.271.683.400)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	-35323396549,2886	-35323396549,2886
Jumlah	0	-,00425074198	-,00425074198



Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Selatan